

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2024 Triwulan I telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi untuk kemudian dilaporkan kepada kepala daerah (Wali Kota) dan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Evaluasi RKPD merupakan rekapitulasi hasil pencapaian kinerja dan anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk dijadikan pedoman penyusunan perencanaan berikutnya.

Masukan dan saran membangun dalam rangka perbaikan dokumen ini sangat kami harapkan agar dokumen ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini baik secara langsung maupun tidak langsung, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Sukabumi, April 2024

Kepala Bappeda Kota Sukabumi

ASEP SUHENDRAWAN, S.Sos.,M.A.P.

NIP. 19660927 198803 1 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penyajian Laporan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Gambaran Umum	11
2.2. Isu Strategis	15
2.3. Strategis dan Prioritas Pembangunan	19
2.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dan Arah Kebijakan	22
BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2023	
3.1. Capaian Kinerja Sasaran	30
3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	52
3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	95
3.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	124
BAB IV PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	
4.1. Pendorong	126
4.2. Penghambat	127
4.3. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan RKPD Beirkutnya	128
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	129
5.2. Rekomendasi	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perwujudan Visi Kota Sukabumi 2018-2023	12
Tabel 2.2	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2.3	Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023	21
Tabel 2.4	Arah kebijakan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023.....	29
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Sukabumi (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	31
Tabel 3.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018–2022 (Persen)	32
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022.....	33
Tabel 3.4	Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2022.....	34
Tabel 3.5	PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2019–2023	35
Tabel 3.6	Capaian dan Target Gini Ratio 2020-2022	37
Tabel 3.7	Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023 (Poin)	40
Tabel 3.8	Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin 2021-2023 (Persen).....	41
Tabel 3.9	Capaian Kedalaman (P1) Kemiskinan 2020-2022 (poin)	42
Tabel 3.10	Capaian Keparahan (P2) Kemiskinan 2021-2023 (poin)	42
Tabel 3.11	Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020-2022 (Persen)	44
Tabel 3.12	Capaian Indikator Makro	45
Tabel 3.13	Capaian Indikator Tujuan/Sasaran (Iku Rpjmd) Tahun 2023	46
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2021 - 2023	52
Tabel 3.15	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2023	54
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021 – 2023.....	54
Tabel 3.17	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2023.....	56
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2023	58
Tabel 3.19	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	60
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2023	61
Tabel 3.21	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	62

Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 – 2023.....	63
Tabel 3.23	Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023	64
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2021 – 2023.....	65
Tabel 3.25	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2023	66
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2023	66
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2023	68
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020 – 2023	69
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2021 - 2023	69
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2023	70
Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2023	71
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 - 2023.....	72
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan PerhubunganTahun 2021 – 2023.....	73
Tabel 3.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2023	73
Tabel 3.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021 – 2023	75
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 – 2023	76
Tabel 3.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2023.....	76
Tabel 3.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021 – 2023.....	77
Tabel 3.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021 – 2023	78
Tabel 3.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2021 – 2023.....	79
Tabel 3.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021 – 2023.....	79
Tabel 3.42	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2021– 2023.....	80
Tabel 3.43	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2023	81
Tabel 3.44	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021 – 2023	81
Tabel 3.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2021 - 2023.....	82
Tabel 3.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan PerdaganganTahun 2021 - 2023	83

Tabel 3.47	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 – 2022	84
Tabel 3.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2022	85
Tabel 3.49	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2020 – 2022.....	86
Tabel 3.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020 – 2022	87
Tabel 3.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan Tahun 2020 – 2022	88
Tabel 3.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2020 – 2022	89
Tabel 3.53	Capaian indikator kinerja Perurusan Triwulan IV Tahun 2023	90
Tabel 3.54	Capaian Kinerja Indikator Program	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023	15
Gambar 3.1	Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi daerah, provinsi dan nasional 2020-2022.....	35
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan Provinsi dan Nasional 2018-2023	37
Gambar 3.3	Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat	39
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi dibandingkan dengan Daerah sekitar tahun 2023	41
Gambar 3.5	Jumlah Penduduk Miskin	41
Gambar 3.6	Perbandingan capaian Persentase Penduduk Miskin daerah, provinsi dan nasional 2020-2022	42
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan Daerah sekitar Tahun 2023.....	44
Gambar 3.8	Capaian dan Target Jumlah Pengangguran 2020-2023 (Orang)	44
Gambar 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka. Adapun dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. RKPD ini adalah rencana program dan/atau kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat perangkat daerah yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Dokumen RKPD sebagai penjabaran dari Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi Tahun 2024; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang dalam proses penyusunannya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional dan daerah yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. *Top down* yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

2. *Bottom-up* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (FPD), dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan berupa matrik program dan kegiatan prioritas sampai dengan Acara Puncak Musrenbang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023.
3. Teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan hasil kajian dan evaluasi periode sebelumnya berbasis pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
4. Politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya Pokok-pokok Pikiran (Pokir) atau hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.
5. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
6. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.
7. Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah di Kota Sukabumi dan nilai-nilai kearifan lokal.
8. Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan- kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program- program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar perangkat daerah di tingkat provinsi/kabupaten.

9. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan, lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu perangkat daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.
10. Pendekatan spasial dalam tahapan perencanaan pembangunan, digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/kota.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 juga menerapkan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix
– ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*).
2. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat/umat, Pinjaman Daerah, CSR, KPBU dan Obligasi Daerah.
3. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, proses penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Forum Perangkat Daerah Tingkat Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat, hasil evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2022 dan 2023, dan secara simultan dilakukan telaahan rancangan Renja Tahun 2024 melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, penelaahan

pokok-pokok pikiran DPRD atau Hasil reses DPRD serta Musrenbang Tingkat Kota.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda, Perangkat Daerah, memperhatikan Pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendapat dari kalangan akademisi, dunia usaha dan komunitas.
4. Penetapan RKPD, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024, hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kota Sukabumi serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024, pemerintah daerah dihadapkan pada kegiatan besar nasional yaitu Pemilihan Umum dan Pemiliha, dimana kegiatan tersebut menjadi kegiatan prioritas pada tahun 2024 dengan anggaran yang cukup besar.

Kondisi diatas memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan I, realisasi kinerja dan anggaran masih rendah, hasl tersebut disebabkan pelaksanaan program/kegiatan masih dalam tahap persiapan baru ada beberapa program/kegiatan di beberapa Perangkat Daerah pelaksanaan kegiatan pada triwulan I .

Evaluasi RKPD penting untuk dilaksanakan agar dapat memastikan target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi RKPD dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah masing-masing, untuk kemudian disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. Evaluasi RKPD ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Evaluasi RKPD, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten

- Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Perubahan PP Nomor 72 Tahun 2019;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
 26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
 29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
 30. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026
 31. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan yang bersifat aspiratif dan terpadu yang bersumber dari berbagai pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan yang sinergi dan efisien. Penyusunan RKPD disesuaikan dengan alokasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dan diharapkan akan memberi arah rencana kerja pembangunan di Tahun 2024 bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan renstra Perangkat Daerah terkait. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 telah mempertimbangkan isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi proses pembangunan di Tahun 2024, serta telah mempertimbangkan arah kebijakan dan target indikator kinerja pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota Sukabumi Tahun 2024. Oleh sebab itu hasil pelaksanaan RKPD perlu ada pengendalian dan evaluasi.

Maksud dari evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan I adalah untuk menilai dan mengevaluasi sebagai berikut:

1. Pencapaian target-target rencana program kegiatan perangkat daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2024 Triwulan I;
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam APBD Kota Sukabumi Tahun 2024 Triwulan I.

Tujuan dari evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan I, adalah:

1. Memberikan gambaran *progress* pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah per triwulan hingga akhir tahun 2024 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 berdasarkan realisasi anggaran;
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga akhir tahun 2024 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024;
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD mulai triwulan I hingga triwulan IV sebagai sistem evaluasi yang harus dilakukan untuk mengendalikan pencapaian tujuan;
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Dalam penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan I ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

Bab ini berisi tentang visi dan misi daerah, tujuan dan sasaran, prioritas pembangunan daerah, dan program dan kegiatan pembangunan.

3. BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 TRIWULAN I

Bab ini menjelaskan hasil capaian kinerja pembangunan berdasarkan kinerja sasaran, program dan kegiatan, dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

4. BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Bab ini berisi faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja, dan tindak lanjutnya bagi pelaksanaan RKPD berikutnya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan I.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

2.1. GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum ini memberikan gambaran pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, juga mengidentifikasi faktor-faktor dan berbagai hal yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan di Kota Sukabumi dilihat dari beberapa aspek.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu selain tentunya memperhatikan Dokumen RPJMD dan Dokumen RPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi dari aspek geografi dan demografi Kota Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran dari 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Dengan demikian, wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan

Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Wilayah Kota Sukabumi berbatasan dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

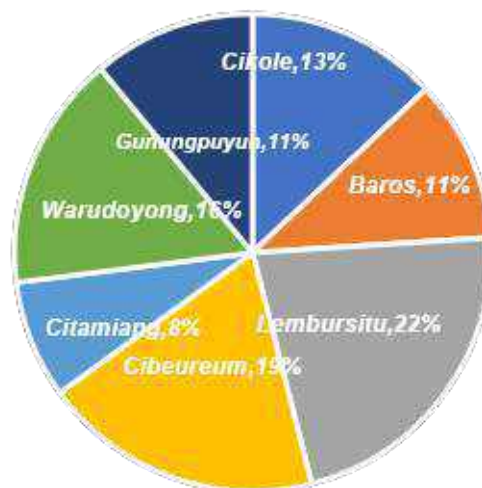
Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel ...
Luas Dataran Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
(1)	(2)	(3)
1	Baros	5,58
2	Lembursitu	10,70
3	Cibeureum	9,13
4	Citamiang	4,00
5	Warudoyong	7,56
6	Gunungpuyuh	5,13
7	Cikole	6,21
Luas Total		48,31

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

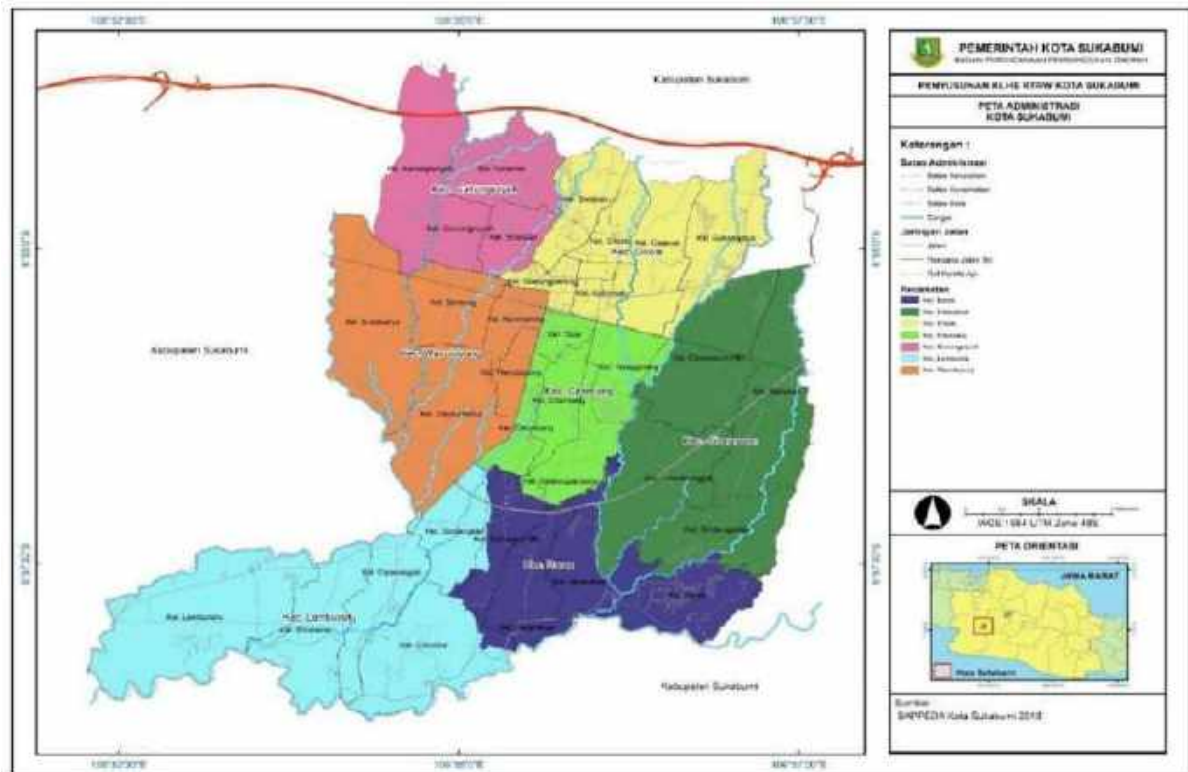
Grafik ...
Persentase Luas Dataran Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Peta wilayah administrasi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar ...
Peta Administrasi Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat $106^{\circ} 45' 50''$ BT – $106^{\circ} 45' 10''$ BT sampai dengan $6^{\circ} 49' 29''$ LS – $6^{\circ} 50' 44''$ LS, secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibukota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lahan

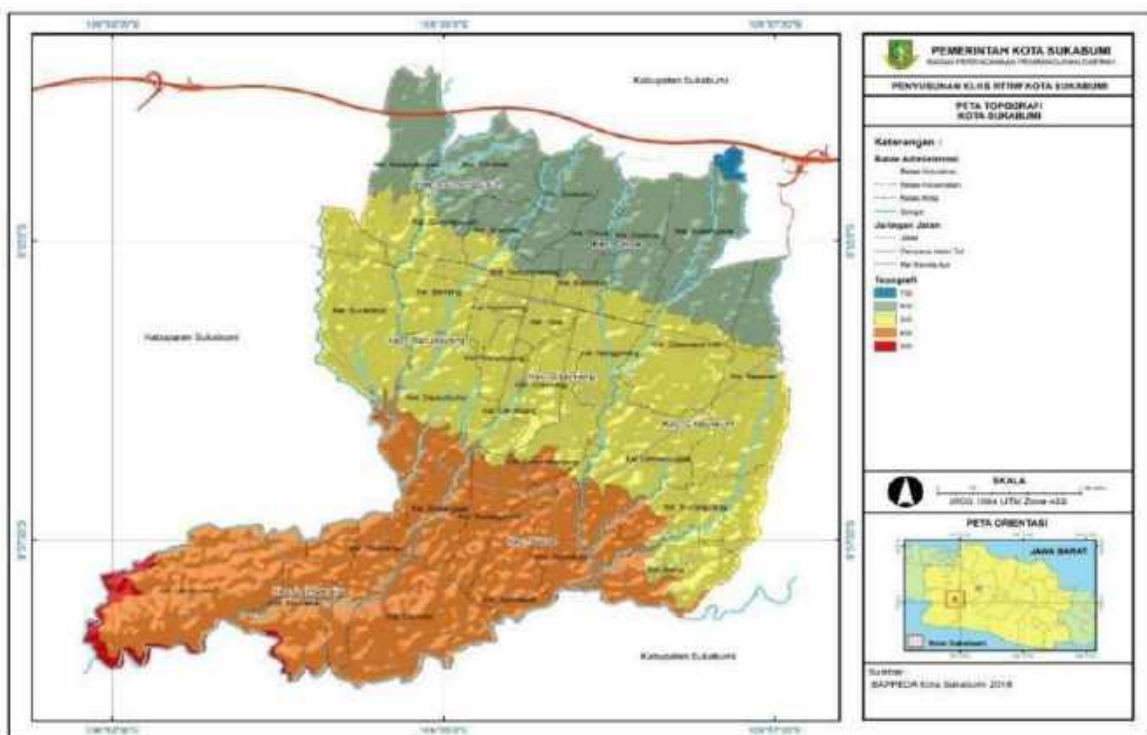
Wilayah Kota Sukabumi merupakan dataran rendah terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada pada ketinggian 584 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah berupa daratan seluas 48,31 Km². Secara morfologi, Kota Sukabumi dapat dibagi menjadi 5 (lima)

satuan morfologi, yaitu morfologi daratan dengan elevasi 385-600 mdpl, morfologi medan bergelombang dengan elevasi 350-975 mdpl, morfologi pegunungan ber-relief sedang dengan elevasi 375-975 mdpl, dan pegunungan ber-relief kasar dengan elevasi 375-900 mdpl.

Kota Sukabumi memiliki tiga stasiun pengamatan cuaca yaitu Stasiun Cimandiri, Stasiun Situmekar dan Stasiun Ciaul. Jumlah curah hujan paling tinggi tercatat di Stasiun Ciaul di Bulan November yaitu sebesar 615 mm dengan total jumlah hari hujan sebanyak 24 hari.

Sementara dibagian tengah mempunyai ketinggian rata-rata 650 meter dari permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Sukabumi berupa perbukitan bergelombang dengan sudut lereng beragam. Wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh kemiringan lereng 0- 2% dan 2-15%. Peta kondisi topografi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar ...
Peta Topografi Kota Sukabumi

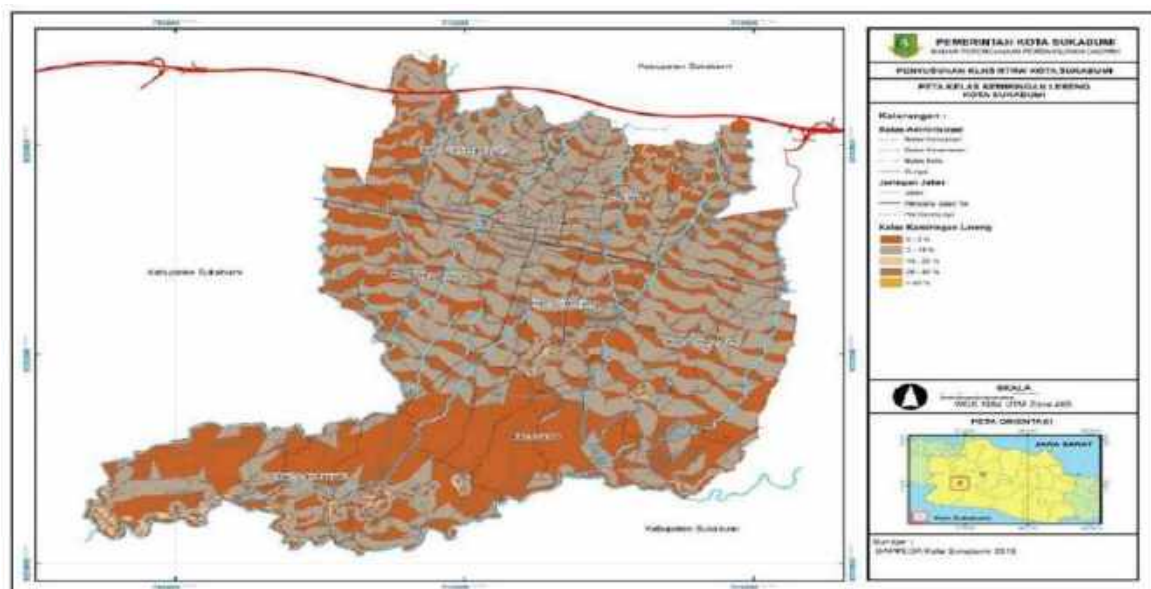


Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Luas Daerah Kota Sukabumi dengan kemiringan lereng 0-2% mencapai 2.228,795 Ha atau sekitar 45,59% dari total luas kota, dan kemiringan lereng 2-15% mencapai 2553.219 Ha atau sekitar 52,22% dari total luas kota. Adapun kondisi kemiringan lereng di wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar ...

Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Kota Sukabumi termasuk kepada zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah dan sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini masih mungkin terjadi adanya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan yang tinggi. Zona gerakan tanah sedang merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan gerakan tanah menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama masih mungkin dapat aktif kembali terutama oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia. Adapun luas gerakan tanah di Kota Sukabumi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

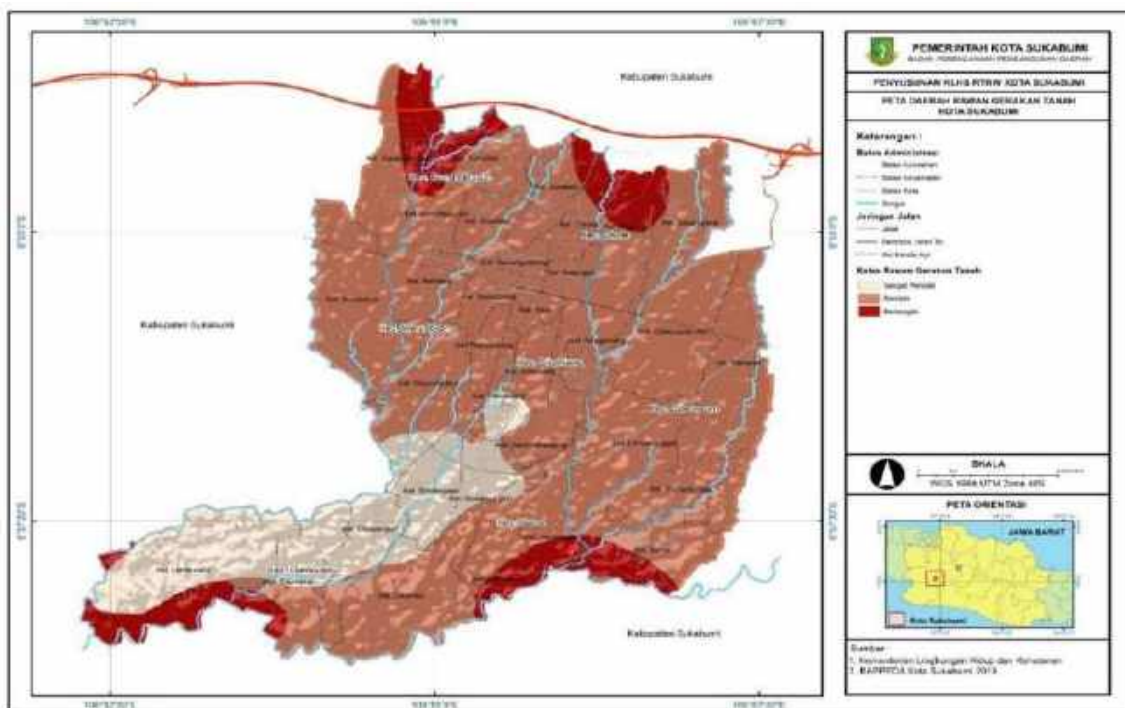
Tabel ...
Luas Potensi Gerakan Tanah di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baros	Menengah	137,97
		Rendah	345,31
		Sangat Rendah	77,20
2	Cibeureum	Rendah	932,21
3	Cikole	Menengah	140,05
		Rendah	504,32
4	Citamiang	Rendah	343,29
		Sangat Rendah	39,67
5	Gunungpuyuh	Menengah	145,73

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rendah	368,50
6	Lembursitu	Menengah	135,26
		Rendah	351,54
		Sangat Rendah	608,55
		Rendah	722,65
7	Warudoyong	Sangat Rendah	36,99

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Gambar ...
Peta Rawan Gerakan Tanah di Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.4 Struktur Geologi

Berdasarkan peta geologi susunan litologi batuan di wilayah Kota Sukabumi dan daerah sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur Holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari Formasi Walat berumur Oligosen Awal yang merupakan satuan yang tertua dijumpai di daerah ini. Formasi Walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari Oligosen Akhir sampai Miosen Awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur Miosen Awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi.

Formasi batuan sedimen di atas ditutupi oleh endapan vulkanik berumur Holosen yaitu batuan produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Satuan batuan vulkanik ini tersebar secara luas sehingga sebagian besar dari wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh singkapan batuan vulkanik. Endapan vulkanik Gunung Gede (Qvg) terdiri dari breksi tufan dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, piroksen dan banyak sekali hornblenda, tekstur seperti trachit, umumnya lapuk sekali. Batuan ini tersebar pada wilayah yang cukup luas mulai dari bagian timur sampai bagian tengah dan mulai dari bagian utara sampai bagian selatan Kota Sukabumi. Sedangkan endapan vulkanik Gunung Pangrango (Qvpo) merupakan endapan yang lebih tua yang tersusun dari lahar dan lava, basal-andesit dengan oligoklas-andesin, labradorit, olivin, piroksen, dan hornblenda. Posisi stratigrafi satuan batuan ini relatif lebih tua daripada endapan vulkanik Gunung Gede dan penyebaran satuan ini terbatas di bagian barat dan barat laut wilayah Kota Sukabumi. Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Kecamatannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel ...
Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri

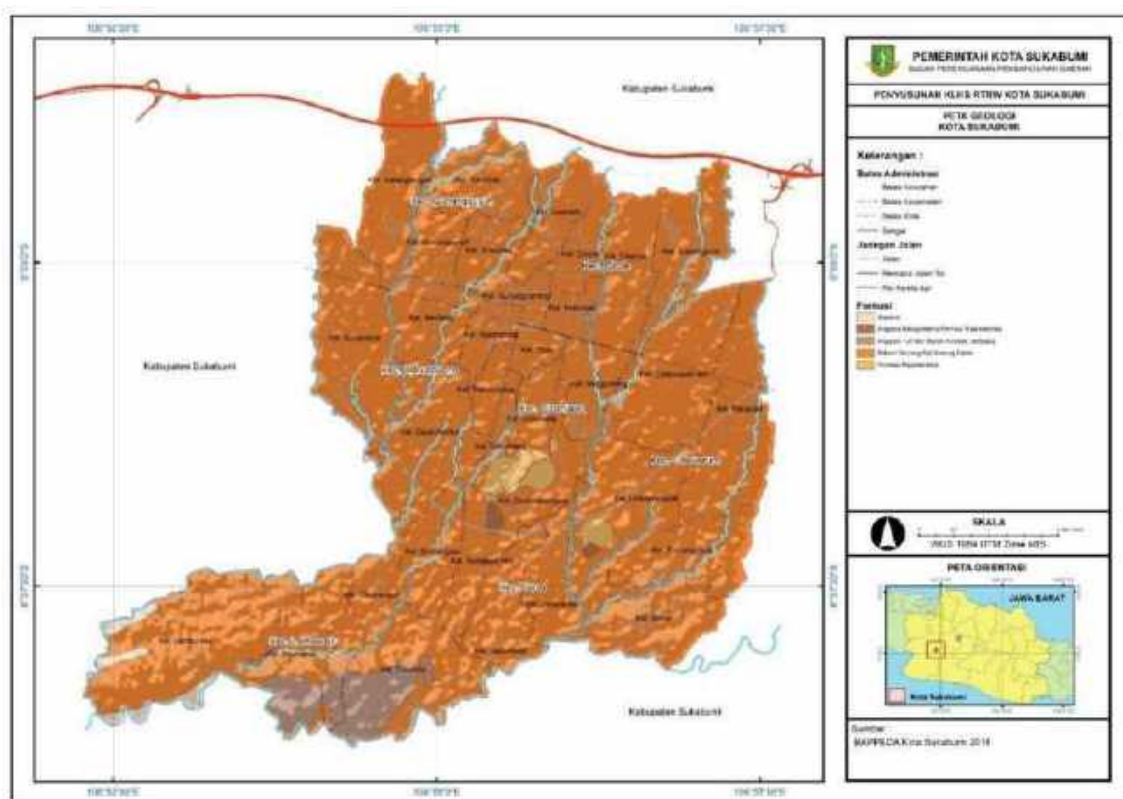
No	Kecamatan	Simbol	Formasi	Luas (Ha)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Baros	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	550,52
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	8,66
		Tmor	Formasi Rajamandala	1,31
2	Cibeureum	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	913,46
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	3,65
		Tmor	Formasi Rajamandala	15,09
3	Cikole	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	644,37
4	Citamiang	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	333,51
		Tmor	Formasi Rajamandala	49,45
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	514,23
6	Lembursitu	Qa	Aluvium	43,42
		Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	894,87

No	Kecamatan	Simbol	Formasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tmjt	Anggota Tuff dan Breksi Formasi	157,06
7	Warudoyong	Qvg	Batuan GunungApi Gunung Gede	759,64

Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

Gambar ...

Peta Geologi Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi,2024-2026

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan, sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan berpenyebaran luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produktivitasnya rendah hingga langka. Kondisi air permukaan maupun air tanah (groundwater) baik dari sisi pergerakan, distribusi maupun kualitasnya di Kota Sukabumi sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sukabumi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai-sungai yang melewati Kota Sukabumi dijelaskan tabel dan gambar berikut:

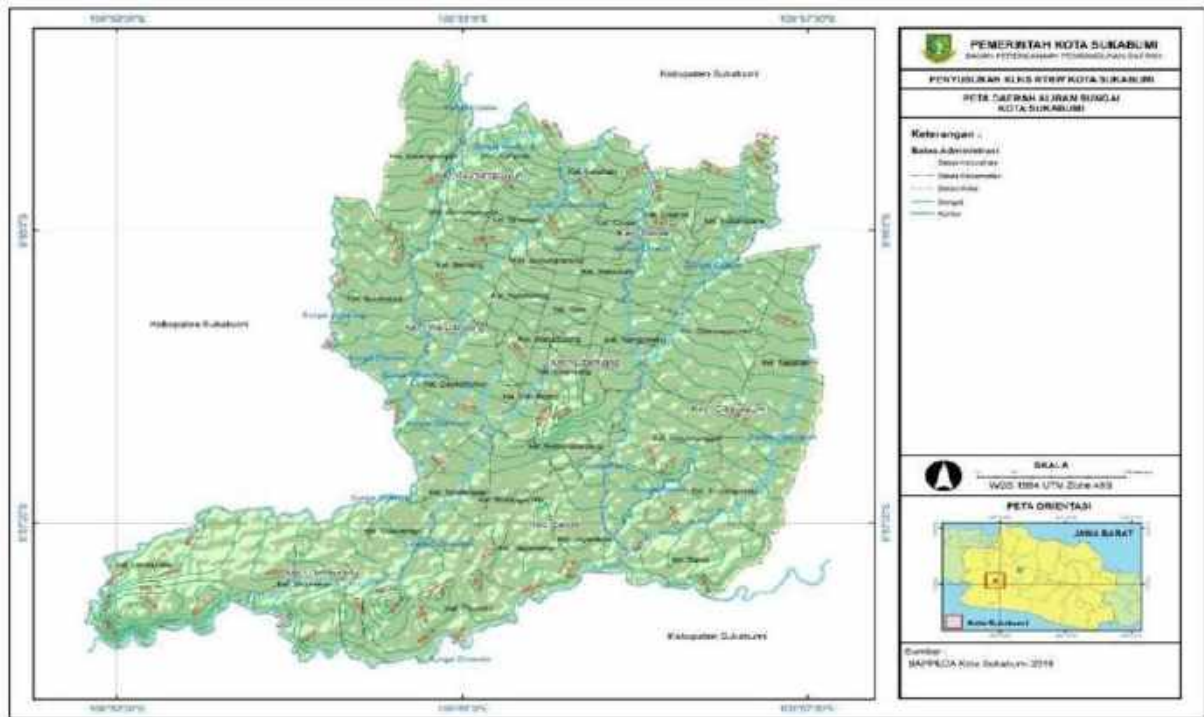
Tabel ...
Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Sukabumi

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m³/dtk)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Ceger	0,004129	4,129	-
2	Cibeureum	0,0076	7,600	-
3	Salakaso	0,003244	3,244	-
4	Cibitung	0,006125	6,125	-
5	Cisuda	0,009659	9,659	0,40
6	Tonjong	0,004625	4,625	-
7	Cimandiri	0,012705	12,705	4,60
8	Cikapek	0,001851	1,851	0,01
9	Cipelang Leutik	0,003727	3,727	0,08
10	Cipelang	0,01508	15,080	1,26
11	Ciseureuh	0,004827	4,827	0,07
12	Cijambe	0,002252	2,252	0,20
13	Cigunung	0,004252	4,252	0,27
14	Bantarpanjang	0,001908	1,908	-
15	Gunungpuyuh	0,001068	1,068	-
16	Cikujang	0,001359	1,359	-
17	Cipanengah	0,005592	5,592	0,54
18	Ciseupan	0,003583	3,583	-
19	Ciparigi	0,001629	1,629	-
20	Cipada	0,001164	1,164	2,13
21	Ciwalung	0,001773	1,773	0,02
22	Cibandung	0,002847	2,847	0,06
23	Ciharempoy	0,004776	4,776	-
24	Cisarua	0,004127	4,127	0,36
25	Ciaul	0,003420	3,420	-
26	Cipicung	0,001503	1,503	-
27	Cisaray	0,002429	2,429	0,2
28	Tipar	0,003926	3,926	-
29	Cipasir	0,001948	1,948	-

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Gambar ...

Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Sukabumi berkisar antara 26°C-28°C. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Kota Sukabumi menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Nilai intensitas curah hujan maksimal sebesar 76 (tujuh puluh enam) mm dan curah hujan tahunan sebesar 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) mm. Jumlah bulan kering berkisar 1-2 bulan per tahun, namun mendapat pengaruh hujan orografis di sepanjang sungai merupakan perbukitan dan dataran bergelombang. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus. Berikut keadaan iklim menurut bulan di Stasiun Pengamatan Cimandiri:

Tabel ...
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan
di Stasiun Pengamatan Cimandiri Tahun 2023

Bulan	Hujan Maksimum (mm)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	16	49	19

Bulan	Hujan Maksimum (mm)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Februari	43	266	24
Maret	48	324	23
April	44	152	13
Mei	49	148	10
Juni	66	178	10
Juli	5	9	2
Agustus	4	5	2
September	8	10	2
Oktober	38	84	7
November	55	322	15
Desember	85	264	11

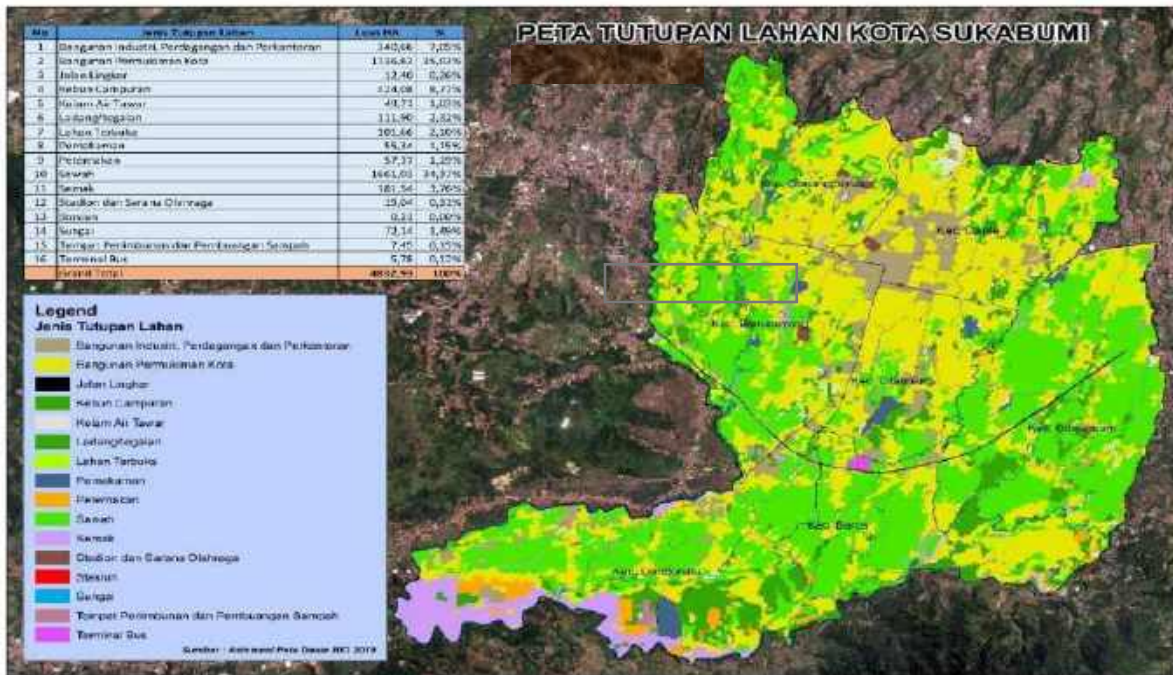
Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

2.1.1.7 Pola Penggunaan Lahan

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Sukabumi, sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan Iman dan Takwa. Kota Sukabumi juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional, sesuai dengan arahan dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Potensi pengembangan wilayah Kota Sukabumi pada masa-masa mendatang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar ...

Peta Tutupan Lahan Kota Sukabumi



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi

2.1.1.8 Daerah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang pasang/abrasi, dan tanah longsor. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Daerah rawan bencana yang berada di wilayah Kota Sukabumi meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

1. Daerah rawan letusan gunung berapi karena berlokasi relatif dekat dengan kawasan Gunung Gede Pangrango;
2. Daerah rawan gempa yang terletak di jalur daerah rawan gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung;
3. Daerah rawan banjir yang tersebar di beberapa titik wilayah. Secara umum penyebab terjadinya genangan atau banjir di wilayah Kota

Sukabumi lebih banyak diakibatkan oleh kondisi saluran yang tidak terawat, tersumbat oleh sampah dan tingginya sedimentasi;

4. Daerah rawan gerakan tanah zona patahan aktif, yaitu patahan Cimandiri;
5. Daerah longsor di beberapa bagian daerah wilayah kota.

Berikut tabel jumlah kejadian bencana dan area terdampak bencana tahun 2023:

Tabel ...
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana
di Kota Sukabumi Tahun 2023

Jenis Bencana	Kejadian Bencana
(1)	(2)
Kebakaran	33
Kabakaran Pemukiman	34
Kebakaran Transportasi	1
Banjir	13
Tanah Longsor	37
Angin Puting Beliung	6
Gempa Bumi	-
Cuaca Ekstrem	61
Bencana Non-Alam	-
Jumlah	185

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

Tabel ...
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Bulan
di Kota Sukabumi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Kejadian Bencana
(1)	(2)
Januari	1
Februari	16
Maret	25
April	10
Mei	11
Juni	10
Juli	8
Agustus	6

Bulan	Jumlah Kejadian Bencana
(1)	(2)
September	37
Oktober	25
November	24
Desember	12
Jumlah	185

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

Tabel ...
Nilai Kerugian Akibat Bencana Menurut Jenis Bencana
di Kota Sukabumi (Rp) Tahun 2023

Jenis Bencana	Nilai Kerugian
(1)	(2)
Kebakaran	36.100.000
Kabakaran Pemukiman	2.383.100.000
Kebakaran Transportasi	200.000.000
Banjir	624.875.000
Tanah Longsor	1.999.850.000
Angin Puting Beliung	38.400.000
Gempa Bumi	-
Cuaca Ekstrem	816.350.000
Bencana Non-Alam	-
Jumlah	6.098.675.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

2.1.1.9 Demografi

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau mempunyai Kartu Keluarga (beridentitas).

Sebagaimana karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas terbatas, yakni 48,31 Km², serta jumlah penduduk Tahun 2023 sebanyak 360.644 jiwa, kepadatan penduduk

7.465 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan dan rasio jenis kelamin penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel ...
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Baros	40,38	2,50
Lembursitu	43,84	2,08
Cibeureum	48,31	2,64
Citamiang	54,57	1,03
Warudoyong	60,72	1,07
Gunungpuyuh	49,58	0,96
Cikole	63,24	0,79
Jumlah	360,64	1,48

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Tabel ...
Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2023

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)
Baros	7.237	103
Lembursitu	4.098	98
Cibeureum	5.291	102
Citamiang	13.634	101
Warudoyong	8.030	103
Gunungpuyuh	9.656	103
Cikole	10.191	98
Jumlah	7.465	101

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu 2024-2026. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antarperiode, maka Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan: 1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; 2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan 3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi. Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah; dan
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan:

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

2.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005 2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

NO	MISI RPJPD	SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ISU STRATEGIS AKTUAL	TUJUAN RPD	SASARAN RPD
1.	Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya	SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia	Kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	- Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2.	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3.	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

4.	Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi	Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing	a. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa b. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah	Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan	Inovasi di pemerintahan Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis Meningkatnya inovasi daerah
6.	Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana	Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Sukabumi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan/sasaran		Indikator kinerja (tujuan/sasaran)	
1		2	
1.1	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi
1.1.1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	a.	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB

1.1.2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	b.	Indeks Kota Kreatif
1.2	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif		Indeks Pembangunan Manusia
1.2.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	a.	Indeks Pendidikan
1.2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	b.	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
1.2.3	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	c.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
1.3	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni
1.3.1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	a.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
1.3.2	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	b.	Indeks Rasa Aman
1.4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif		Indek Reformasi Birokrasi
1.4.1	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	a.	Indeks Reformasi Birokrasi
1.4.2	Meningkatnya inovasi daerah	b.	Indeks Inovasi Daerah

Sumber: RPD Kota Sukabumi tahun 2024-2026, Bappeda 2024

Isu strategis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Ekonomi bertumpu pada sector perdagangan dan jasa;
3. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya;
4. Inovasi dipemerintahan;
5. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024; dan
6. Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan.

2.3 STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi sasaran pembangunan tahunan 2024-2026. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, yakni:

“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”

Tema di atas memiliki makna bahwa Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024 disusun dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat. Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera terutama melalui pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh unsur masyarakat.

Dalam pelaksanaan tema di atas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan sasaran dan isu strategis RPD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2024. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan dengan tetap memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	
1	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;	1	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa;
2	Dampak PSN dan megaprojek lainnya;	2	Peningkatan Kondusifitas Kota;
3	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan;	3	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4	Pemilu dan pilkada serentak 2024;	4	Peningkatan Kondusifitas Kota
5	Kualitas SDM	5	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;
6	Inovasi di pemerintahan.	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Tabel 2.3. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024

2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024 DAN ARAH KEBIJAKAN

Prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui 71 (tujuh puluh satu) arah kebijakan sebagai berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
1	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	1	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		2	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok
		3	Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
		4	Memberdayakan pelaku UMKM
		5	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
		6	Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
		7	Memanfaatkan dan melindungi HKI
		8	Meningkatkan obyek daya tarik wisata
		9	Meningkatkan pemasaram wisata
		10	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
		11	Meningkatkan literasi masyarakat
		12	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
		13	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
		14	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
		15	Meningkatkan penempatan tenaga kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
		16	Meningkatkan kualitas jalan kota
		17	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		18	Meningkatkan pengelolaan persampahan
2	Peningkatan Kondusifitas Kota	19	Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		20	Mengurangi luas kawasan kumuh
		21	Mengurangi RTLH
		22	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
		23	Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
		24	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		25	Meningkatkan kerukunan umat beragama
		26	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan	36	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
		37	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	38	Meningkatkan transparansi pemerintahan	
	39	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing	
	40	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi	
	41	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi	
	42	Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi	
	43	Implementasi pemanfaatan inovasi	

Tabel 2.4. Arah kebijakan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Evaluasi pembangunan daerah pada buku ini menjelaskan tentang indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Hasil Evaluasi akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi pembangunan daerah melalui data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.

3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.A. Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai penambahan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9.801,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 477,72 miliar rupiah dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022 Sementara pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Kondisi perekonomian tampak berjalan relatif stabil di Kota Sukabumi selama 2 tahun terakhir, dengan nilai pertumbuhan dikisaran 5 persen.

Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 9,08 persen. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas 5 persen. Sementara enam lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif yang lebih rendah.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga delapan persen tersebut antara lain: lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,04 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 7,81 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,71 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,17 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,85 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,17 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,79 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 5,54 persen.

Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,64 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 3,80, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,33 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,19 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,09 persen serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 2,07 persen.

Berikut disajikan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha:

Tabel ...
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi
Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	0,62	0,76	3,58	7,17
Indusri Pengolahan	5,30	-1,93	2,49	4,81	4,64
Pengadaan Listrik dan Gas	2,95	2,99	8,98	5,90	3,19

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,60	6,85	8,02	6,32	2,09
Konstruksi	7,09	-4,06	4,00	-0,15	6,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	-2,68	3,64	5,47	3,80
Transportasi dan Pergudangan	7,17	-6,98	3,41	7,59	9,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	-3,41	2,74	9,70	7,81
Informasi dan Komunikasi	8,75	10,78	8,23	7,01	6,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,58	2,81	4,79	2,57	3,33
Real Estat	8,16	-0,86	7,76	6,30	5,54
Jasa Perusahaan	7,37	-7,67	7,87	9,13	8,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,21	-3,93	-2,76	-0,34	2,07
Jasa Pendidikan	6,34	4,39	2,88	8,09	5,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	1,82	7,82	9,85	5,72
Jasa lainnya	9,15	-0,82	1,42	11,67	7,71
Produk Domestik Regional Bruto	5,53	-1,49	3,71	5,35	5,12

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

3.1.B. PDRB per Kapita

Data PDRB Kota Sukabumi yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian.

Secara umum, PDRB per Kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan

jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 42,56 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Sukabumi juga mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2023, masing-masing sebesar 26,53 juta rupiah dan 27,18 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena dalam hal ini pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi. Berikut disajikan Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Tahun 2019-2023:

Tabel ...
Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi
Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
ADHB	12.387.691,54	12.401.540,58	13.053.044,18	14.192.254,06	15.349.709,36
ADHK	8.664.017,06	8.534.716,50	8.851.051,49	9.324.164,63	9.801.880,80

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

Tabel ...
PDRB Perkapita Kota Sukabumi Tahun 2019-2023

PDRB Perkapita (Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	37.927.735,70	35.925.772,04	37.278.009,63	39.931.275,25	42.561.942,04
ADHK	26.526.859,19	24.724.047,59	25.277.596,39	26.234.436,27	27.178.826,77

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

Tabel ...
Persentase Pertumbuhan Perkapita Kota Sukabumi
Tahun 2019-2023

Persentase Pertumbuhan per Kapita (%)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,42	-6,80	2,24	3,79	3,60
Jumlah Penduduk (ribu orang)	326,61	345,20	350,15	355,42	360,64
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,10	5,69	1,44	0,50	0,49

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

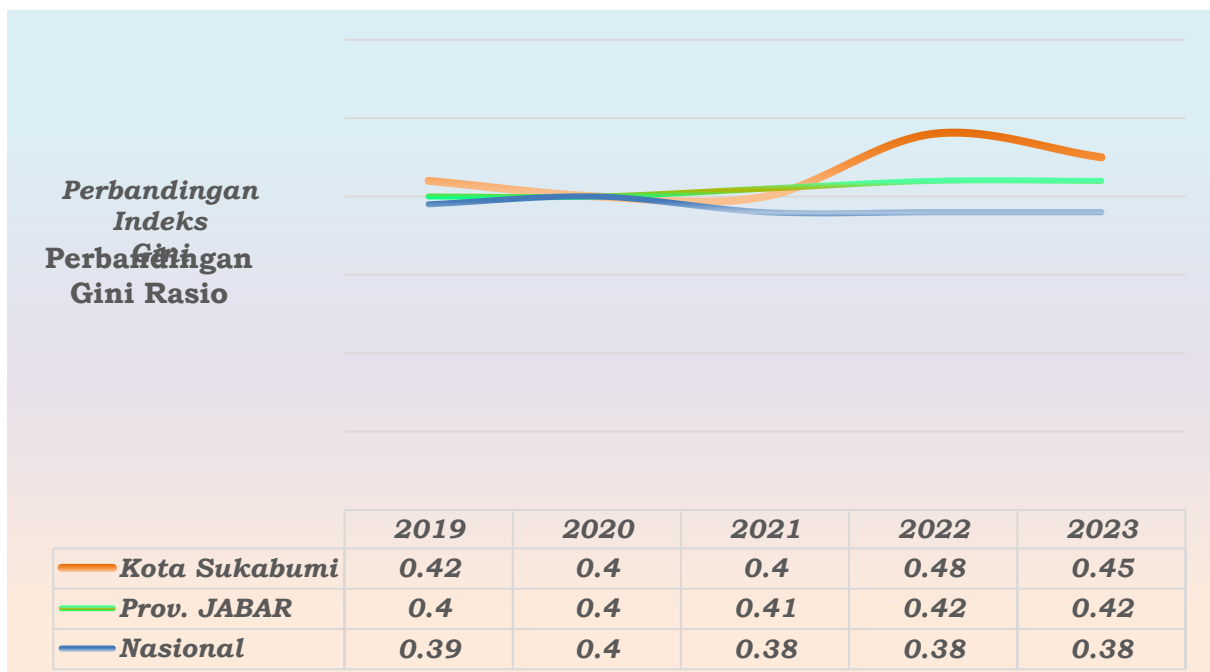
3.1.C. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indikator gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan alam suatu populasi. Semakin tinggi indeks gini, semakin tinggi ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 (sama sekali tidak ada ketimpangan) hingga 1 (ketimpangan maksimal). Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Angka Indeks Gini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Pada Tahun 2023 tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,45 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Berikut disajikan perbandingan indeks gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama periode 2019-2023:

Grafik ...
Realisasi Indeks Gini di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,45. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadaro, Kota Sukabumi termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini ratio berkisar 0.36-0,49). Kota Sukabumi termasuk wilayah yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis

industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunya kesejahteraan sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu (1) Ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; (2) Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; (3) Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti dan saham; dan (4) Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Hal ini terlihat saat terjadi guncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

3.1.D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human Development Index* atau *HDI* yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 dan metode penghitungan

direvisi pada tahun 2010. Penyempurnaan metode penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan secara berkala untuk memperoleh indikator yang lebih baik lagi dan relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perhitungan IPM ini mengacu kepada perhitungan BPS yang mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. Pada tahun 2023 Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF) digunakan sebagai dasar penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun melambat dibanding dua tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi tahun 2023 mencapai 77,16 poin meningkat sebesar 0,92 poin (1,21 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 76,24. Selama periode 2020-2023, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun.

Peningkatan IPM Kota Sukabumi tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,89 tahun, lebih lama 0,25 tahun (0,33 persen) dibandingkan tahun 2022.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 13,59 tahun menjadi 13,60 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,23 tahun (2,27 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 10,14 tahun menjadi 10,37 tahun.

Dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2023 mengalami peningkatan 570 ribu rupiah (5,08 persen) dibanding tahun 2022 menjadi sebesar Rp 11,80 juta rupiah.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2023 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,16 pada tahun 2023. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat sepanjang periode 2020- 2023. Peningkatan IPM tahun 2023 IPM didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami akselerasi pertumbuhan di 2023 sebesar 5,08 persen. Sedangkan dua indikator yang mengalami perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun sebelumnya adalah Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan masing-masing 0,33 persen dan 2,27 persen. Kecepatan pertumbuhan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) bergerak stabil sama seperti di tahun 2022, yaitu 0,07 persen. Perkembangan IPM dan

dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel ...
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Menurut Dimensi Penyusunnya
Tahun 2020-2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	74,23	74,38	74,64	74,89
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,47	13,58	13,59	13,60
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,59	9,81	10,14	10,37
Sumber Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	10.999	10.942	11.229	11.799
Indeks Pembangunan Manusia		75,06	75,44	76,24	77,16

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

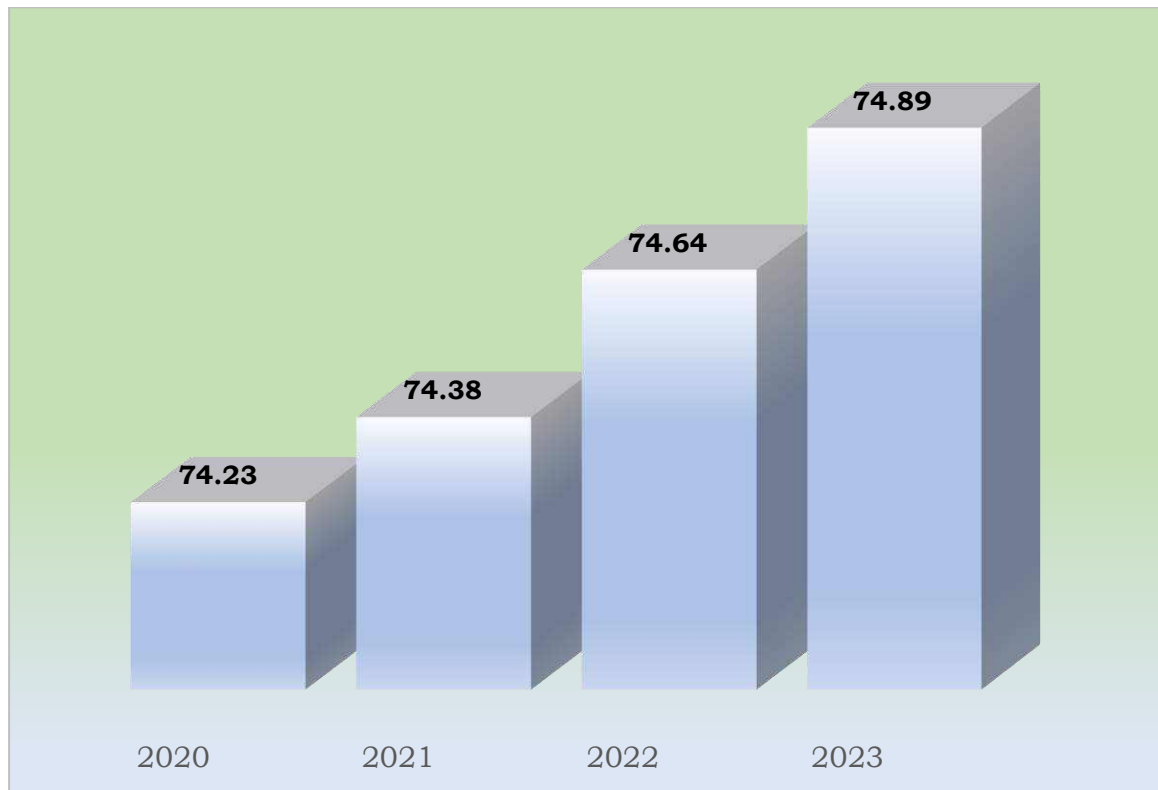
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Kota Sukabumi telah meningkat sebesar 0,66 tahun. Selama periode tersebut, rata-rata UHH Kota Sukabumi tumbuh sebesar 0,30 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Sukabumi adalah 74,23 tahun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,89 tahun. UHH tahun 2023 meningkat sebesar 0,25 tahun (0,33 persen) jika dibandingkan tahun 2022. Terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun 2022 yang mencapai 0,35 persen.

Penambahan umur harapan hidup dari bayi yang baru lahir merupakan dampak positif dari keberhasilan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik dari sisi prasarana, akses, hingga

kualitas kesehatan. Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik ...
Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

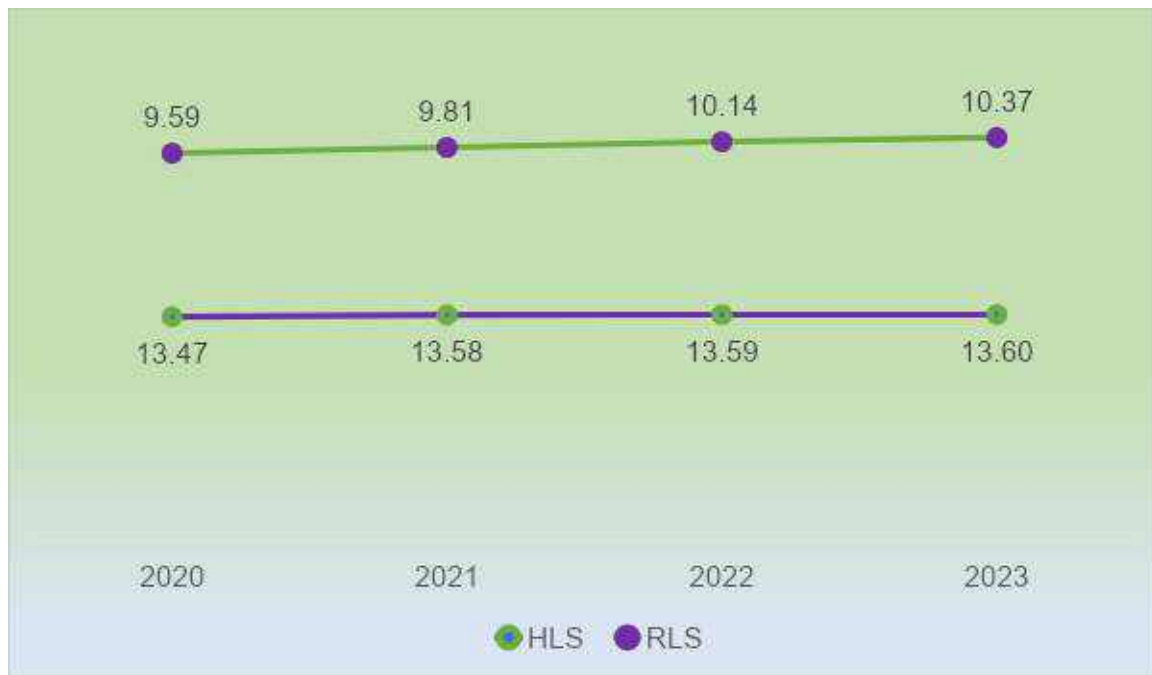


Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2020 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan HLS Kota Sukabumi sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2023, HLS Kota Sukabumi mencapai 13,60 tahun, yang berarti anak umur 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma II. Berikut grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2023:

Grafik ...
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

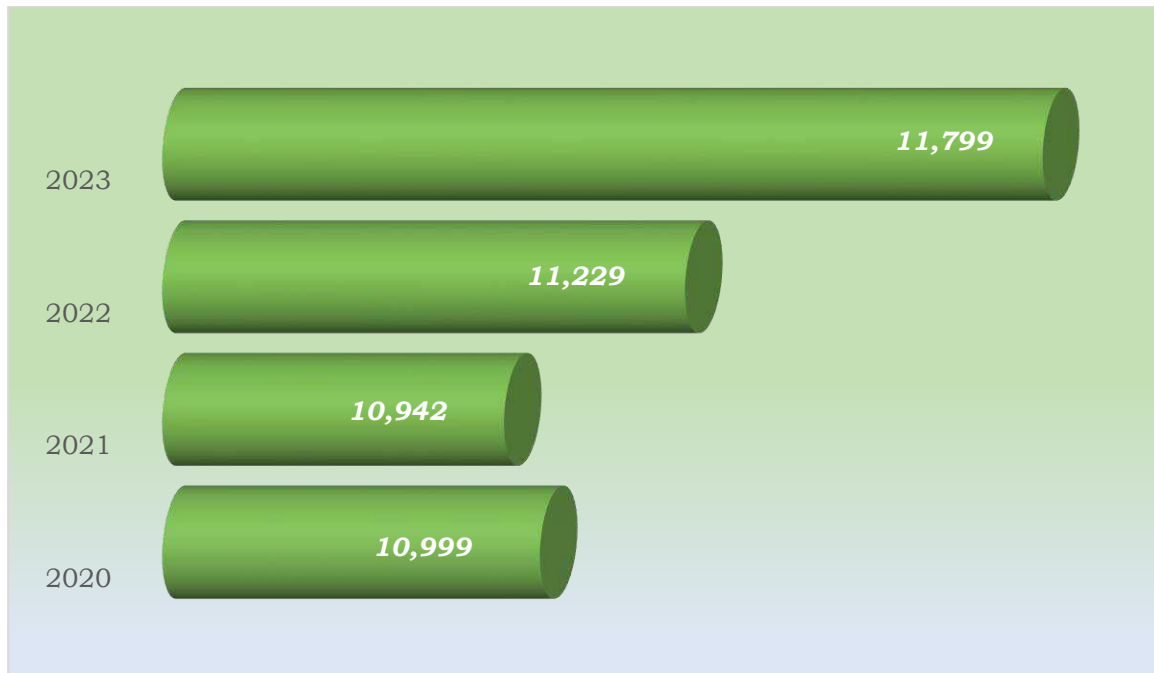


Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Sementara pada periode yang sama, RLS Kota Sukabumi rata-rata tumbuh sebesar 2,64 persen per tahun. Pada 2023, RLS Kota Sukabumi mencapai 10,37 tahun atau setara dengan menyelesaikan masa pendidikan hingga menamatkan SMA kelas X. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sukabumi yang lebih baik. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator proses pembangunan dari program-program yang bersifat jangka pendek. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan hasil upaya pembangunan yang bersifat jangka panjang. Kedua indikator ini saling melengkapi dalam menggambarkan capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita per tahun (harga konstan 2012). Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Kota Sukabumi mencapai Rp 11,80 juta per tahun. Angka ini meningkat Rp 570 ribu (5,08 persen) dibandingkan tahun 2022. Dalam kurun waktu 2020-2023, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 2,39 persen per tahun. Pengeluaran riil per kapita selama tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik ...
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023 (Rp000)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Jika dibandingkan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi berada diatas IPM Provinsi Jawa Barat yang artinya bahwa secara rata-rata kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi melebihi rata-rata kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Apabila sejak tahun 2013 status pembangunan manusia Kota Sukabumi telah tergolong berkategori “tinggi”, karena IPM nya telah berada di atas 70, maka status “tinggi” dalam pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat baru tercapai di tahun 2016. Kecepatan dalam melakukan pembangunan di setiap wilayah tidaklah merata. Upaya yang dikerahkan untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kecepatan yang terjadi.

IPM di Kota Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang kurun waktu 2020-2023, IPM Kota Sukabumi telah mengalami kenaikan sebanyak 2,10 poin dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan per tahun sebesar 0,92 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan 0,74 persen per tahun dengan kenaikan IPM 1,63 poin dalam periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kota Sukabumi masih berada diatas rata-rata Jawa Barat.

Di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM di kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$), serta dua puluh kabupaten/kota dengan capaian IPM berkategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan tiga kabupaten/kota dengan capaian IPM di kategori “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq$

80). Sejak tahun 2012 Provinsi Jawa Barat tidak memiliki wilayah kabupaten/kota dengan capaian pembangunan manusia berkategori “rendah”.

3.1.E. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan sering sekali menjadi penghambat laju pembangunan manusia, misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga berpengaruh buruk bagi hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding kondisi 2022 dari 8,02 persen menjadi 7,50 persen. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi tahun 2020-2023:

Tabel ...
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2020	25,42	7,70
2021	27,19	8,25
2022	26,59	8,02
2023	24,96	7,50

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Untuk mengukur kemiskinan, konsep yang digunakan BPS yaitu dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk

miskin juga semakin melebar. Berikut tabel dalam kurun waktu empat tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Kota Sukabumi sebesar 1,39 persen pada tahun 2021, dan terendah sebesar 1,17 persen di tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 1,39 persen. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel ...
Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023

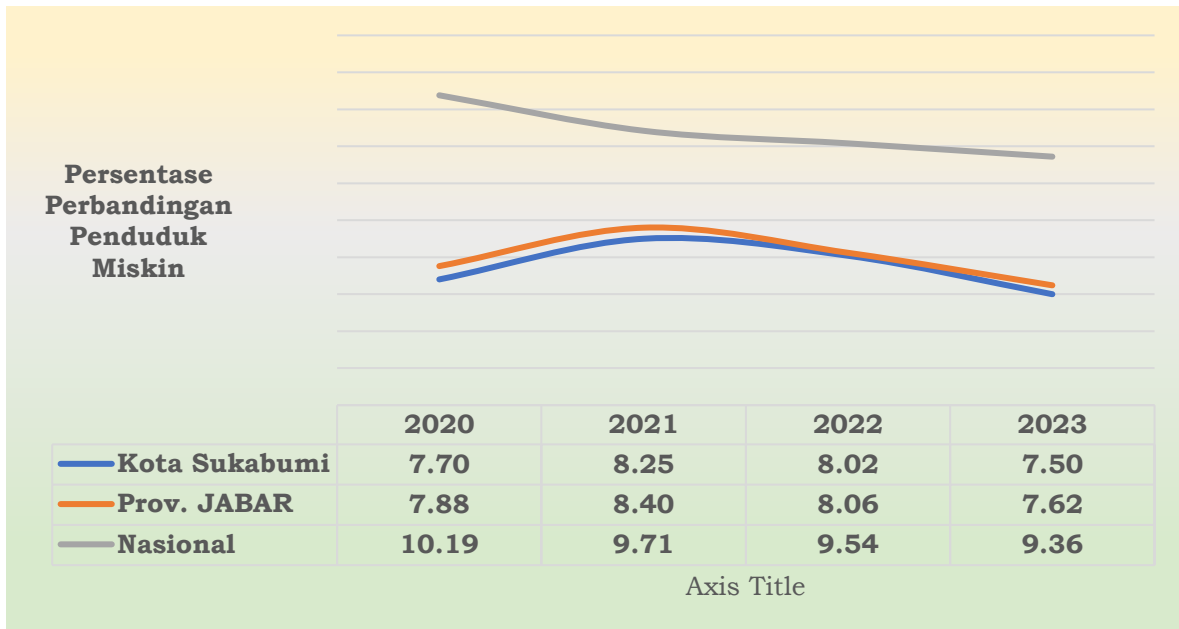
Indikator	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	25,42	27,19	26,59	24,96
Persentase Penduduk Miskin	7,70	8,25	8,02	7,50
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	547.415	567.734	594.118	644.276
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,17	1,39	1,27	1,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,36	0,38	0,31

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,38 persen di tahun 2022, dan terendah sebesar 0,22 persen di tahun 2020. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti naik dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sukabumi meningkat.

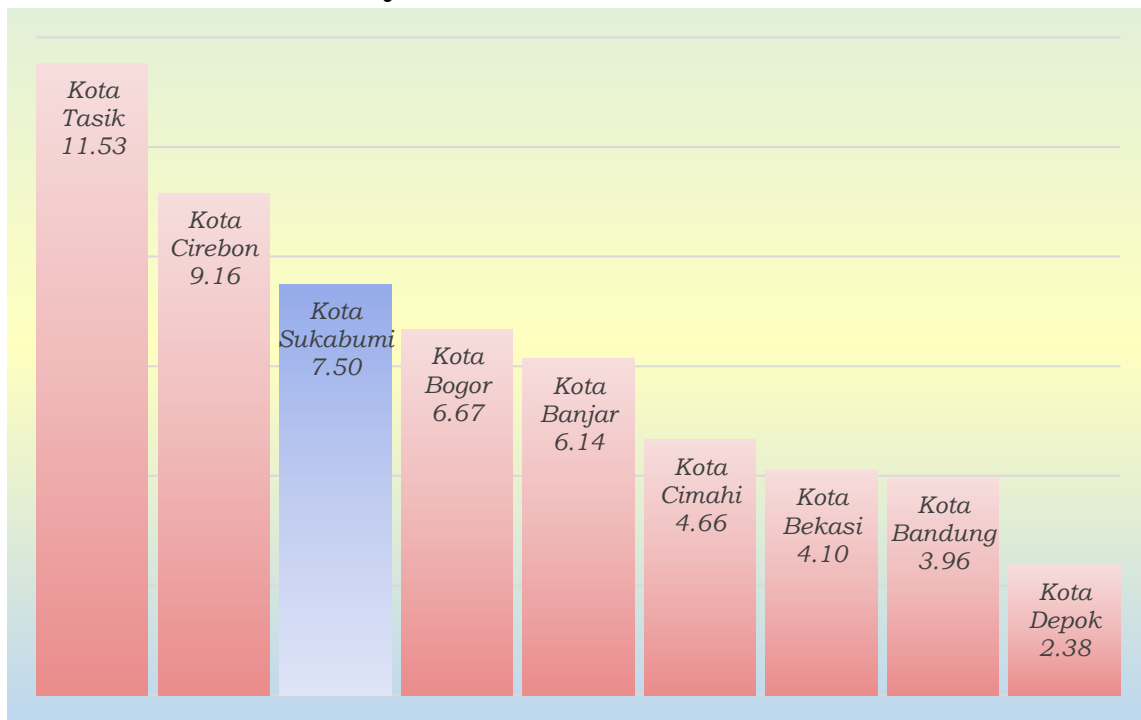
Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kota Sukabumi berada dibawahnya. Tersaji dalam grafik berikut:

Grafik ...
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Grafik ...
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi dengan Kota Lainnya di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

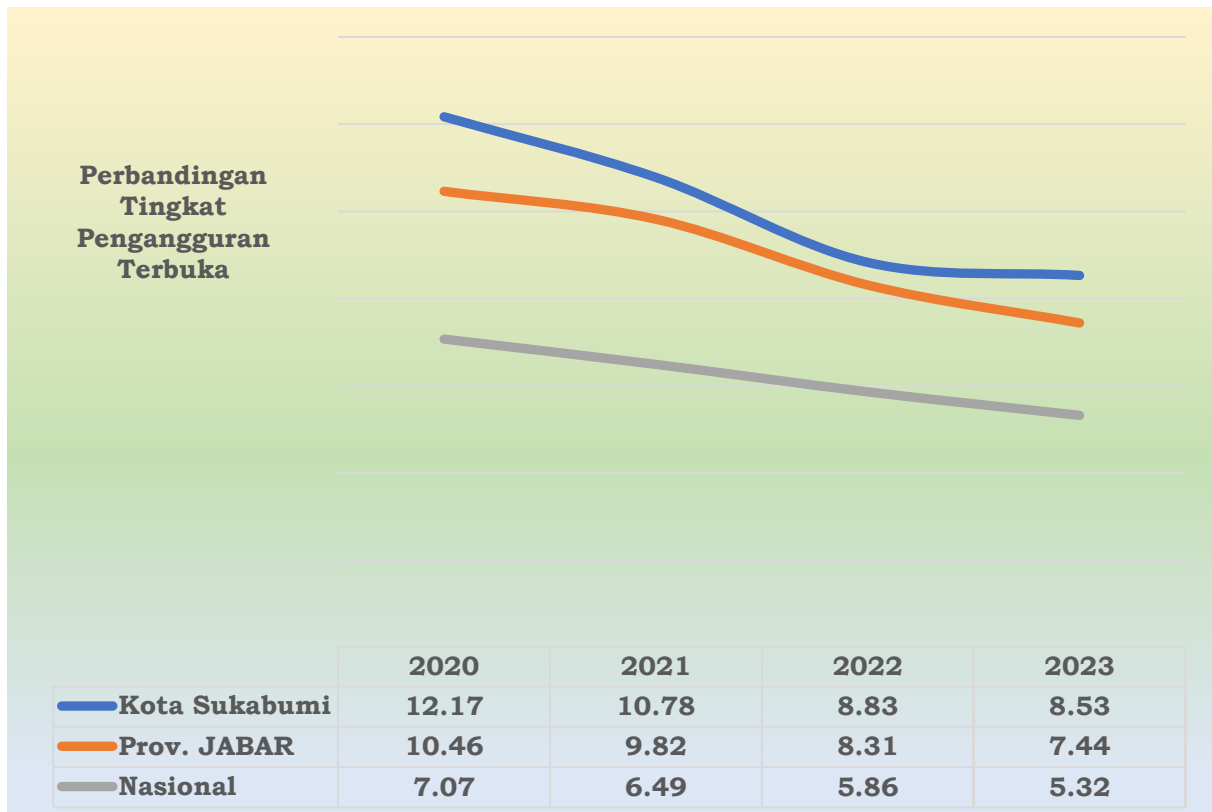
3.1.F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan

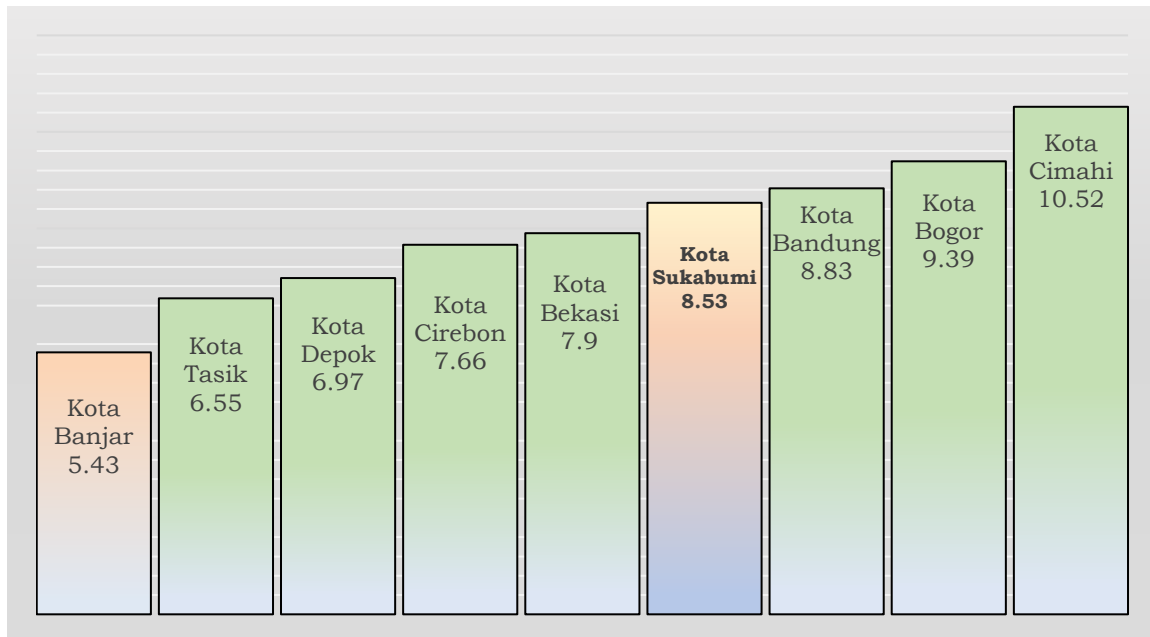
dirasa sangat kompleks dengan kondisi Kota Sukabumi yang tidak memiliki sumber daya alam dan angkatan kerja semakin meningkat. Selama periode 2020-2023, kondisi TPT Kota Sukabumi turun sebesar 3,64 persen. Berikut tabel perbandingan persentase TPT Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020-2023:

Grafik ...
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Grafik ...
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi
dengan Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2023 (Persen)



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

TPT Kota Sukabumi Tahun 2023 dibandingkan dengan Kota lain, berada pada urutan ke-4 (empat) tertinggi di Jawa Barat. Begitupun dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional, TPT Kota Sukabumi lebih tinggi. Permasalahan terkait pengangguran dan dunia kerja ini diantaranya yaitu jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan juga belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja. Berikut tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin:

**Tabel ...
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kota Sukabumi Tahun 2023**

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	27.669	17.222	44.891
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	5.946	3.916	9.862
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	7.882	2.013	9.895
Buruh/Karyawan/Pegawai	48.733	23.731	72.464
Pekerja bebas	9.392	1.794	11.186

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.706	6.758	8.464
Jumlah	101.328	55.434	156.762

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

3.1.G. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Untuk mengetahui capaian pembangunan manusia secara gender digunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan membandingkan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Capaian IPG Kota Sukabumi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPG Provinsi Jawa Barat. Artinya pembangunan manusia secara gender di Kota Sukabumi lebih merata dibanding di tingkat Jawa Barat. Berikut grafik perbandingan capaian IPG Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat:

Grafik ...
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sukabumi
dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

3.1.B. Capaian Indikator Utama

Pemerintah Kota Sukabumi telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Unit (IKU) Kota Sukabumi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, memiliki indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas).

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Pada tahun 2024, capaian indikator sasaran belum dapat dilaporkan karena prosesnya masih berjalan hingga akhir tahun nanti, sehingga untuk kondisi saat ini yaitu hingga akhir triwulan I, capaiannya masih 0 (nol). Adapun pengukuran IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU RPJMD)
TAHUN 2024**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1		3					
I	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,41	5,37		
1.	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,4	4		

a	Berkembangnya ektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	33,95	30,93		
II	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks pembangunan Manusia	Poin	75,8	75,55		
a	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,77	71,58		
b	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,37	0,33		
c	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	37,736	34,001		
II I	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Poin	65,5	65,00		
a	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	86,5	86		
b	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Poin	75,6	75,4		
I V	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75	73		
a	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif		

3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Pemerintah Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	986.693.788.138	201.363.754.522	26,44	Sangat Rendah	20,41	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	845.801.335.311	169.507.087.939	45,46	Sangat Rendah	20,04	Sangat Rendah
1.01	Pendidikan	259.000.738.343	48.247.996.024	8,00	Sangat Rendah	18,63	Sangat Rendah
1.02	Kesehatan	494.614.504.286	106.093.503.712	63,45	Rendah	21,45	Sangat Rendah
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.101.366.010	9.003.210.919	68,47	Sedang	14,05	Sangat Rendah
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.757.907.662	3.390.765.606	79,67	Tinggi	24,65	Sangat Rendah
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6.930.263.009	1.178.410.241	12,50	Sangat Rendah	17,00	Sangat Rendah
1.06	Sosial	7.396.556.001	1.593.201.437	40,67	Sangat Rendah	21,54	Sangat Rendah
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	140.892.452.827	31.856.666.583	7,42	Sangat Rendah	22,61	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.07	Tenaga Kerja	4.267.449.939	978.692.233	0,00	Sangat Rendah	22,93	Sangat Rendah
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.217.633.410	197.943.152	0,00	Sangat Rendah	16,26	Sangat Rendah
2.09	Pangan	14.376.485.164	2.798.867.185	48,00	Sangat Rendah	19,47	Sangat Rendah
2.10	Pertanahan			0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.11	Lingkungan Hidup	38.418.486.617	7.218.729.488	16,63	Sangat Rendah	18,79	Sangat Rendah
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6.551.177.073	2.159.304.611	32,96	Sangat Rendah	32,96	Sangat Rendah
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa			0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.289.603.947	2.402.624.387	0,00	Sangat Rendah	21,28	Sangat Rendah
2.15	Perhubungan	20.239.494.193	5.006.096.585	12,50	Sangat Rendah	24,73	Sangat Rendah
2.16	Komunikasi dan Informatika	6.471.017.981	1.720.016.499	0,00	Sangat Rendah	26,58	Sangat Rendah
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.243.849.572	2.240.268.337	0,00	Sangat Rendah	19,92	Sangat Rendah
2.18	Penanaman Modal	6.403.425.915	1.776.766.447	20,00	Sangat Rendah	27,75	Sangat Rendah
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	9.822.902.282	3.666.172.652	0,00	Sangat Rendah	37,32	Sangat Rendah
2.20	Statistik	29.658.000	-	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.21	Persandian	125.041.450	10.573.750	0,00	Sangat Rendah	8,46	Sangat Rendah
2.22	Kebudayaan	335.191.200	71.399.200	0,00	Sangat Rendah	21,30	Sangat Rendah
2.23	Perpustakaan	10.072.536.084	1.592.807.057	3,50	Sangat Rendah	15,81	Sangat Rendah
2.24	Kearsipan	28.500.000	16.405.000	0,00	Sangat Rendah	57,56	Rendah
3	URUSAN PILIHAN	10.119.079.730	1.109.399.700	20,45	Sangat Rendah	10,96	Sangat Rendah
3.25	Kelautan dan Perikanan	534.011.150	68.493.150	60,00	Rendah	12,83	Sangat Rendah
3.26	Pariwisata	4.284.274.500	104.318.250	0,00	Sangat Rendah	2,43	Sangat Rendah
3.27	Pertanian	1.810.848.430	336.881.200	62,68	Rendah	18,60	Sangat Rendah
3.28	Kehutanan						
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral						
3.30	Perdagangan	1.645.791.650	143.986.600	0,00	Sangat Rendah	8,75	Sangat Rendah
3.31	Perindustrian	1.757.154.000	452.870.500	0,00	Sangat Rendah	25,77	Sangat Rendah
3.32	Transmigrasi	87.000.000	2.850.000	0,00	Sangat Rendah	3,28	Sangat Rendah
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	104.273.222.293	28.485.806.140	24,25	Sangat Rendah	27,32	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat Daerah	48.834.885.200	11.889.497.537	20,00	Sangat Rendah	24,35	Sangat Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	55.438.337.093	16.596.308.603	28,50	Sangat Rendah	29,94	Sangat Rendah
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	79.688.601.029	17.339.340.812	5,00	Sangat Rendah	21,76	Sangat Rendah
5.01	Perencanaan	16.298.993.873	3.991.783.291	0,00	Sangat Rendah	24,49	Sangat Rendah
5.02	Keuangan	54.924.300.466	11.609.061.547	25,00	Sangat Rendah	21,14	Sangat Rendah
5.03	Kepegawaian	6.420.188.606	1.581.303.474	0,00	Sangat Rendah	24,63	Sangat Rendah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1.075.321.084	80.540.850	0,00	Sangat Rendah	7,49	Sangat Rendah
5.05	Penelitian dan Pengembangan	969.797.000	76.651.650	0,00	Sangat Rendah	7,90	Sangat Rendah
5.06	Penghubung						
5.07	Pengelolaan Perbatasan Daerah						

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.727.954.934	2.155.566.197	46,22	Sangat Rendah	22,16	Sangat Rendah
6.01	Inspektorat	9.727.954.934	2.155.566.197	46,22	Sangat Rendah	22,16	Sangat Rendah
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	78.744.956.204	16.878.102.445	38,28	Sangat Rendah	21,43	Sangat Rendah
7.01	Kecamatan	78.744.956.204	16.878.102.445	38,28	Sangat Rendah	21,43	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.515.238.307	2.063.839.525	42,80	Sangat Rendah	6,35	Sangat Rendah
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	32.515.238.307	2.063.839.525	42,80	Sangat Rendah	6,35	Sangat Rendah
	TOTAL	1.301.762.840.635	269.395.809.341	28,73	Sangat Rendah	20,69	Sangat Rendah

Dari table diatas dapat dilihat capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 masih sangat rendah untuk semua urusan, hal tersebut disebabkan masih dalam proses pengadaan.

3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan Per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DISDIK								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	173.667.404.643	35.006.702.858	20.16	100	%	0	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (%)	84.898.252.700	13.241.293.166	15.6	100	Persen	80	80
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	59.889.800	0	0	0,2	Indeks	0	0
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui (%)	10.000.000	0	0	100	Persen	0	0
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	30.000.000	0	0	75.00	%	0	0
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan (Objek)	97.889.200	71.399.200	72,94	13.00	Jumlah	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	120.677.000	0	0	55.00	%	0	0
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengamatan Sejarah Lokal (%)	16.000.000	0	0	60.00	%	0	0
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	35.000.000	0	0	76.00	%	0	0
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum Kota Sukabumi yang Representatif (%)	65.625.000	0	0	55.00	%	0	0
			259.000.738.343	48.319.395.224	18.66				8
	DINKES								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase menyediakan peningkatan pelayanan BLUD	419.125.553.252	100.963.760.823	24.09	100	%	100	100
		Persentase untuk menunjang urusan pemerintah daerah				100	%	37	37

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan JKN	69.721.229.996	5.068.251.889	7.27	98,5	%	100	100
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial				100	%	100	100
		Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan				92.00	angka	29,35	31.52
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna				15.88	%	100	100
		Prevalensi stunting pada balita				6.00	%	90,35	100
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	2.562.181.906	0	0	100	%	33	33
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase persiapan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	524.031.000	0	0	100	%	0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan msyarakat kesehatan	2.681.508.132	61.491.000	2.29	100	%	33	33

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah / Rata2		494.614.504.286	106.093.503.712	21.45				63.45
	DPUTR								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	15.505.109.405	4.341.272.307	28	100	%	27,41	27
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA UDARA (SDA)	Rasio luas kawasan rawan banjir dan longsor yang dilindungi infrastruktur penggerak banjir WS kekuasaan kota	8.460.427.000	1.033.738.000	12.22	57.37	%	99,95	100
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Minum yang Layak dan Aman	3.577.766.310	194.421.480	5.43	100	%	100	100
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	4.028.889.000	195.181.230	4.84	57,95	%	99,99	100
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	4.043.700.000	162.458.300	4.02	42.46	%	99,22	100
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	4.141.034.200	444.500.361	10.73	9.38	%	99,95	100
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase RTHKP dalam Kondisi baik	3.079.772.000	1.232.409.000	40.02	78,95	%	100	100

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	14.257.809.015	1.172.760.941	8.23	85.15	%	99,28	100
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Sektor Jasa Konstruksi yang mengikuti Pelatihan	97.500.000	0	0	38.01	%	76,93	100
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	693.999.080	12.775.800	1.84	70.00	Persen	0	0
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana	476.000.000	122.997.500	25.84	100	%	0	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman Kumuh Yang Mendapatkan Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	4.308.000.000	69.545.000	1.61	10.00	Ha	0	0
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	1.050.000.000	20.340.000	1.94	1.36	%	100	100
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan oleh Pemerintah Daerah	351.360.000	0	0	11.38	%	85,73	100
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	30.000.000	811.000	2.7	70.00	%	0	0
Jumlah / Rata2			64.101.366.010	9.003.210.919	14.05				68.47
DISPOL PP									

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	10.494.483.912	2.869.305.606	27.34	100	%	39	39
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	3.087.424.500	470.740.000	15.25	100	%	100	100
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Waktu tanggap (waktu tanggap)	175.999.250	50.720.000	28.82	100	%	100	100
Jumlah / Rata2			13.757.907.662	3.390.765.606	24.65				79.67
BPBD									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	3.610.312.309	1.050.355.241	29.09	100	%	25	25
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase menyediakan standar pelayanan minimal sub bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	3.319.950.700	128.055.000	3.86	0,55	Titik	0	0
Jumlah / Rata2			6.930.263.009	1.178.410.241	17				12.5
DINSOS									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	5.516.863.531	1.330.845.774	24.12	100	%	30,3	30

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan pihak-pihak yang berpartisipasi serta dalam pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	1.116.090.000	228.125.000	20.44	25.00	%	40	100
		PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)				45.00	%	95,86	100
		Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)				55.00	%	56,25	100
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	1.500.000	0	0	100	%	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	387.876.000	36.840.000	9.5	100	%	11,53	11
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang berkualitas	599.458.850	75.390.000	12.58	100	%	0,02	0
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase menyediakan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	338.070.420	55.300.000	16.36	100	%	25,15	25
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	25.915.000	0	0	100	%	0	0
Jumlah / Rata2			7.396.556.001	1.593.201.437	21.54				40.67
DINASKER									
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hadir menyediakan kebutuhan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3.702.300.139	945.937.333	25.55	100	%	0	0
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	20.000.000	0	0	20.00	%	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	440.000.000	430.000	0,1	1	%	0	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	30.000.000	2.023.000	6.74	16.00	%	0	0
2.07.05	PROGRAM INDUSTRI HUBUNGAN	Persentase pelatihan hubungan industri dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	75.149.800	30.301.900	40.32	24.00	%	0	0
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi	87.000.000	2.850.000	3.28	3.00	%	0	0
Jumlah / Rata2			4.354.449.939	981.542.233	22.54				0
DKP3									
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	11.093.127.064	2.736.762.185	24.67	100	%	40	40
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	5.680.000	0	0	25.00	%	100	100

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	3.157.278.700	58.985.000	1.87	22.00	%	100	100
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Kerawanan Pangan	113.650.000	1.950.000	1.72	90.00	%	26,14	28.89
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	6.749.400	1.170.000	17.33	89.00	%	0	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas Budidaya Perikanan	474.991.150	66.743.150	14.05	25.87	Angka	100	100
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Ketersediaan Ikan	59.020.000	1.750.000	2.97	110.00	%	22,73	20
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	708.724.500	182.687.500	25.78	19316.00	Ton	27	0,14
		Produksi Daging				5902.70	Ton	25,99	0,42
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Peserta Sekolah Agro di KAC	561.956.000	80.370.320	14.3	10.00	%	100	100
		Persentase Prasarana UPTD Agribisnis yang Digunakan				100	%	100	100
		Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B				48.90	Ha	96,11	100

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	195.852.380	32.453.380	16.57	100	%	100	100
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pertanian yang mengikuti AUTP	8.629.500	7.380.000	85.52	30.00	%	100	100
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Lembaga Usaha Tani dengan Kategori Kelas Utama	335.686.050	33.990.000	10.13	6.75	%	54,2	100
		Persentase Lembaga Usaha Tani yang Berbadan Hukum				8.00	Kelompok	0	0
		Persentase Lembaga Usaha Tani yang Berbadan Hukum				8.00	Kelompok	87,5	100
		Persentase Lembaga Usaha Tani yang Berbadan Hukum				8.00	Kelompok	0	0
Jumlah / Rata2			16.721.344.744	3.204.241.535	19.16				60.53
	DLH								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	26.634.601.681	6.827.196.502	25.63	100	%	49	49
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen ketersediaan perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	314.195.550	0	0	100	%	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kenyamanan	1.637.489.400	69.208.036	4.23	0	Predikat	0	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks RTH	237.703.450	11.035.000	4.64	25.50	M2/Orang	0	0
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3	23.980.000	21.025.000	87.68	100	%	20	20
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaksanaan pelatihan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	41.263.100	8.400.000	20.36	100	%	17,5	17
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	43.500.000	1.593.000	3.66	33.00	%	0	0
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah yang diberikan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	21.731.100	8.100.000	37.27	25.00	%	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	54.483.650	5.316.900	9.76	100	%	55,56	55
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengelolaan sampah	9.409.538.686	266.855.050	2.84	99.00	%	25,25	25.25
Jumlah / Rata2			38.418.486.617	7.218.729.488	18.79				16.63
CASIP									
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.042.673.973	1.983.300.611	32.82	100	Persen	100	100
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan KK, KTP-el	300.665.600	113.120.000	37.62	100	Persen	100	100
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	72.265.500	40.975.000	56.7	100	Persen	100	100
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	126.722.000	21.259.000	16.78	100	Persen	100	100
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan	8.850.000	650.000	7.34	100	Persen	100	100
Jumlah / Rata2			6.551.177.073	2.159.304.611	32.96				100
DALDUK									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Kota Sukabumi	94.350.000	4.900.000	5.19	79.00	%	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	183.917.050	25.982.000	14.13	0,01	%	0	0
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	451.097.510	85.676.102	18.99	72.50	%	100	100
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	24.999.900	18.599.900	74.4	2.00	Dokumen	50	100
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	74.089.750	6.528.150	8.81	2.00	Tingkatan	100	100
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	389.179.200	56.257.000	14.46	0,03	%	0	0
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	laporan kinerja dan keuangan	5.869.696.434	2.029.535.237	34.58	100	%	35	35
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	267.539.400	69.044.400	25.81	12.50	%	100	100
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	3.045.514.613	288.161.000	9.46	65.00	%	100	100
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	2.106.853.500	15.883.750	0,75	62.00	%	100	100
Jumlah / Rata2			12.507.237.357	2.600.567.539	20.79				57.73
	DISKOMINFO								

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	5.616.104.731	1.431.853.749	25.5	80.00	Persen	37,11	46.25
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks KIP	481.674.250	247.434.750	51.37	90.00	Persen	0	0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	373.239.000	40.728.000	10.91	93.00	%	0	0
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	29.658.000	0	0	60.00	Persen	0	0
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	125.041.450	10.573.750	8.46	77.00	Persen	0	0
Jumlah / Rata2			6.625.717.431	1.730.590.249	26.12				9.25
DISHUB									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.312.680.966	4.457.243.602	27.32	100	%	28	28
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.926.813.227	548.852.983	13.98	100	%	22	22
		-Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	0
Jumlah / Rata2			20.239.494.193	5.006.096.585	24.73				12.5
	DISKUMINDAG								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	8.432.767.872	2.123.117.648	25.18	100	%	0	0
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	19.000.000	17.600.000	92.63	11.33	%	0	0
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	35.010.000	12.180.000	34.79	6.80	%	0	0
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	20.000.000	0	0	64.00	%	0	0
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihann	203.704.250	0	0	19.83	%	0	0
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	81.400.000	0	0	19.83	%	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas	2.066.717.450	83.280.689	4.03	0,01	%	0	0
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	350.000.000	0	0	0,47	%	0	0
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang di Fasilitas	35.250.000	4.090.000	11.6	100	%	0	0
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	1.315.501.150	106.548.250	8.1	60.00	%	0	0
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilisasi persentase dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	80.050.500	4.745.000	5.93	5.88	%	0	0
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	47.790.000	0	0	0	DOLLAR AMERIKA\$	0	0
3.30.06	STANDARDISASI PROGRAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	130.980.000	32.693.350	24.96	28.57	%	0	0
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	75.470.000	0	0	100	%	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	1.084.516.000	69.193.000	6.38	3.55	%	0	0
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	56.392.000	2.384.000	4.23	100	%	0	0
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	616.246.000	381.293.500	61.87	100	%	0	0
Jumlah / Rata2			14.650.795.222	2.837.125.437	19.36				0
DPMPTSP									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	5.094.632.865	1.614.127.106	31.68	90.00	%	0	0
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	64.999.950	32.565.900	50.1	10.00	%	100	100
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	463.488.150	73.101.000	15.77	80.00	%	0	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kota Sukabumi	628.116.450	0	0	10.00	%	0	0
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal oleh penerima data	109.688.500	33.759.441	30.78	100	%	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah / Rata2		6.403.425.915	1.776.766.447	27.75				20
	DISPORA								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	6.356.500.582	1.570.759.647	24.71	100	Persen	0	0
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	906.225.000	441.474.500	48.72	80.00	Persen	0	0
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Raihan Medali Pada Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2.560.176.700	1.653.938.505	64.6	18.00	M2/Orang	0	0
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah pengunjung ke destinasi wisata	3.788.779.000	66.730.250	1.76	20.00	Persen	0	0
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	161.835.500	23.785.500	14.7	4.00	Kegiatan	0	0
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Nilai tambah ekonomi kreatif	66.947.500	1.572.500	2.35	16.00	Persen	0	0
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	266.712.500	12.230.000	4.59	150	Orang	0	0
	Jumlah / Rata2		14.107.176.782	3.770.490.902	26.73				0
	DISPUSIP								

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase menyediakan kebutuhan untuk menunjang usurusan pemerintah daerah	5.137.282.234	1.456.545.207	28.35	100	Persen	0	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	4.808.712.700	109.006.650	2.27	72.00	Angka	0	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	126.541.150	27.255.200	21.54	63.50	%	14,76	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa untuk kepentingan negara dan pemerintah	28.500.000	16.405.000	57.56	66.80	%	0	
Jumlah / Rata2			10.101.036.084	1.609.212.057	15.93				5.51
INSPEKTORAT									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	8.386.996.934	2.036.868.297	24.29	90.00	%	28,4	31.11
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	648.320.000	99.047.900	15.28	78.00	%	100	100
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti				80.00	%	100	100

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	692.638.000	19.650.000	2.84	3.21	Angka	0	0
		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				3.05	Angka	0	0
Jumlah / Rata2			9.727.954.934	2.155.566.197	22.16				46.22
	BAPPEDA								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	9.762.653.123	2.514.234.440	25.75	100	%	0	0
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen ketersediaan perencanaan sesuai standar	2.276.582.850	996.053.158	43.75	100	%	0	0
		Persentase pencapaian IKU				100	Persen	0	0
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	4.259.757.900	481.495.693	11.3	100	persen	0	0
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	969.797.000	76.651.650	7.9	100	%	0	0
Jumlah / Rata2			17.268.790.873	4.068.434.941	23.56				0
	BPKPD								

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	38.145.118.407	7.523.599.182	19.72	100	Persen	100	100
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	12.899.365.379	3.168.967.843	24.57	90.00	Persen	0	0
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	1.440.257.350	250.477.560	17.39	90.00	Persen	0	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pajak Daerah	3.845.035.080	1.099.478.853	28.59	100	Persen	0	0
Jumlah / Rata2			54.924.300.466	11.609.061.547	21.14				25
BKPSDM									
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase memuat dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	5.949.643.111	1.540.580.824	25.89	100	%	0	0
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pelayanan ASN	470.545.495	40.722.650	8.65	90.00	Persen	0	0
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Meningkatnya Kompetensi ASN	1.075.321.084	80.540.850	7.49	90.00	Persen	0	0
Jumlah / Rata2			7.495.509.690	1.661.844.324	22.17				0
SETDA									

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Menyajikan dokumen Perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	35.528.563.981	10.380.747.725	29.22	100	%	25	25
		-Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan pemerintah daerah				100	%	25	25
		Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Menuhi Aspek Penilaian				80.00	%	0	0
		Indeks pelayanan Publik				3.40	Titik	0	0
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	12.764.343.219	1.342.863.268	10.52	100	%	25	25
		Persentase memberikan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				100	%	25	25
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah				100	%	25	25
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	541.978.000	165.886.544	30.61	100	%	25	25

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah				100	%	25	25
		Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara online				100	%	25	25
Jumlah / Rata2			48.834.885.200	11.889.497.537	24.35				20
	SETWAN								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	36.179.897.643	10.653.807.877	29.45	100	%	30	30
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	19.258.439.450	5.942.500.726	30.86	100	%	27	27
Jumlah / Rata2			55.438.337.093	16.596.308.603	29.94				28.5
	KESBANG								
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	810.136.948	69.974.500	8.64	100	Persen	54	54
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELLUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	864.579.239	90.819.258	10.5	100	Persen	50	50

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	669.637.250	421.600.000	62,96	100	Persen	58	58
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	378.959.500	58.342.500	15.4	100	Persen	28	28
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	25.904.300.300	299.245.000	1.16	100	Persen	24	24
Jumlah / Rata2			32.515.238.307	2.063.839.525	6.35				42.8
CIKOLE									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	9.349.501.410	2.355.872.217	25.2	100	Persen	15	15
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1.845.192.200	13.205.740	0,72	100	Persen	25	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	2.784.060.600	480.030.000	17.24	100	Persen	35	35

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	71.024.700	24.928.600	35.1	100	Persen	100	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan memantau Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	15.349.550	3.259.600	21.24	100	Persen	100	100
Jumlah / Rata2			14.063.628.460	2.877.296.157	20.46				55
GUNUNG PUYUH									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	6.989.923.487	1.895.303.457	27.11	94.00	Persen	28,29	29.79
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1.417.679.900	10.175.600	0.72	100.00	Persen	1	1
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1.841.671.350	322.767.200	17.53	100.00	Persen	18	18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	66.314.950	24.246.400	36.56	100.00	Persen	37	37
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	47.500.000	0	0	100.00	Persen	0	0
Jumlah / Rata2			10.428.098.637	2.276.739.057	21.83				17.16
CITAMIANG									

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	8.159.351.981	2.137.548.518	26.2	100.00	%	39	39
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1.234.594.500	74.149.750	6.01	97.00	%	26,57	26.8
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	2.066.046.050	364.192.100	17.63	100.00	%	36	36
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	46.258.350	11.070.000	23.93	100.00	%	25	25
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	47.499.950	0	0	100.00	%	0	0
Total / Rata2			11.553.750.831	2.586.960.368	22.39				25,36
WARUDOYONG									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	8.368.138.049	2.308.973.304	27.59	100.00	persen	39	39
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1.581.550.400	45.271.200	2.86	88.00	persen	45,2	51.14

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	2.284.278.980	368.642.600	16.14	100.00	persen	43	43
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	45.873.150	15.508.950	33.81	100.00	persen	38	38
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	49.774.000	14.890.000	29.92	1.00	%	100	100
Total / Rata2			12.329.614.579	2.753.286.054	22.33				54,23
	BAROS								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	6.302.973.891	1.567.569.627	24.87	100.00	Persen	17	17
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1.148.412.850	45.567.050	3.97	100.00	Persen	51	51
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1.547.548.750	291.963.300	18.87	100.00	Persen	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	66.532.950	15.082.950	22.67	100.00	Persen	0	0

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	19.616.400	4.585.300	23.37	100.00	Persen	16	16
Total / Rata2			9.085.084.841	1.924.768.227	21.19				16,8
LEMBURSITU									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	7.617.278.019	2.029.373.810	26.64	100.00	%	25	25
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1.459.018.500	7.711.200	0.53	100.00	%	25	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1.941.108.323	311.766.100	16.06	100.00	%	33,33	33
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	46.121.600	7.927.200	17.19	100.00	%	25	25
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	13.370.000	1.350.000	10.1	100.00	%	25	25
Total / Rata2			11.076.896.442	2.358.128.310	21.29				26,6
CIBEUREUM									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	7.251.042.664	1.817.425.622	25.06	100.00	persen	47	47

Kode	Program	Indikator	Anggaran			Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	%			TW I	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1.216.914.275	48.357.475	3.97	80.00	persen	100	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1.667.417.200	211.599.200	12.69	31.00	persen	100	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	42.286.400	21.647.600	51.19	75.00	persen	100	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	30.221.875	1.894.375	6.27	100.00	persen	17	17
Total / Rata2			10.207.882.414	2.100.924.272	20.58				72,8

3.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Dengan mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan rencana pembangunan daerah karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan nasional dan provinsi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diidentifikasi isu strategis daerah yang kemudian menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa
2. Peningkatan Kondusifitas Kota
3. Peningkatan Kondusifitas Kota Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan tersebut maka disusunlah arah kebijakan sebagai landasan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Sukabumi, dari arah kebijakan dapat dilihat bahwa program kegiatan yang dilaksanakan Kota Sukabumi sangat mendukung dan mengacu kepada arah kebijakan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Program pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Selain program pembangunan Daerah, terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi antara daerah, provinsi dan nasional dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan.

BAB IV

PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 PENDORONG

Pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2023 dilaporkan dalam bentuk formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Bab III. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi kegiatan pada Triwulan IV, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian setiap sub kegiatan, kegiatan dan rata-ratanya per program dan per Perangkat Daerah. Capaian Indikator Makro, Capaian Sasaran (IKU), Capaian kinerja dan anggaran program setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, namun secara umum dapat disimpulkan berada pada kategori yang **sangat tinggi**.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2023, Perangkat Daerah mengalami berbagai kendala baik eksternal, internal, maupun hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun Faktor Pendorong Dalam Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Internal dari Pemerintah Daerah;
2. Kelancaran dan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan;
3. Waktu yang cukup untuk berjalannya kegiatan;
4. Keseimbangan antara waktu dengan jadwal yang sudah dirancang;
5. Proses administrasi secara tepat sasaran;
6. Struktur organisasi dan kelembagaan sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas.
7. Sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sudah tersedia di setiap Perangkat Daerah;
8. Peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan/tugas;
9. Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah;

4.2. PENGHAMBATAN

Adapun Faktor Penghambat Dalam Pendapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan berkurangnya pagu pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat yang mengakibatkan *Refocussing* beberapa anggaran kegiatan mengakibatkan beberapa kegiatan harus berubah indikatornya dan tidak sesuai dengan target perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan;
2. Penetapan indikator kegiatan dan program yang tidak tepat mengakibatkan sulit tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan;
3. Faktor lingkungan yang tidak mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
4. Tidak sinkronnya antara rencana yang sudah dirancang dengan jumlah anggaran yang sudah tertera dalam DPA;
5. Faktor Sumber Daya Manusia yang tidak cakap atau belum mampu dalam melaksanakan kegiatan;
6. Pengadaan barang melalui e catalog dan lelang masih dalam proses sehingga kegiatan tertunda;
7. Terlambatnya proses lelang karena kendala integrasi sistem SIPD dengan SIRUP;
8. Adanya kesalahan dalam mengevaluasi hasil kegiatan dan program sehingga tujuan utama pembangunan daerah tidak dapat tercapai. Dalam hal ini, secara umum proses evaluasi hanya dapat mendeteksi realisasi anggaran program dan kegiatan, dan belum mampu mengidentifikasi realisasi kinerja.
9. Belum adanya aplikasi/sitem E-Monev yang dapat secara otomatis melakukan interpretasi penilaian realisasi kinerja berdasarkan kriteria penilaian Permendagri nomor 86 Tahun 2017. Hal ini mengakibatkan proses interpretasi harus dilakukan secara manual terhadap seluruh kegiatan sehingga tidak efisien. Idealnya sistem E-Monev dapat secara otomatis menghasilkan penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan, sehingga output evaluasi dapat dengan cepat dihasilkan dan

4.3. TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN RKPD BERIKUTNYA

Untuk merespon faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja program yang dihadapi oleh Perangkat Daerah, Bappeda merumuskan dan memberikan usulan tindak lanjut yaitu berupa hal-hal yang perlu dilakukan untuk membantu meningkatkan atau mencapai kinerja program pada tahun berikutnya. Saran tindak lanjut ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan. Adapun saran tindak lanjut tersebut disajikan per Perangkat Daerah sesuai dengan faktor pendorong dan faktor penghambat. Tindak Lanjut yang dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi mengenai penambahan dana transfer/Dana Bantuan Keuangan;
2. Sosialisasi mengenai penetapan indikator kegiatan agar tidak ada kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan;
3. Tingkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait/ stakeholders untuk ketepatan waktu dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan 2023;
4. Tingkatkan koordinasi dengan TAPD dalam penetapan besarnya pagu anggaran;
5. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran;
6. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Membangun Sistem SIPEKA (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja) untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan oleh Bappeda.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

RKPD Kota Sukabumi Triwulan IV Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan prioritas pada RKPD tahun 2023 disusun mengikuti prinsip *money follow output priority programs* dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD tahun 2023 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dalam pelaksanaan RKPD perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang kemudian akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya dan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota setiap triwulan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah (Wali Kota) dan Bappeda Provinsi.

Secara umum capaian kinerja pemerintah Kota Sukabumi belum dapat ditentukan hasilnya baik atau buruk karena masih tahun anggaran baru berjalan 3 bulan, namun diharapkan di triwulan berikutnya mulai terlihat hasil kinerja yang lebih baik sebagai *triger* untuk mendapatkan prestasi daerah yang lebih baik. Sebagai contoh Kota Sukabumi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan peringkat BB dalam penilaian Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) tingkat kabupaten/kota, diharapkan di tahun ini dan yang akan datang dapat lebih meningkat atau minimal mempertahankan nilainya sebagai bukti pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik. Salah satu indikator yang harus dicapai adalah realisasi anggaran dan kinerja di masing-masing perangkat daerah dapat kembali didominasi oleh kriteria sangat tinggi dan tidak ada satupun perangkat daerah yang termasuk dalam kriteria sedang atau dibawahnya.

Namun selain keberhasilan yang diperoleh secara umum juga ada beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian realisasi sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi Bappeda sebagai induk perencana tingkat daerah. Perlu adanya pendampingan yang melekat melalui kegiatan monitoring dan

evaluasi terhadap perangkat daerah atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatannya.

5.2 Rekomendasi

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan agar perencanaan pembangunan yang akan datang menjadi lebih baik, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam perspektif kedepan, perlu diperbaiki indikator kegiatan dan program agar sistem evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif, dan hasil evaluasi benar-benar dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan pengendalian yang sesuai dengan kondisi eksisting;
2. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, sehingga Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja PD untuk menyusun evaluasi triwulanan RKPD. Dalam perspektif kedepan perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renjanya masing-masing dengan data yang akurat, tepat waktu dan berkualitas;
3. Perlu dibangunnya aplikasi/sistem Evaluasi dan Monitoring yang dapat secara otomatis menghasilkan penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan, sehingga output evaluasi dapat dengan cepat dihasilkan dan segera dapat ditindaklanjuti. Karena pada hakikatnya sistem Evaluasi dan Monitoring bukan sistem yang ditujukan untuk mengumpulkan angka dan data-data realisasi, melainkan sistem Evaluasi dan Monitoring harus mampu melakukan penilaian secara otomatis sehingga dapat memberikan informasi capaian kinerja yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	15,505,109,405	4,341,272,307	28	100	%	27.41	27
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA UDARA (SDA)	Rasio luas kawasan rawan banjir dan longsor yang dilindungi infrastruktur penggerak banjir WS kekuasaan kota	8,460,427,000	1,033,738,000	12.22	57.37	%	99.95	100
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Minum yang Layak dan Aman	3,577,766,310	194,421,480	5.43	100	%	100	100
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	4,028,889,000	195,181,230	4.84	57.95	%	99.99	100
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	4,043,700,000	162,458,300	4.02	42.46	%	99.22	100
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	4,141,034,200	444,500,361	10.73	9.38	%	99.95	100
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase RTHKP dalam Kondisi baik	3,079,772,000	1,232,409,000	40.02	78.95	%	100	100
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	14,257,809,015	1,172,760,941	8.23	85.15	%	99.28	100
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Sektor Jasa Konstruksi yang mengikuti Pelatihan	97,500,000	0	0	38.01	%	76.93	100
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	693,999,080	12,775,800	1.84	70.00	Persen	0	0
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana	476,000,000	122,997,500	25.84	100	%	0	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman Kumuh Yang Mendapatkan Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	4,308,000,000	69,545,000	1.61	10.00	Ha	0	0
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	1,050,000,000	20,340,000	1.94	1.36	%	100	100
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan oleh Pemerintah Daerah	351,360,000	0	0	11.38	%	85.73	100
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	30,000,000	811,000	2.7	70.00	%	0	0
Jumlah / Rata2			64,101,366,010	9,003,210,919	14.05				68.47
DISPOL PP									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	10,494,483,912	2,869,305,606	27.34	100	%	39	39
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Kamramtibmas yang dapat diselesaikan	3,087,424,500	470,740,000	15.25	100	%	100	100
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Waktu tanggap (waktu tanggap)	175,999,250	50,720,000	28.82	100	%	100	100
Jumlah / Rata2			13,757,907,662	3,390,765,606	24.65				79.67
BPBD									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	3,610,312,309	1,050,355,241	29.09	100	%	25	25
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase menyediakan standar pelayanan minimal sub bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	3,319,950,700	128,055,000	3.86	0.55	Titik	0	0
Jumlah / Rata2			6,930,263,009	1,178,410,241	17				12.5
DINSOS									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	5,516,863,531	1,330,845,774	24.12	100	%	30.3	30
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan pihak-pihak yang berpartisipasi serta dalam pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	1,116,090,000	228,125,000	20.44	25.00	%	40	100

		PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)				45.00	%	95.86	100
		Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)				55.00	%	56.25	100
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	1,500,000	0	0	100	%	0	0
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	387,876,000	36,840,000	9.5	100	%	11.53	11
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang berkualitas	599,458,850	75,390,000	12.58	100	%	0.02	0
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase menyediakan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	338,070,420	55,300,000	16.36	100	%	25.15	25
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	25,915,000	0	0	100	%	0	0
Jumlah / Rata2			7,396,556,001	1,593,201,437	21.54				40.67
DINASKER									
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hadir menyediakan kebutuhan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3,702,300,139	945,937,333	25.55	100	%	0	0
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	20,000,000	0	0	20.00	%	0	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	440,000,000	430,000	0.1	1	%	0	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja	30,000,000	2,023,000	6.74	16.00	%	0	0
2.07.05	PROGRAM INDUSTRI HUBUNGAN	Persentase pelatihan hubungan industri dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	75,149,800	30,301,900	40.32	24.00	%	0	0
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi	87,000,000	2,850,000	3.28	3.00	%	0	0
Jumlah / Rata2			4,354,449,939	981,542,233	22.54				0
DKP3									
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	11,093,127,064	2,736,762,185	24.67	100	%	40	40
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	5,680,000	0	0	25.00	%	100	100
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	3,157,278,700	58,985,000	1.87	22.00	%	100	100
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Kerawanan Pangan	113,650,000	1,950,000	1.72	90.00	%	26.14	28.89
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	6,749,400	1,170,000	17.33	89.00	%	0	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas Budidaya Perikanan	474,991,150	66,743,150	14.05	25.87	Angka	100	100
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Ketersediaan Ikan	59,020,000	1,750,000	2.97	110.00	%	22.73	20

2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Kota Sukabumi	94,350,000	4,900,000	5.19	79.00	%	0	0
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	183,917,050	25,982,000	14.13	0.01	%	0	0
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	451,097,510	85,676,102	18.99	72.50	%	100	100
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	24,999,900	18,599,900	74.4	2.00	Dokumen	50	100
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	74,089,750	6,528,150	8.81	2.00	Tingkatan	100	100
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	389,179,200	56,257,000	14.46	0.03	%	0	0
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	laporan kinerja dan keuangan	5,869,696,434	2,029,535,237	34.58	100	%	35	35
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung	267,539,400	69,044,400	25.81	12.50	%	100	100
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	3,045,514,613	288,161,000	9.46	65.00	%	100	100
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	2,106,853,500	15,883,750	0.75	62.00	%	100	100
Jumlah / Rata2			12,507,237,357	2,600,567,539	20.79				57.73
DISKOMINFO									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	5,616,104,731	1,431,853,749	25.5	80.00	Persen	37.11	46.25
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks KIP	481,674,250	247,434,750	51.37	90.00	Persen	0	0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	373,239,000	40,728,000	10.91	93.00	%	0	0
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	29,658,000	0	0	60.00	Persen	0	0
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	125,041,450	10,573,750	8.46	77.00	Persen	0	0
Jumlah / Rata2			6,625,717,431	1,730,590,249	26.12				9.25
DISHUB									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,312,680,966	4,457,243,602	27.32	100	%	28	28
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	0
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (L.L.A.J)	-Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,926,813,227	548,852,983	13.98	100	%	22	22
		-Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0	0
Jumlah / Rata2			20,239,494,193	5,006,096,585	24.73				12.5
DISKUMINDAG									
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	8,432,767,872	2,123,117,648	25.18	100	%	0	0
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	19,000,000	17,600,000	92.63	11.33	%	0	0
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	35,010,000	12,180,000	34.79	6.80	%	0	0
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	20,000,000	0	0	64.00	%	0	0
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihann	203,704,250	0	0	19.83	%	0	0
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	81,400,000	0	0	19.83	%	0	0

2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas	2,066,717,450	83,280,689	4.03	0.01	%	0	0
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasaha	350,000,000	0	0	0.47	%	0	0
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang di Fasilitasi	35,250,000	4,090,000	11.6	100	%	0	0
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	1,315,501,150	106,548,250	8.1	60.00	%	0	0
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilisasi persentase dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	80,050,500	4,745,000	5.93	5.88	%	0	0
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	47,790,000	0	0	0	DOLLAR AMERIKA \$	0	0
3.30.06	STANDARDISASI PROGRAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	130,980,000	32,693,350	24.96	28.57	%	0	0
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	75,470,000	0	0	100	%	0	0
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	1,084,516,000	69,193,000	6.38	3.55	%	0	0
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	56,392,000	2,384,000	4.23	100	%	0	0
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	616,246,000	381,293,500	61.87	100	%	0	0
Jumlah / Rata2			14,650,795,222	2,837,125,437	19.36				0
DPMPPTSP									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	5,094,632,865	1,614,127,106	31.68	90.00	%	0	0
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	64,999,950	32,565,900	50.1	10.00	%	100	100
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	463,488,150	73,101,000	15.77	80.00	%	0	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kota Sukabumi	628,116,450	0	0	10.00	%	0	0
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal oleh penerima data	109,688,500	33,759,441	30.78	100	%	0	0
Jumlah / Rata2			6,403,425,915	1,776,766,447	27.75				20
DISPORA									
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,356,500,582	1,570,759,647	24.71	100	Persen	0	0
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	906,225,000	441,474,500	48.72	80.00	Persen	0	0
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Raihan Medali Pada Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2,560,176,700	1,653,938,505	64.6	18.00	M2/Orang	0	0
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah pengunjung ke destinasi wisata	3,788,779,000	66,730,250	1.76	20.00	Persen	0	0
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	161,835,500	23,785,500	14.7	4.00	Kegiatan	0	0
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Nilai tambah ekonomi kreatif	66,947,500	1,572,500	2.35	16.00	Persen	0	0
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	266,712,500	12,230,000	4.59	150	Orang	0	0
Jumlah / Rata2			14,107,176,782	3,770,490,902	26.73				0
DISPUSIP									
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase menyediakan kebutuhan untuk menunjang usrusan pemerintah daerah	5,137,282,234	1,456,545,207	28.35	100	Persen	0	

2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	4,808,712,700	109,006,650	2.27	72.00	Angka	0	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	126,541,150	27,255,200	21.54	63.50	%	14.76	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa untuk kepentingan negara dan pemerintah	28,500,000	16,405,000	57.56	66.80	%	0	
Jumlah / Rata2			10,101,036,084	1,609,212,057	15.93				5.51
INSPEKTORAT									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	8,386,996,934	2,036,868,297	24.29	90.00	%	28.4	31.11
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	648,320,000	99,047,900	15.28	78.00	%	100	100
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti				80.00	%	100	100
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	692,638,000	19,650,000	2.84	3.21	Angka	0	0
		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				3.05	Angka	0	0
Jumlah / Rata2			9,727,954,934	2,155,566,197	22.16				46.22
BAPPEDA									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan ketersediaan kinerja dan keuangan tepat waktu	9,762,653,123	2,514,234,440	25.75	100	%	0	0
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen ketersediaan perencanaan sesuai standar	2,276,582,850	996,053,158	43.75	100	%	0	0
		Persentase pencapaian IKU				100	Persen	0	0
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	4,259,757,900	481,495,693	11.3	100	Persen	0	0
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	969,797,000	76,651,650	7.9	100	%	0	0
Jumlah / Rata2			17,268,790,873	4,068,434,941	23.56				0
BPKPD									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	38,145,118,407	7,523,599,182	19.72	100	Persen	100	100
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	12,899,365,379	3,168,967,843	24.57	90.00	Persen	0	0
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	1,440,257,350	250,477,560	17.39	90.00	Persen	0	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pajak Daerah	3,845,035,080	1,099,478,853	28.59	100	Persen	0	0
Jumlah / Rata2			54,924,300,466	11,609,061,547	21.14				25
BKPSDM									
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase memuat dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	5,949,643,111	1,540,580,824	25.89	100	%	0	0
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pelayanan ASN	470,545,495	40,722,650	8.65	90.00	Persen	0	0
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Meningkatnya Kompetensi ASN	1,075,321,084	80,540,850	7.49	90.00	Persen	0	0
Jumlah / Rata2			7,495,509,690	1,661,844,324	22.17				0
SETDA									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Menyajikan dokumen Perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	35,528,563,981	10,380,747,725	29.22	100	%	25	25
		-Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan pemerintah daerah				100	%	25	25

		Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Menuhi Aspek Penilaian				80.00	%	0	0
		Indeks pelayanan Publik				3.40	Titik	0	0
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	12,764,343,219	1,342,863,268	10.52	100	%	25	25
		Persentase memberikan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				100	%	25	25
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah				100	%	25	25
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	541,978,000	165,886,544	30.61	100	%	25	25
		Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah				100	%	25	25
		Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara online				100	%	25	25
	Jumlah / Rata2		48,834,885,200	11,889,497,537	24.35				20
	SETWAN								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	36,179,897,643	10,653,807,877	29.45	100	%	30	30
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase propempera yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	19,258,439,450	5,942,500,726	30.86	100	%	27	27
	Jumlah / Rata2		55,438,337,093	16,596,308,603	29.94				28.5
	KESBANG								
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	810,136,948	69,974,500	8.64	100	Persen	54	54
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELLUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	864,579,239	90,819,258	10.5	100	Persen	50	50
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	669,637,250	421,600,000	62.96	100	Persen	58	58
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	378,959,500	58,342,500	15.4	100	Persen	28	28
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	25,904,300,300	299,245,000	1.16	100	Persen	24	24
	Jumlah / Rata2		32,515,238,307	2,063,839,525	6.35				42.8
	CIKOLE								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	9,349,501,410	2,355,872,217	25.2	100	Persen	15	15
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1,845,192,200	13,205,740	0.72	100	Persen	25	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	2,784,060,600	480,030,000	17.24	100	Persen	35	35
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	71,024,700	24,928,600	35.1	100	Persen	100	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan memantau Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	15,349,550	3,259,600	21.24	100	Persen	100	100
	Jumlah / Rata2		14,063,628,460	2,877,296,157	20.46				55
	GUNUNG PUYUH								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	6,989,923,487	1,895,303,457	27.11	94.00	Persen	28.29	29.79

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1,417,679,900	10,175,600	0.72	100.00	Persen	1	1
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1,841,671,350	322,767,200	17.53	100.00	Persen	18	18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	66,314,950	24,246,400	36.56	100.00	Persen	37	37
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	47,500,000	0	0	100.00	Persen	0	0
Jumlah / Rata2			10,428,098,637	2,276,739,057	21.83				17.16
CITAMIANG									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	8,159,351,981	2,137,548,518	26.2	100.00	%	39	39
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1,234,594,500	74,149,750	6.01	97.00	%	26.57	26.8
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	2,066,046,050	364,192,100	17.63	100.00	%	36	36
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	46,258,350	11,070,000	23.93	100.00	%	25	25
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	47,499,950	0	0	100.00	%	0	0
Total / Rata2			11,553,750,831	2,586,960,368	22.39				25.36
WARUDUYONG									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	8,368,138,049	2,308,973,304	27.59	100.00	persen	39	39
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1,581,550,400	45,271,200	2.86	88.00	persen	45.2	51.14
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	2,284,278,980	368,642,600	16.14	100.00	persen	43	43
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	45,873,150	15,508,950	33.81	100.00	persen	38	38
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	49,774,000	14,890,000	29.92	1.00	%	100	100
Total / Rata2			12,329,614,579	2,753,286,054	22.33				54.23
BAROS									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	6,302,973,891	1,567,569,627	24.87	100.00	Persen	17	17
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1,148,412,850	45,567,050	3.97	100.00	Persen	51	51
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1,547,548,750	291,963,300	18.87	100.00	Persen	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	66,532,950	15,082,950	22.67	100.00	Persen	0	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	19,616,400	4,585,300	23.37	100.00	Persen	16	16
Total / Rata2			9,085,084,841	1,924,768,227	21.19				16.8
LEMBURSITU									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	7,617,278,019	2,029,373,810	26.64	100.00	%	25	25
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	1,459,018,500	7,711,200	0.53	100.00	%	25	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1,941,108,323	311,766,100	16.06	100.00	%	33.33	33
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	46,121,600	7,927,200	17.19	100.00	%	25	25

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	13,370,000	1,350,000	10.1	100.00	%	25	25
Total / Rata2			11,076,896,442	2,358,128,310	21.29				26.6
CIBEUREUM									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	7,251,042,664	1,817,425,622	25.06	100.00	persen	47	47
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/KM	1,216,914,275	48,357,475	3.97	80.00	persen	100	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1,667,417,200	211,599,200	12.69	31.00	persen	100	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	42,286,400	21,647,600	51.19	75.00	persen	100	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	30,221,875	1,894,375	6.27	100.00	persen	17	17
Total / Rata2			10,207,882,414	2,100,924,272	20.58				72.8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2024 Triwulan II telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi untuk kemudian dilaporkan kepada kepala daerah (Wali Kota) dan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Evaluasi RKPD merupakan rekapitulasi hasil pencapaian kinerja dan anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk dijadikan pedoman penyusunan perencanaan berikutnya.

Masukan dan saran membangun dalam rangka perbaikan dokumen ini sangat kami harapkan agar dokumen ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini baik secara langsung maupun tidak langsung, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Sukabumi, April 2024

Kepala Bappeda Kota Sukabumi

ASEP SUHENDRAWAN, S.Sos.,M.A.P.

NIP. 19660927 198803 1 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penyajian Laporan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Gambaran Umum	11
2.2. Isu Strategis	15
2.3. Strategis dan Prioritas Pembangunan	19
2.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dan Arah Kebijakan	22
BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2023	
3.1. Capaian Kinerja Sasaran	30
3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	52
3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	95
3.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	124
BAB IV PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	
4.1. Pendorong	126
4.2. Penghambat	127
4.3. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan RKPD Beirkutnya	128
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	129
5.2. Rekomendasi	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perwujudan Visi Kota Sukabumi 2018-2023	12
Tabel 2.2	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2.3	Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023	21
Tabel 2.4	Arah kebijakan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023.....	29
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Sukabumi (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	31
Tabel 3.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018–2022 (Persen)	32
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022.....	33
Tabel 3.4	Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2022.....	34
Tabel 3.5	PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2019–2023	35
Tabel 3.6	Capaian dan Target Gini Ratio 2020-2022	37
Tabel 3.7	Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023 (Poin)	40
Tabel 3.8	Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin 2021-2023 (Persen).....	41
Tabel 3.9	Capaian Kedalaman (P1) Kemiskinan 2020-2022 (poin)	42
Tabel 3.10	Capaian Keparahan (P2) Kemiskinan 2021-2023 (poin)	42
Tabel 3.11	Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020-2022 (Persen)	44
Tabel 3.12	Capaian Indikator Makro	45
Tabel 3.13	Capaian Indikator Tujuan/Sasaran (Iku Rpjmd) Tahun 2023	46
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2021 - 2023	52
Tabel 3.15	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2023	54
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021 – 2023.....	54
Tabel 3.17	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2023.....	56
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2023	58
Tabel 3.19	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	60
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2023 .	61
Tabel 3.21	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	62

Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 – 2023.....	63
Tabel 3.23	Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023	64
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2021 – 2023.....	65
Tabel 3.25	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2023	66
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2023	66
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2023	68
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020 – 2023	69
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2021 - 2023	69
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2023	70
Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2023	71
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 - 2023	72
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan PerhubunganTahun 2021 – 2023.....	73
Tabel 3.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2023	73
Tabel 3.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021 – 2023	75
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 – 2023	76
Tabel 3.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2023.....	76
Tabel 3.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021 – 2023.....	77
Tabel 3.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021 – 2023	78
Tabel 3.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2021 – 2023.....	79
Tabel 3.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021 – 2023.....	79
Tabel 3.42	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2021– 2023.....	80
Tabel 3.43	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2023	81
Tabel 3.44	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021 – 2023	81
Tabel 3.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2021 - 2023	82
Tabel 3.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan PerdaganganTahun 2021 - 2023	83

Tabel 3.47	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 – 2022	84
Tabel 3.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2022	85
Tabel 3.49	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2020 – 2022.....	86
Tabel 3.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020 – 2022	87
Tabel 3.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan Tahun 2020 – 2022	88
Tabel 3.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2020 – 2022	89
Tabel 3.53	Capaian indikator kinerja Perurusan Triwulan IV Tahun 2023	90
Tabel 3.54	Capaian Kinerja Indikator Program	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023	15
Gambar 3.1	Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi daerah, provinsi dan nasional 2020-2022.....	35
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan Provinsi dan Nasional 2018-2023	37
Gambar 3.3	Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat	39
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi dibandingkan dengan Daerah sekitar tahun 2023	41
Gambar 3.5	Jumlah Penduduk Miskin	41
Gambar 3.6	Perbandingan capaian Persentase Penduduk Miskin daerah, provinsi dan nasional 2020-2022	42
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan Daerah sekitar Tahun 2023.....	44
Gambar 3.8	Capaian dan Target Jumlah Pengangguran 2020-2023 (Orang)	44
Gambar 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka. Adapun dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. RKPD ini adalah rencana program dan/atau kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat perangkat daerah yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Dokumen RKPD sebagai penjabaran dari Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi Tahun 2024; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang dalam proses penyusunannya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional dan daerah yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. *Top down* yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

2. *Bottom-up* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (FPD), dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan berupa matrik program dan kegiatan prioritas sampai dengan Acara Puncak Musrenbang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023.
3. Teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan hasil kajian dan evaluasi periode sebelumnya berbasis pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
4. Politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya Pokok-pokok Pikiran (Pokir) atau hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.
5. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
6. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.
7. Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah di Kota Sukabumi dan nilai-nilai kearifan lokal.
8. Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan- kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program- program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar perangkat daerah di tingkat provinsi/kabupaten.

9. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan, lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu perangkat daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.
10. Pendekatan spasial dalam tahapan perencanaan pembangunan, digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/kota.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 juga menerapkan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix
– ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*).
2. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat/umat, Pinjaman Daerah, CSR, KPBU dan Obligasi Daerah.
3. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, proses penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Forum Perangkat Daerah Tingkat Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat, hasil evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2022 dan 2023, dan secara simultan dilakukan telaahan rancangan Renja Tahun 2024 melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, penelaahan

pokok-pokok pikiran DPRD atau Hasil reses DPRD serta Musrenbang Tingkat Kota.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda, Perangkat Daerah, memperhatikan Pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendapat dari kalangan akademisi, dunia usaha dan komunitas.
4. Penetapan RKPD, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024, hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kota Sukabumi serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024, pemerintah daerah dihadapkan pada kegiatan besar nasional yaitu Pemilihan Umum dan Pemiliha, dimana kegiatan tersebut menjadi kegiatan prioritas pada tahun 2024 dengan anggaran yang cukup besar.

Kondisi diatas memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan II, realisasi kinerja dan anggaran masih rendah, hasl tersebut disebabkan pelaksanaan program/kegiatan masih dalam tahap persiapan baru ada beberapa program/kegiatan di beberapa Perangkat Daerah pelaksanaan kegiatan pada triwulan II .

Evaluasi RKPD penting untuk dilaksanakan agar dapat memastikan target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi RKPD dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah masing-masing, untuk kemudian disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. Evaluasi RKPD ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Evaluasi RKPD, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten

- Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Perubahan PP Nomor 72 Tahun 2019;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
 26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
 29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
 30. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026
 31. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan yang bersifat aspiratif dan terpadu yang bersumber dari berbagai pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan yang sinergi dan efisien. Penyusunan RKPD disesuaikan dengan alokasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dan diharapkan akan memberi arah rencana kerja pembangunan di Tahun 2024 bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan renstra Perangkat Daerah terkait. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 telah mempertimbangkan isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi proses pembangunan di Tahun 2024, serta telah mempertimbangkan arah kebijakan dan target indikator kinerja pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota Sukabumi Tahun 2024. Oleh sebab itu hasil pelaksanaan RKPD perlu ada pengendalian dan evaluasi.

Maksud dari evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II adalah untuk menilai dan mengevaluasi sebagai berikut:

1. Pencapaian target-target rencana program kegiatan perangkat daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2024 Triwulan II;
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam APBD Kota Sukabumi Tahun 2024 Triwulan II.

Tujuan dari evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II, adalah:

1. Memberikan gambaran *progress* pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah per triwulan hingga akhir tahun 2024 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 berdasarkan realisasi anggaran;
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga akhir tahun 2024 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024;
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD mulai triwulan I hingga triwulan IV sebagai sistem evaluasi yang harus dilakukan untuk mengendalikan pencapaian tujuan;
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Dalam penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

Bab ini berisi tentang visi dan misi daerah, tujuan dan sasaran, prioritas pembangunan daerah, dan program dan kegiatan pembangunan.

3. BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 TRIWULAN II

Bab ini menjelaskan hasil capaian kinerja pembangunan berdasarkan kinerja sasaran, program dan kegiatan, dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

4. BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Bab ini berisi faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja, dan tindak lanjutnya bagi pelaksanaan RKPD berikutnya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

2.1. GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum ini memberikan gambaran pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, juga mengidentifikasi faktor-faktor dan berbagai hal yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan di Kota Sukabumi dilihat dari beberapa aspek.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu selain tentunya memperhatikan Dokumen RPJMD dan Dokumen RPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi dari aspek geografi dan demografi Kota Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran dari 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Dengan demikian, wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan

Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Wilayah Kota Sukabumi berbatasan dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada tabel dan grafik berikut:

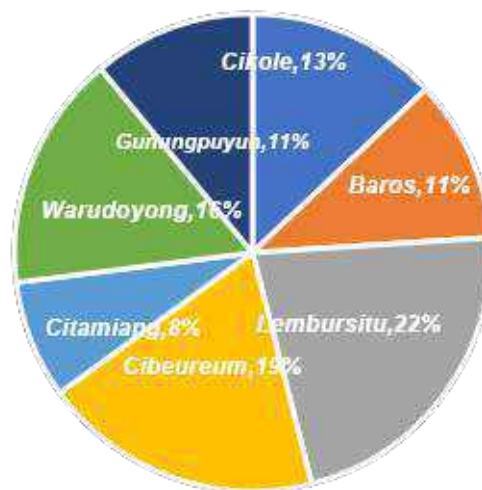
Luas Dataran Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
(1)	(2)	(3)
1	Baros	5,58
2	Lembursitu	10,70
3	Cibeureum	9,13
4	Citamiang	4,00
5	Warudoyong	7,56
6	Gunungpuyuh	5,13
7	Cikole	6,21
Luas Total		48,31

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Grafik ...

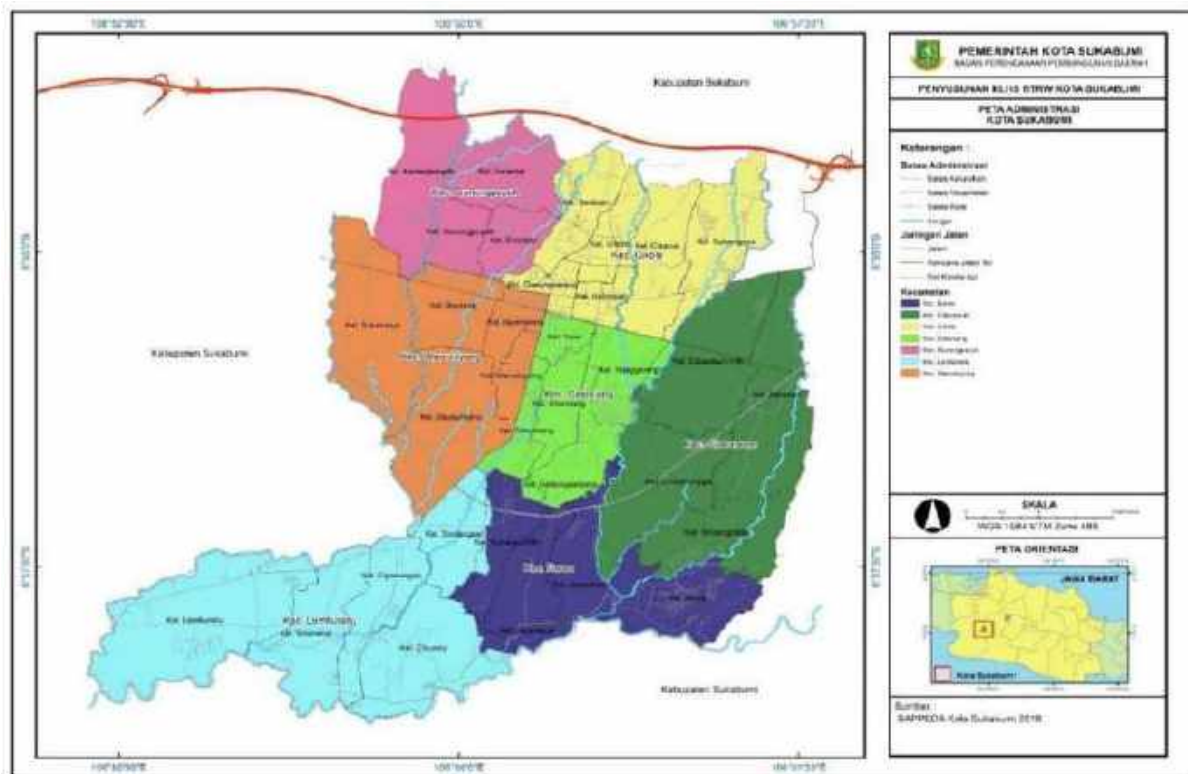
Persentase Luas Dataran Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Peta wilayah administrasi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Peta Administrasi Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat $106^{\circ} 45' 50''$ BT – $106^{\circ} 45' 10''$ BT sampai dengan $6^{\circ} 49' 29''$ LS – $6^{\circ} 50' 44''$ LS, secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibukota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lahan

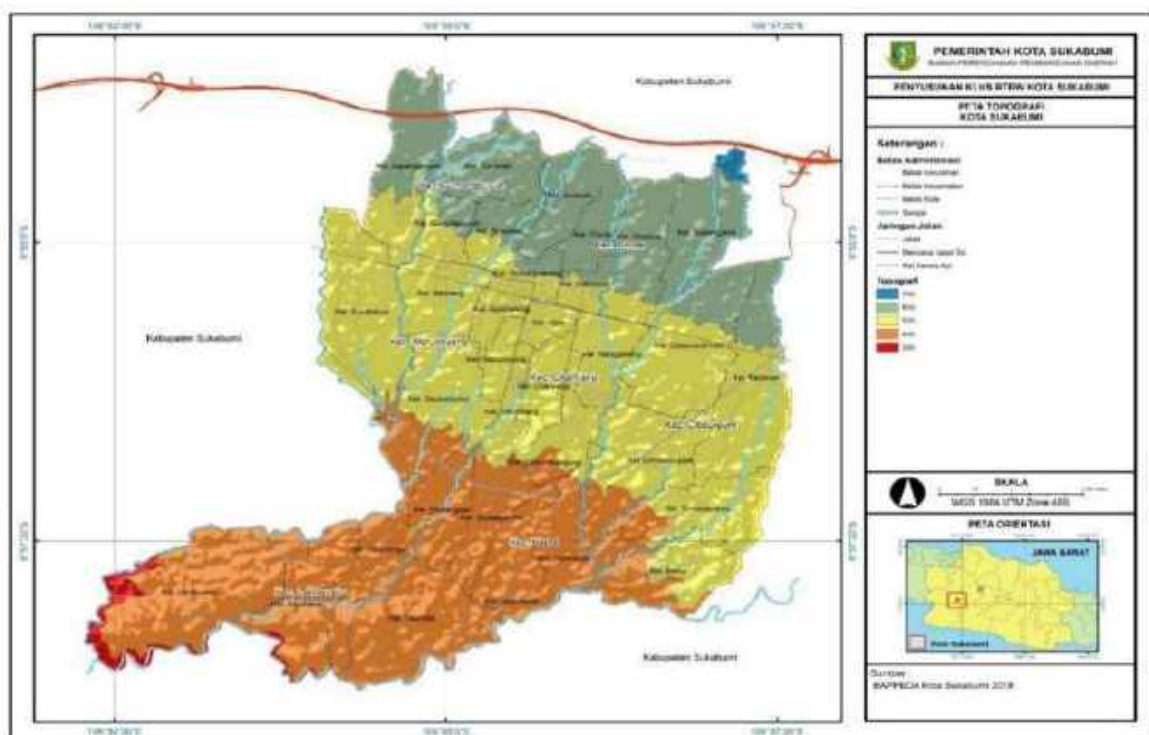
Wilayah Kota Sukabumi merupakan dataran rendah terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada pada ketinggian 584 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah berupa daratan seluas 48,31 Km². Secara morfologi, Kota Sukabumi dapat dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu morfologi daratan dengan elevasi 385-600 mdpl,

morfologi medan bergelombang dengan elevasi 350-975 mdpl, morfologi pegunungan ber-relief sedang dengan elevasi 375-975 mdpl, dan pegunungan ber-relief kasar dengan elevasi 375-900 mdpl.

Kota Sukabumi memiliki tiga stasiun pengamatan cuaca yaitu Stasiun Cimandiri, Stasiun Situmekar dan Stasiun Ciaul. Jumlah curah hujan paling tinggi tercatat di Stasiun Ciaul di Bulan November yaitu sebesar 615 mm dengan total jumlah hari hujan sebanyak 24 hari.

Sementara dibagian tengah mempunyai ketinggian rata-rata 650 meter dari permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Sukabumi berupa perbukitan bergelombang dengan sudut lereng beragam. Wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh kemiringan lereng 0- 2% dan 2-15%. Peta kondisi topografi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

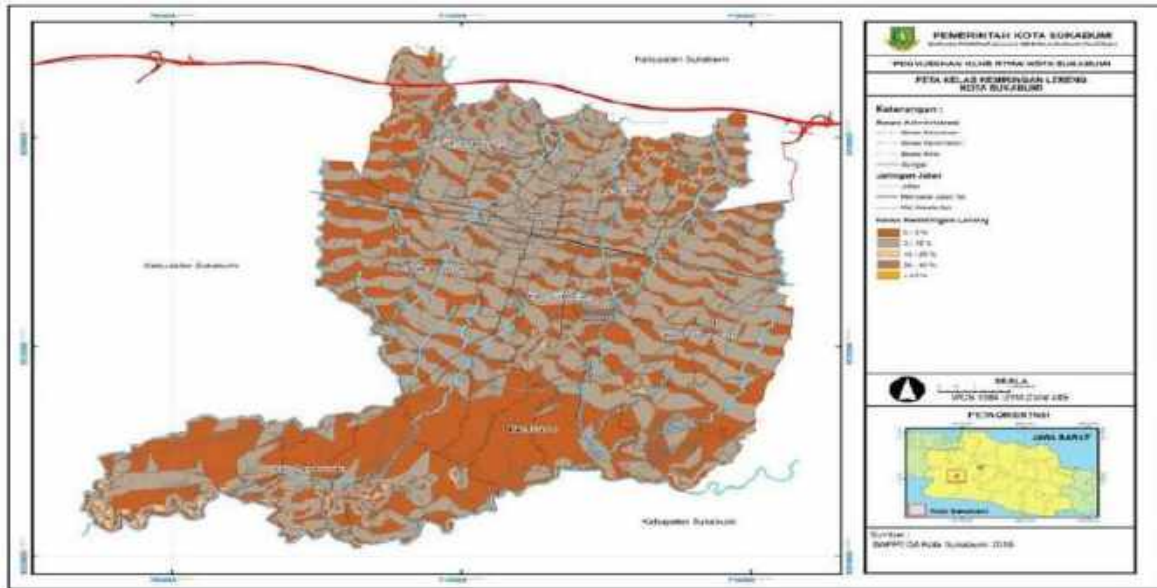
Gambar ...
Peta Topografi Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Luas Daerah Kota Sukabumi dengan kemiringan lereng 0-2% mencapai 2.228,795 Ha atau sekitar 45,59% dari total luas kota, dan kemiringan lereng 2-15% mencapai 2553.219 Ha atau sekitar 52,22% dari total luas kota. Adapun kondisi kemiringan lereng di wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Kota Sukabumi termasuk kepada zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah dan sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini masih mungkin terjadi adanya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan yang tinggi. Zona gerakan tanah sedang merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan gerakan tanah menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama masih mungkin dapat aktif kembali terutama oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia. Adapun luas gerakan tanah di Kota Sukabumi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

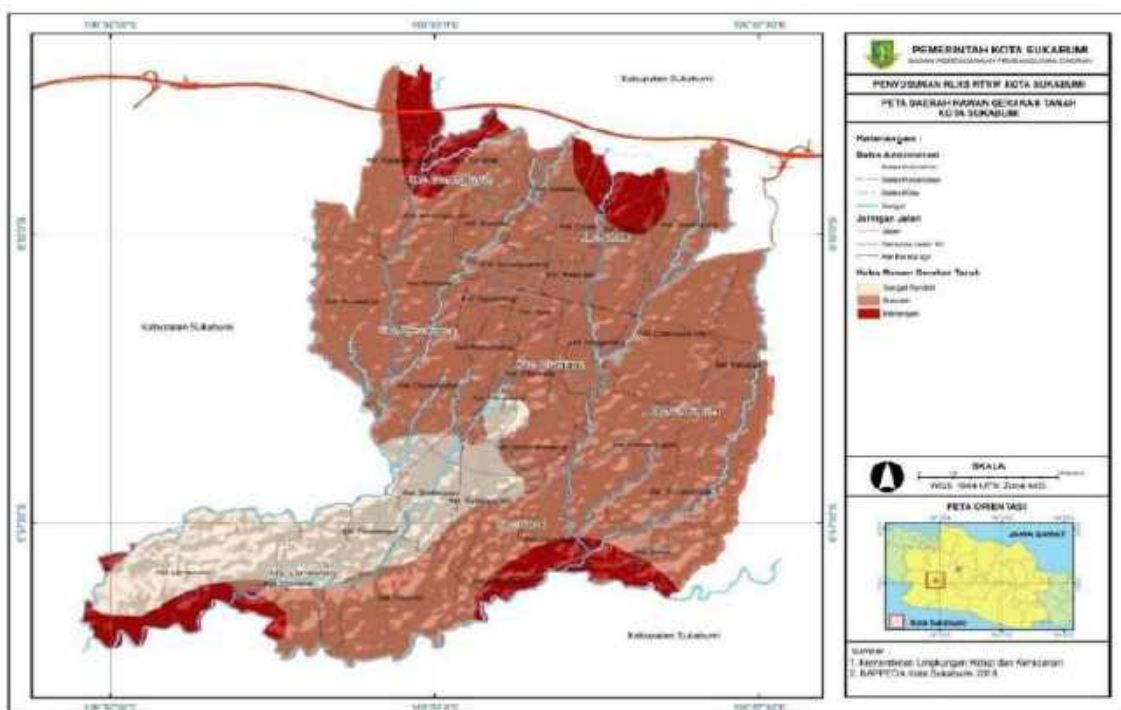
Tabel ...
Luas Potensi Gerakan Tanah di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baros	Menengah	137,97
		Rendah	345,31
		Sangat Rendah	77,20
2	Cibeureum	Rendah	932,21
3	Cikole	Menengah	140,05
		Rendah	504,32
4	Citamiang	Rendah	343,29
		Sangat Rendah	39,67
5	Gunungpuyuh	Menengah	145,73

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rendah	368,50
6	Lembursitu	Menengah	135,26
		Rendah	351,54
		Sangat Rendah	608,55
7	Warudoyong	Rendah	722,65
		Sangat Rendah	36,99

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Gambar ...
Peta Rawan Gerakan Tanah di Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.4 Struktur Geologi

Berdasarkan peta geologi susunan litologi batuan di wilayah Kota Sukabumi dan daerah sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur Holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari Formasi Walat berumur Oligosen Awal yang merupakan satuan yang tertua dijumpai di daerah ini. Formasi Walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari Oligosen Akhir sampai Miosen Awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur Miosen Awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi.

Formasi batuan sedimen di atas ditutupi oleh endapan vulkanik berumur Holosen yaitu batuan produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Satuan batuan vulkanik ini tersebar secara luas sehingga sebagian besar dari wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh singkapan batuan vulkanik. Endapan vulkanik Gunung Gede (Qvg) terdiri dari breksi tufan dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, piroksen dan banyak sekali hornblenda, tekstur seperti trachit, umumnya lapuk sekali. Batuan ini tersebar pada wilayah yang cukup luas mulai dari bagian timur sampai bagian tengah dan mulai dari bagian utara sampai bagian selatan Kota Sukabumi. Sedangkan endapan vulkanik Gunung Pangrango (Qvpo) merupakan endapan yang lebih tua yang tersusun dari lahar dan lava, basal-andesit dengan oligoklas-andesin, labradorit, olivin, piroksen, dan hornblenda. Posisi stratigrafi satuan batuan ini relatif lebih tua daripada endapan vulkanik Gunung Gede dan penyebaran satuan ini terbatas di bagian barat dan barat laut wilayah Kota Sukabumi. Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Kecamatannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel ...
Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri

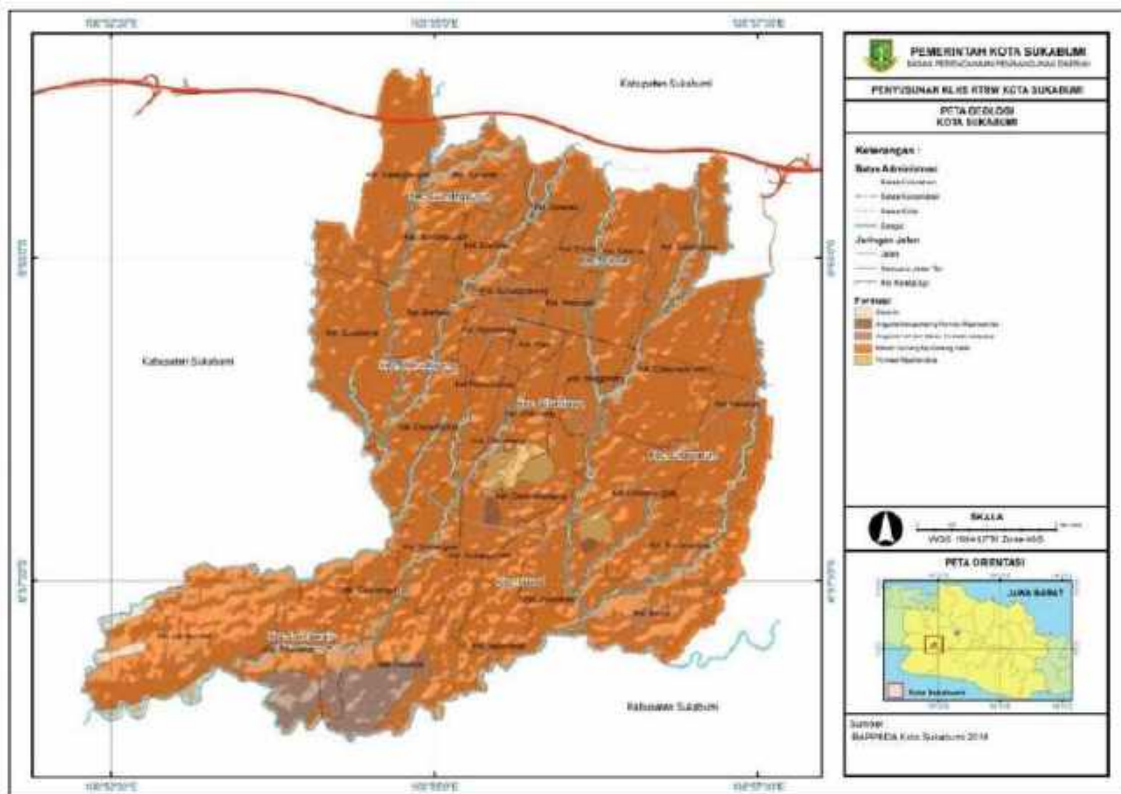
No	Kecamatan	Simbol	Formasi	Luas (Ha)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Baros	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	550,52
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	8,66
		Tmor	Formasi Rajamandala	1,31
2	Cibeureum	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	913,46
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	3,65
		Tmor	Formasi Rajamandala	15,09
3	Cikole	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	644,37
4	Citamiang	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	333,51
		Tmor	Formasi Rajamandala	49,45
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	514,23
6	Lembursitu	Qa	Aluvium	43,42
		Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	894,87

No	Kecamatan	Simbol	Formasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tmjt	Anggota Tuff dan Breksi Formasi	157,06
7	Warudoyong	Qvg	Batuan GunungApi Gunung Gede	759,64

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Gambar ...

Peta Geologi Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan, sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan berpenyebaran luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produktivitasnya rendah hingga langka. Kondisi air permukaan maupun air tanah (groundwater) baik dari sisi pergerakan, distribusi maupun kualitasnya di Kota Sukabumi sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sukabumi.

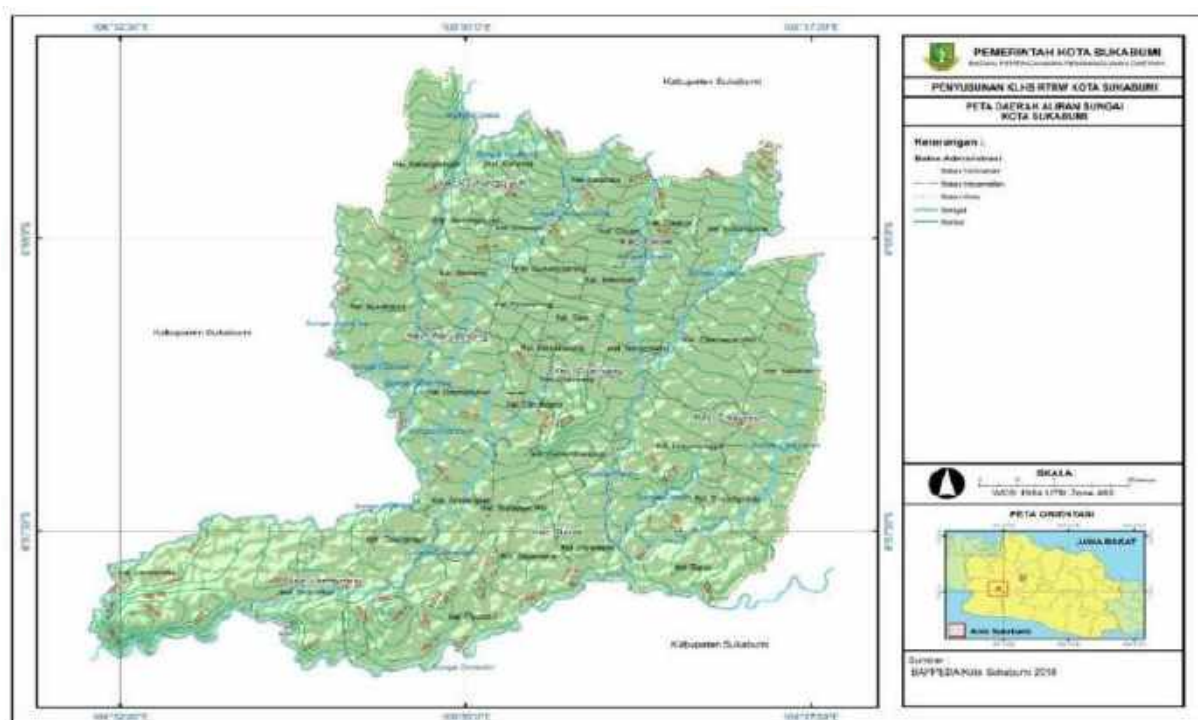
Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai-sungai yang melewati Kota Sukabumi dijelaskan tabel dan gambar berikut:

Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Sukabumi

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m³/dtk)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Ceger	0,004129	4,129	-
2	Cibeureum	0,0076	7,600	-
3	Salakaso	0,003244	3,244	-
4	Cibitung	0,006125	6,125	-
5	Cisuda	0,009659	9,659	0,40
6	Tonjong	0,004625	4,625	-
7	Cimandiri	0,012705	12,705	4,60
8	Cikapek	0,001851	1,851	0,01
9	Cipelang Leutik	0,003727	3,727	0,08
10	Cipelang	0,01508	15,080	1,26
11	Ciseureuh	0,004827	4,827	0,07
12	Cijambe	0,002252	2,252	0,20
13	Cigunung	0,004252	4,252	0,27
14	Bantarpanjang	0,001908	1,908	-
15	Gunungpuyuh	0,001068	1,068	-
16	Cikujang	0,001359	1,359	-
17	Cipanengah	0,005592	5,592	0,54
18	Ciseupan	0,003583	3,583	-
19	Ciparigi	0,001629	1,629	-
20	Cipada	0,001164	1,164	2,13
21	Ciwalung	0,001773	1,773	0,02
22	Cibandung	0,002847	2,847	0,06
23	Ciharempoy	0,004776	4,776	-
24	Cisarua	0,004127	4,127	0,36
25	Ciaul	0,003420	3,420	-
26	Cipicung	0,001503	1,503	-
27	Cisaray	0,002429	2,429	0,2
28	Tipar	0,003926	3,926	-
29	Cipasir	0,001948	1,948	-

Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Sukabumi



Sumber: RPD Kota Sukabumi, 2024-2026

2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Sukabumi berkisar antara 26°C-28°C. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Kota Sukabumi menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Nilai intensitas curah hujan maksimal sebesar 76 (tujuh puluh enam) mm dan curah hujan tahunan sebesar 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) mm. Jumlah bulan kering berkisar 1-2 bulan per tahun, namun mendapat pengaruh hujan orografis di sepanjang sungai merupakan perbukitan dan dataran bergelombang. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus. Berikut keadaan iklim menurut bulan di Stasiun Pengamatan Cimandiri:

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Pengamatan Cimandiri Tahun 2023

Bulan	Hujan Maksimum (mm)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	16	49	19
Februari	43	266	24

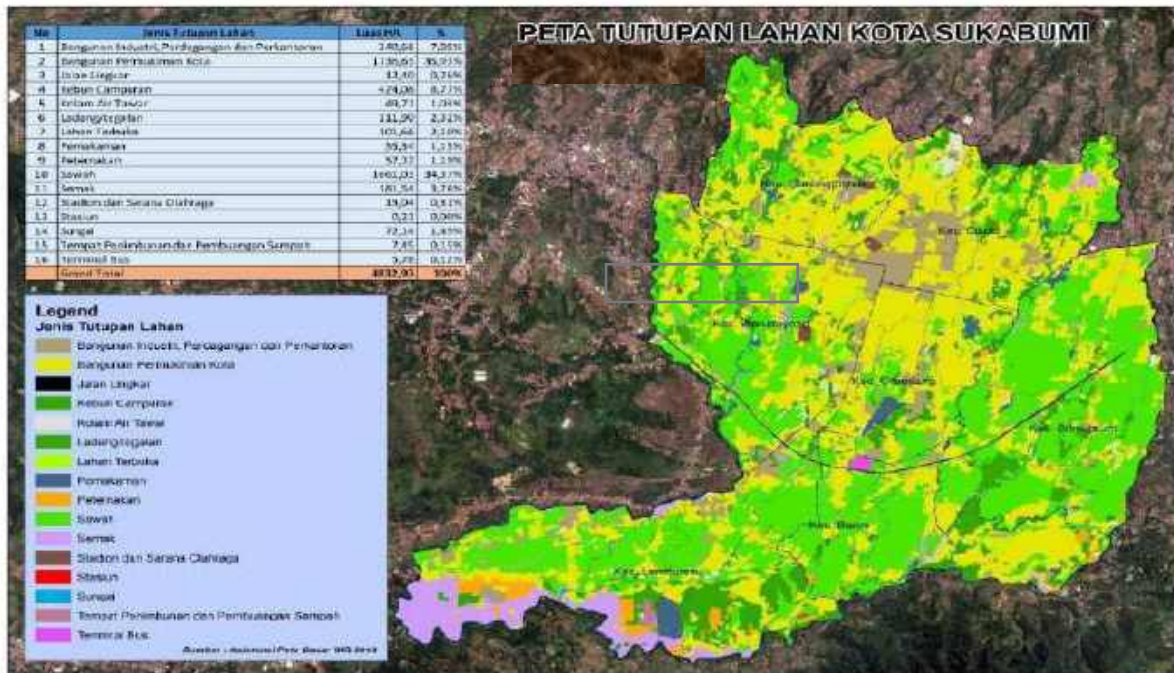
Bulan	Hujan Maksimum (mm)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Maret	48	324	23
April	44	152	13
Mei	49	148	10
Juni	66	178	10
Juli	5	9	2
Agustus	4	5	2
September	8	10	2
Oktober	38	84	7
November	55	322	15
Desember	85	264	11

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

2.1.1.7 Pola Penggunaan Lahan

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Sukabumi, sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan Iman dan Takwa. Kota Sukabumi juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional, sesuai dengan arahan dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Potensi pengembangan wilayah Kota Sukabumi pada masa-masa mendatang dapat dilihat pada gambar berikut:

Peta Tutupan Lahan Kota Sukabumi



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi

2.1.1.8 Daerah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang pasang/abrasi, dan tanah longsor. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Daerah rawan bencana yang berada di wilayah Kota Sukabumi meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

1. Daerah rawan letusan gunung berapi karena berlokasi relatif dekat dengan kawasan Gunung Gede Pangrango;
2. Daerah rawan gempa yang terletak di jalur daerah rawan gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung;
3. Daerah rawan banjir yang tersebar di beberapa titik wilayah. Secara umum penyebab terjadinya genangan atau banjir di wilayah Kota

Sukabumi lebih banyak diakibatkan oleh kondisi saluran yang tidak terawat, tersumbat oleh sampah dan tingginya sedimentasi;

4. Daerah rawan gerakan tanah zona patahan aktif, yaitu patahan Cimandiri;
5. Daerah longsor di beberapa bagian daerah wilayah kota.

Berikut tabel jumlah kejadian bencana dan area terdampak bencana tahun 2023:

**Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana
di Kota Sukabumi Tahun 2023**

Jenis Bencana	Kejadian Bencana
(1)	(2)
Kebakaran	33
Kabakaran Pemukiman	34
Kebakaran Transportasi	1
Banjir	13
Tanah Longsor	37
Angin Puting Beliung	6
Gempa Bumi	-
Cuaca Ekstrem	61
Bencana Non-Alam	-
Jumlah	185

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

**Jumlah Kejadian Bencana Menurut Bulan
di Kota Sukabumi Tahun 2023**

Bulan	Jumlah Kejadian Bencana
(1)	(2)
Januari	1
Februari	16
Maret	25
April	10
Mei	11
Juni	10
Juli	8
Agustus	6
September	37

Bulan	Jumlah Kejadian Bencana
(1)	(2)
Oktober	25
November	24
Desember	12
Jumlah	185

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

Nilai Kerugian Akibat Bencana Menurut Jenis Bencana di Kota Sukabumi (Rp) Tahun 2023

Jenis Bencana	Nilai Kerugian
(1)	(2)
Kebakaran	36.100.000
Kabakaran Pemukiman	2.383.100.000
Kebakaran Transportasi	200.000.000
Banjir	624.875.000
Tanah Longsor	1.999.850.000
Angin Puting Beliung	38.400.000
Gempa Bumi	-
Cuaca Ekstrem	816.350.000
Bencana Non-Alam	-
Jumlah	6.098.675.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

2.1.1.9 Demografi

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau mempunyai Kartu Keluarga (beridentitas).

Sebagaimana karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas terbatas, yakni 48,31 Km², serta jumlah penduduk Tahun 2023 sebanyak 360.644 jiwa, kepadatan penduduk 7.465 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%.

Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan dan rasio jenis kelamin penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

**Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Sukabumi Tahun 2023**

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Baros	40,38	2,50
Lembursitu	43,84	2,08
Cibeureum	48,31	2,64
Citamiang	54,57	1,03
Warudoyong	60,72	1,07
Gunungpuyuh	49,58	0,96
Cikole	63,24	0,79
Jumlah	360,64	1,48

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

**Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2023**

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)
Baros	7.237	103
Lembursitu	4.098	98
Cibeureum	5.291	102
Citamiang	13.634	101
Warudoyong	8.030	103
Gunungpuyuh	9.656	103
Cikole	10.191	98
Jumlah	7.465	101

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu 2024-2026. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antarperiode, maka Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan: 1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; 2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan 3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi. Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah; dan
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan:

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

2.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

NO	MISI RPJPD	SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD	ISU STRATEGIS AKTUAL	TUJUAN RPD	SASARAN RPD
1.	Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya	SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia	Kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	- Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2.	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3.	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

4.	Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi	Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing	a. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa b. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah	Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan	Inovasi di pemerintahan Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis Meningkatnya inovasi daerah
6.	Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana	Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Sukabumi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Rumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan/sasaran		Indikator kinerja (tujuan/sasaran)	
1		2	
1.1	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi
1.1.1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	a.	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB

1.1.2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	b.	Indeks Kota Kreatif
1.2	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif		Indeks Pembangunan Manusia
1.2.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	a.	Indeks Pendidikan
1.2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	b.	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
1.2.3	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	c.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
1.3	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni
1.3.1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	a.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
1.3.2	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	b.	Indeks Rasa Aman
1.4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif		Indek Reformasi Birokrasi
1.4.1	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	a.	Indeks Reformasi Birokrasi
1.4.2	Meningkatnya inovasi daerah	b.	Indeks Inovasi Daerah

Sumber: RPD Kota Sukabumi tahun 2024-2026, Bappeda 2024

Isu strategis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Ekonomi bertumpu pada sector perdagangan dan jasa;
3. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya;
4. Inovasi dipemerintahan;
5. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024; dan
6. Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan.

2.3 STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi sasaran pembangunan tahunan 2024-2026. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, yakni:

“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”

Tema di atas memiliki makna bahwa Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024 disusun dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat. Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera terutama melalui pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh unsur masyarakat.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan sasaran dan isu strategis RPD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2024. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan dengan tetap memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	
1	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;	1	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa;
2	Dampak PSN dan megaprojek lainnya;	2	Peningkatan Kondusifitas Kota;
3	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan;	3	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4	Pemilu dan pilkada serentak 2024;	4	Peningkatan Kondusifitas Kota
5	Kualitas SDM	5	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;
6	Inovasi di pemerintahan.	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Tabel 2.3. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024

2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024 DAN ARAH KEBIJAKAN

Prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui 71 (tujuh puluh satu) arah kebijakan sebagai berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
1	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	1	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		2	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok
		3	Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
		4	Memberdayakan pelaku UMKM
		5	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
		6	Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
		7	Memanfaatkan dan melindungi HKI
		8	Meningkatkan obyek daya tarik wisata
		9	Meningkatkan pemasaram wisata
		10	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
		11	Meningkatkan literasi masyarakat
		12	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
		13	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
		14	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
		15	Meningkatkan penempatan tenaga kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
		16	Meningkatkan kualitas jalan kota
		17	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		18	Meningkatkan pengelolaan persampahan
2	Peningkatan Kondusifitas Kota	19	Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		20	Mengurangi luas kawasan kumuh
		21	Mengurangi RTLH
		22	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
		23	Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
		24	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		25	Meningkatkan kerukunan umat beragama
		26	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan	36	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
		37	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	38	Meningkatkan transparansi pemerintahan	
	39	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing	
	40	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi	
	41	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi	
	42	Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi	
	43	Implementasi pemanfaatan inovasi	

Tabel 2.4. Arah kebijakan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Evaluasi pembangunan daerah pada buku ini menjelaskan tentang indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Hasil Evaluasi akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi pembangunan daerah melalui data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.

3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.A. Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai penambahan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9.801,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 477,72 miliar rupiah dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022 Sementara pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Kondisi perekonomian tampak berjalan relatif stabil di Kota Sukabumi selama 2 tahun terakhir, dengan nilai pertumbuhan dikisaran 5 persen.

Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 9,08 persen. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas 5 persen. Sementara enam lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif yang lebih rendah.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga delapan persen tersebut antara lain: lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,04 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 7,81 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,71 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,17 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,85 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,17 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,79 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 5,54 persen.

Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,64 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 3,80, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,33 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,19 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,09 persen serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 2,07 persen.

Berikut disajikan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha:

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi
Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	0,62	0,76	3,58	7,17
Indusri Pengolahan	5,30	-1,93	2,49	4,81	4,64
Pengadaan Listrik dan Gas	2,95	2,99	8,98	5,90	3,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,60	6,85	8,02	6,32	2,09

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konstruksi	7,09	-4,06	4,00	-0,15	6,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	-2,68	3,64	5,47	3,80
Transportasi dan Pergudangan	7,17	-6,98	3,41	7,59	9,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	-3,41	2,74	9,70	7,81
Informasi dan Komunikasi	8,75	10,78	8,23	7,01	6,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,58	2,81	4,79	2,57	3,33
Real Estat	8,16	-0,86	7,76	6,30	5,54
Jasa Perusahaan	7,37	-7,67	7,87	9,13	8,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Soaial Wajib	0,21	-3,93	-2,76	-0,34	2,07
Jasa Pendidikan	6,34	4,39	2,88	8,09	5,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	1,82	7,82	9,85	5,72
Jasa lainnya	9,15	-0,82	1,42	11,67	7,71
Produk Domestik Regional Bruto	5,53	-1,49	3,71	5,35	5,12

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

3.1.B. PDRB per Kapita

Data PDRB Kota Sukabumi yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian.

Secara umum, PDRB per Kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karen itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 42,56 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Sukabumi juga mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2023, masing-masing sebesar 26,53 juta rupiah dan 27,18 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena dalam hal ini pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi. Berikut disajikan Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Tahun 2019-2023:

Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	12.387.691,54	12.401.540,58	13.053.044,18	14.192.254,06	15.349.709,36
ADHK	8.664.017,06	8.534.716,50	8.851.051,49	9.324.164,63	9.801.880,80

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

PDRB Perkapita Kota Sukabumi Tahun 2019-2023

PDRB Perkapita (Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	37.927.735,70	35.925.772,04	37.278.009,63	39.931.275,25	42.561.942,04
ADHK	26.526.859,19	24.724.047,59	25.277.596,39	26.234.436,27	27.178.826,77

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

**Persentase Pertumbuhan Perkapita Kota Sukabumi
Tahun 2019-2023**

Persentase Pertumbuhan per Kapita (%)					
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,42	-6,80	2,24	3,79	3,60
Jumlah Penduduk (ribu orang)	326,61	345,20	350,15	355,42	360,64
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,10	5,69	1,44	0,50	0,49

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024

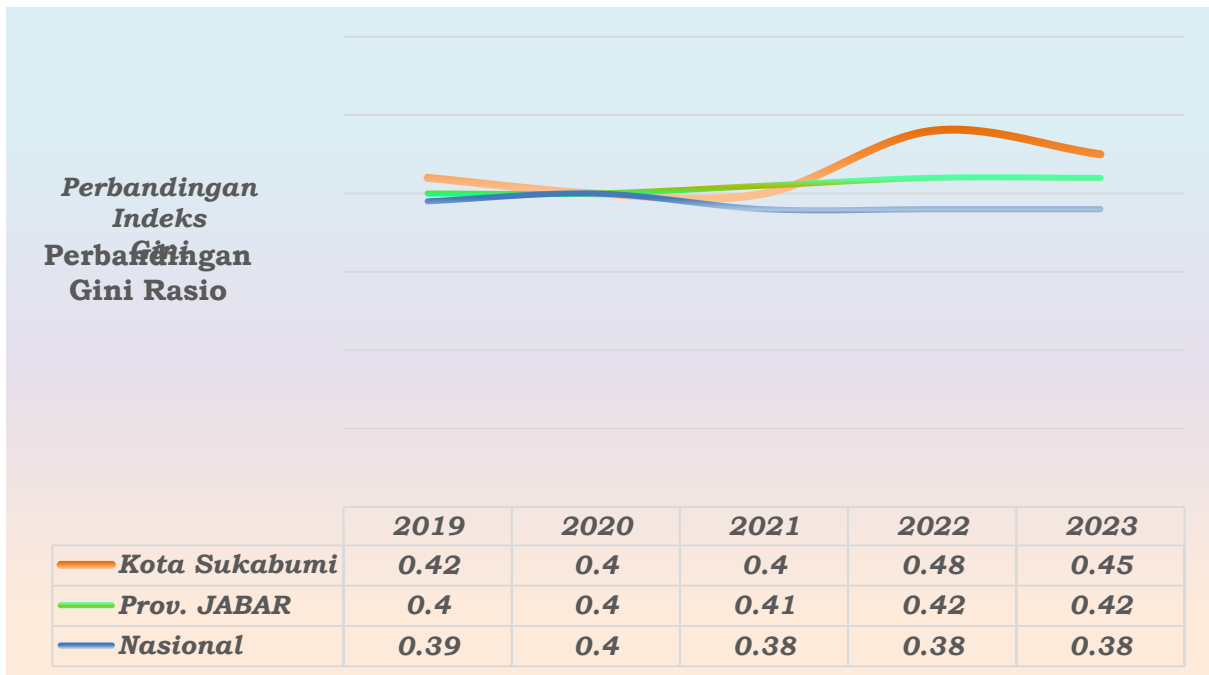
3.1.C. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indikator gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan alam suatu populasi. Semakin tinggi indeks gini, semakin tinggi ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 (sama sekali tidak ada ketimpangan) hingga 1 (ketimpangan maksimal). Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Angka Indeks Gini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Pada Tahun 2023 tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,45 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Berikut disajikan perbandingan indeks gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama periode 2019-2023:

Realisasi Indeks Gini di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,45. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadaro, Kota Sukabumi termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini ratio berkisar 0.36-0,49). Kota Sukabumi termasuk wilayah yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunnya kesejahteraan sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu (1) Ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; (2) Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; (3) Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki asset keuangan seperti properti dan saham; dan (4) Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Hal ini terlihat saat terjadi guncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

3.1.D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human Development Index* atau *HDI* yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Penyempurnaan metode penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan secara berkala untuk memperoleh indikator yang lebih baik lagi dan relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perhitungan IPM ini mengacu kepada perhitungan BPS yang mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan

backcasting sejak tahun 2010. Pada tahun 2023 Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF) digunakan sebagai dasar penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun melambat dibanding dua tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi tahun 2023 mencapai 77,16 poin meningkat sebesar 0,92 poin (1,21 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar

76,24. Selama periode 2020-2023, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun.

Peningkatan IPM Kota Sukabumi tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,89 tahun, lebih lama 0,25 tahun (0,33 persen) dibandingkan tahun 2022.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 13,59 tahun menjadi 13,60 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,23 tahun (2,27 persen) dibandingkan tahun 2022 dari 10,14 tahun menjadi 10,37 tahun.

Dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2023 mengalami peningkatan 570 ribu rupiah (5,08 persen) dibanding tahun 2022 menjadi sebesar Rp 11,80 juta rupiah.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2023 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,16 pada tahun 2023. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat sepanjang periode 2020- 2023. Peningkatan IPM tahun 2023 IPM didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami akselerasi pertumbuhan di 2023 sebesar 5,08 persen. Sedangkan dua indikator yang mengalami perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun sebelumnya adalah Umur Harapan Hidup (UHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan masing-masing 0,33 persen dan 2,27 persen. Kecepatan pertumbuhan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) bergerak stabil sama seperti di tahun 2022, yaitu 0,07 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Menurut Dimensi Penyusunnya
Tahun 2020-2023**

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	74,23	74,38	74,64	74,89
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,47	13,58	13,59	13,60
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,59	9,81	10,14	10,37
Sumber Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	10.999	10.942	11.229	11.799
Indeks Pembangunan Manusia		75,06	75,44	76,24	77,16

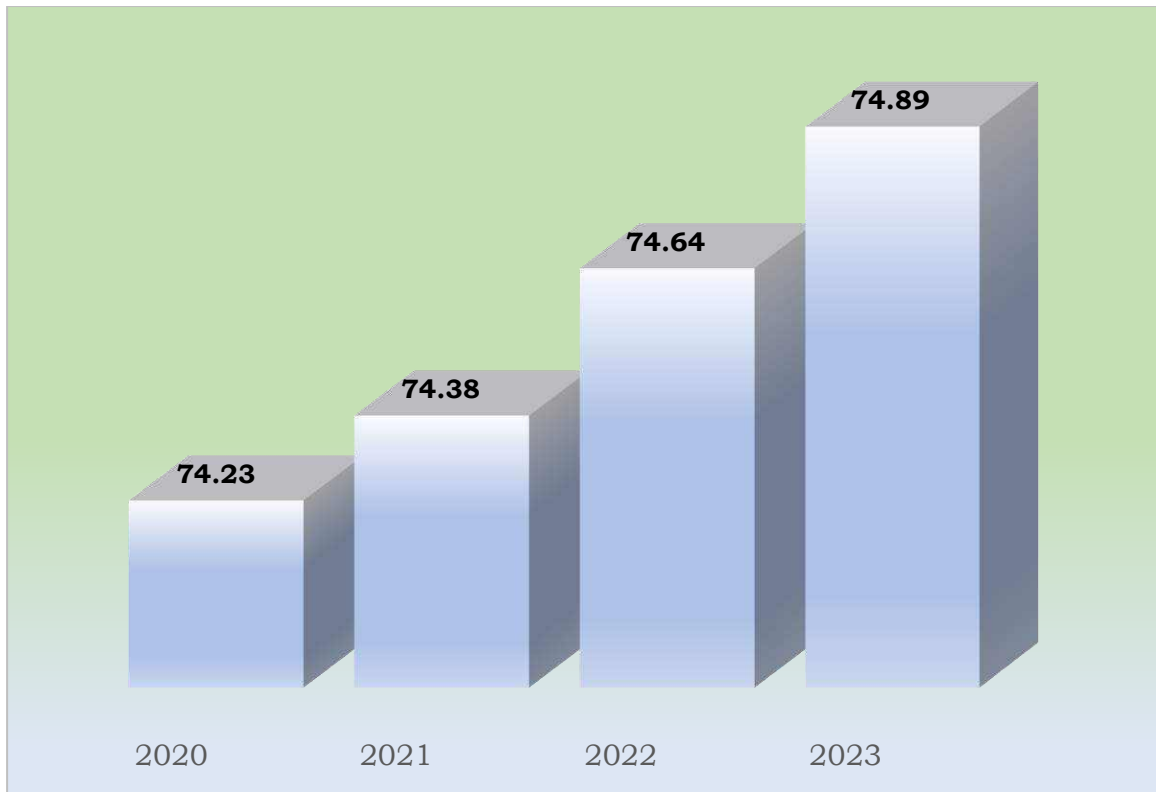
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Kota Sukabumi telah meningkat sebesar 0,66 tahun. Selama periode tersebut, rata-rata UHH Kota Sukabumi tumbuh sebesar 0,30 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Sukabumi adalah 74,23 tahun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,89 tahun. UHH tahun 2023 meningkat sebesar 0,25 tahun (0,33 persen) jika dibandingkan tahun 2022. Terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan di 2023 dibanding tahun 2022 yang mencapai 0,35 persen.

Penambahan umur harapan hidup dari bayi yang baru lahir merupakan dampak positif dari keberhasilan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik dari sisi prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Sukabumi Tahun 2020-2023

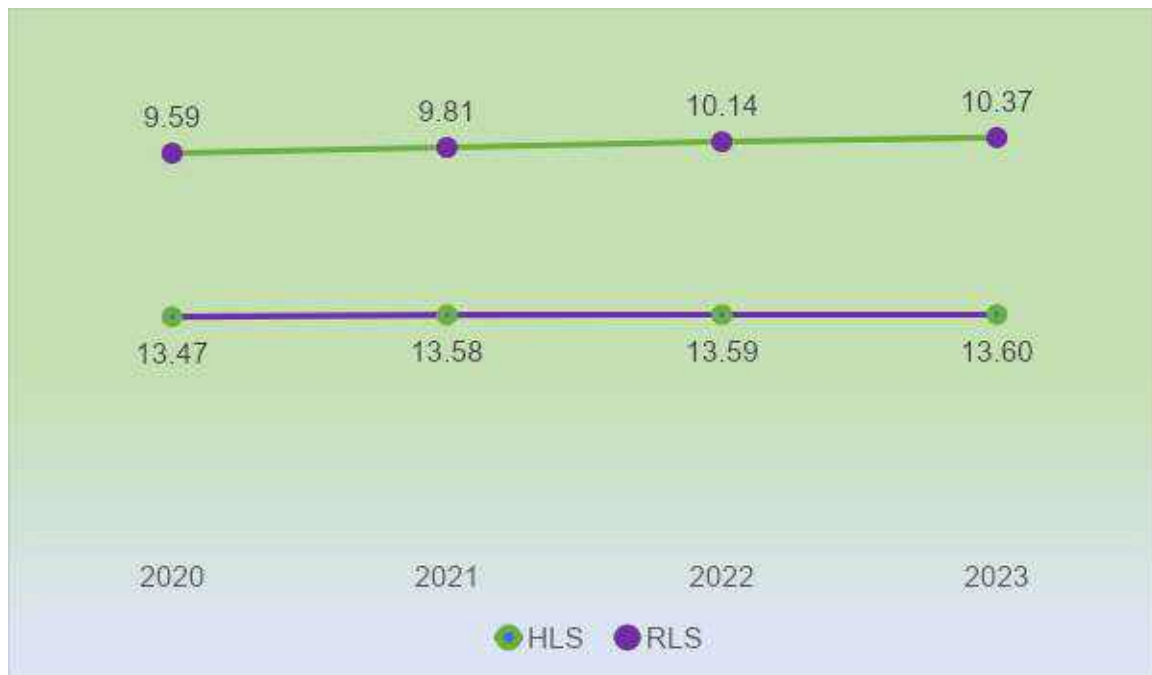


Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2020 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan HLS Kota Sukabumi sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2023, HLS Kota Sukabumi mencapai 13,60 tahun, yang berarti anak umur 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma II. Berikut grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2023:

**Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023**

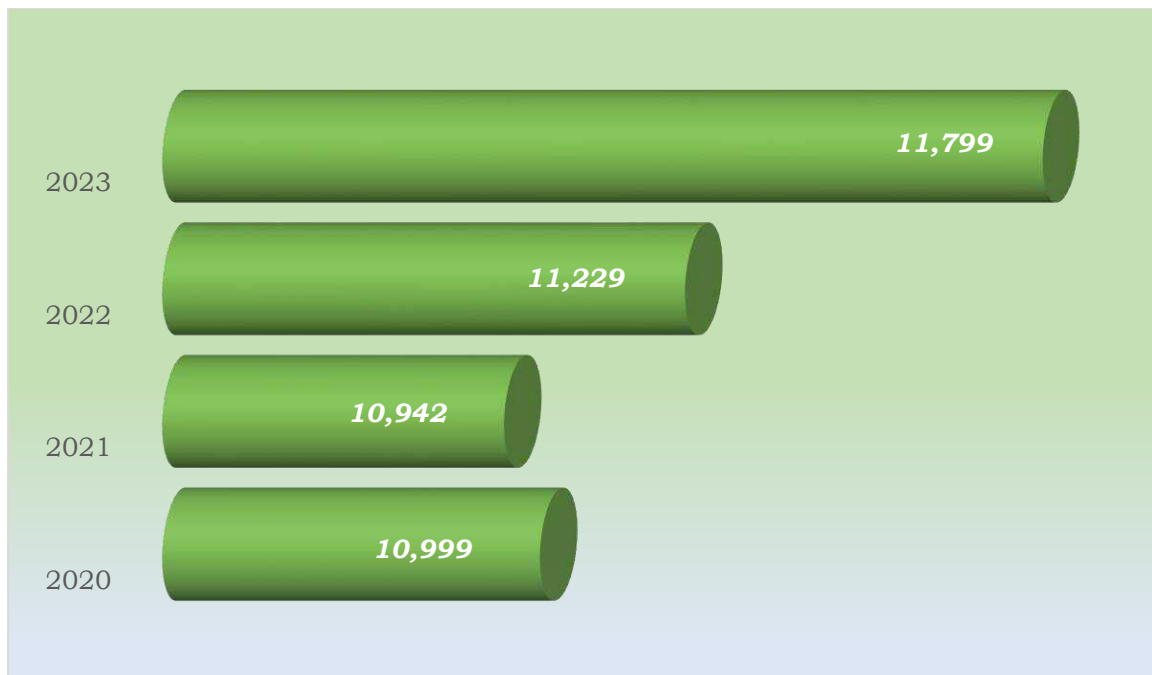


Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Sementara pada periode yang sama, RLS Kota Sukabumi rata-rata tumbuh sebesar 2,64 persen per tahun. Pada 2023, RLS Kota Sukabumi mencapai 10,37 tahun atau setara dengan menyelesaikan masa pendidikan hingga menamatkan SMA kelas X. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sukabumi yang lebih baik. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator proses pembangunan dari program-program yang bersifat jangka pendek. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan hasil upaya pembangunan yang bersifat jangka panjang. Kedua indikator ini saling melengkapi dalam menggambarkan capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita per tahun (harga konstan 2012). Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Kota Sukabumi mencapai Rp 11,80 juta per tahun. Angka ini meningkat Rp 570 ribu (5,08 persen) dibandingkan tahun 2022. Dalam kurun waktu 2020-2023, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 2,39 persen per tahun. Pengeluaran riil per kapita selama tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023 (Rp000)**



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2024

Jika dibandingkan terhadap IPM Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi berada diatas IPM Provinsi Jawa Barat yang artinya bahwa secara rata-rata kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi melebihi rata-rata kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Apabila sejak tahun 2013 status pembangunan manusia Kota Sukabumi telah tergolong berkategori “tinggi”, karena IPM nya telah berada di atas 70, maka status “tinggi” dalam pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat baru tercapai di tahun 2016. Kecepatan dalam melakukan pembangunan di setiap wilayah tidaklah merata. Upaya yang dikerahkan untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kecepatan yang terjadi.

IPM di Kota Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang kurun waktu 2020-2023, IPM Kota Sukabumi telah mengalami kenaikan sebanyak 2,10 poin dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan per tahun sebesar 0,92 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan 0,74 persen per tahun dengan kenaikan IPM 1,63 poin dalam periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kota Sukabumi masih berada diatas rata-rata Jawa Barat.

Di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM di kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$), serta dua puluh kabupaten/kota dengan capaian IPM berkategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan tiga kabupaten/kota dengan capaian IPM di kategori “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq$

80). Sejak tahun 2012 Provinsi Jawa Barat tidak memiliki wilayah kabupaten/kota dengan capaian pembangunan manusia berkategori “rendah”.

3.1.E. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan sering sekali menjadi penghambat laju pembangunan manusia, misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga berpengaruh buruk bagi hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding kondisi 2022 dari 8,02 persen menjadi 7,50 persen. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi tahun 2020-2023:

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2020	25,42	7,70
2021	27,19	8,25
2022	26,59	8,02
2023	24,96	7,50

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Untuk mengukur kemiskinan, konsep yang digunakan BPS yaitu dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk

miskin juga semakin melebar. Berikut tabel dalam kurun waktu empat tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Kota Sukabumi sebesar 1,39 persen pada tahun 2021, dan terendah sebesar 1,17 persen di tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 1,39 persen. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

**Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi
Tahun 2020-2023**

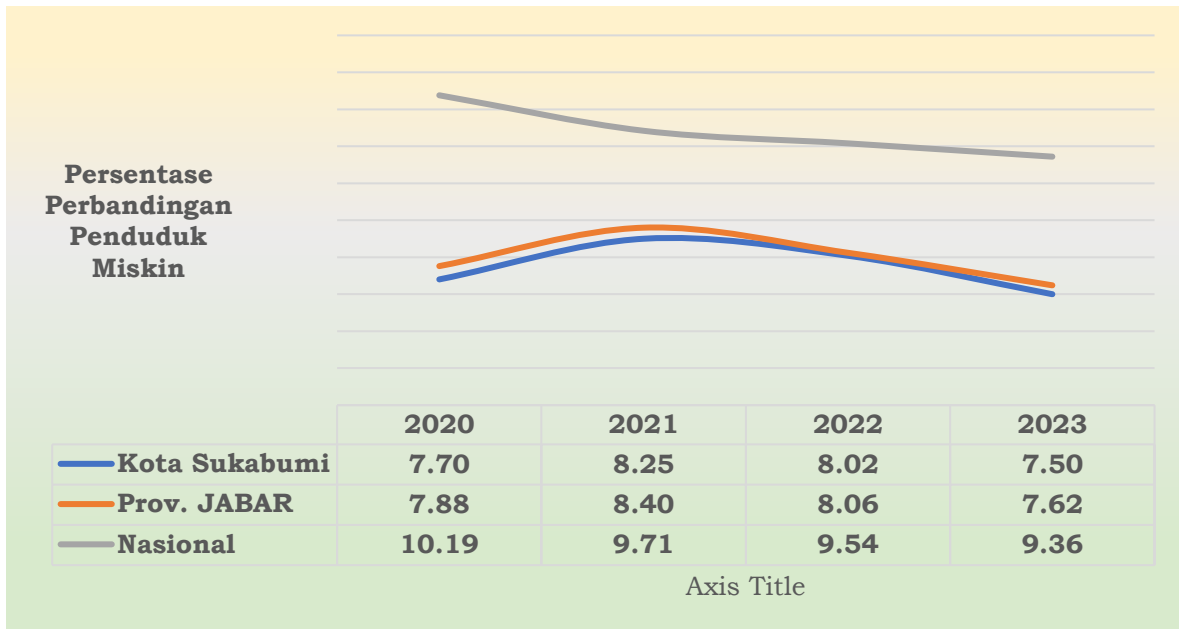
Indikator	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	25,42	27,19	26,59	24,96
Persentase Penduduk Miskin	7,70	8,25	8,02	7,50
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	547.415	567.734	594.118	644.276
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,17	1,39	1,27	1,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,36	0,38	0,31

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,38 persen di tahun 2022, dan terendah sebesar 0,22 persen di tahun 2020. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti naik dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sukabumi meningkat.

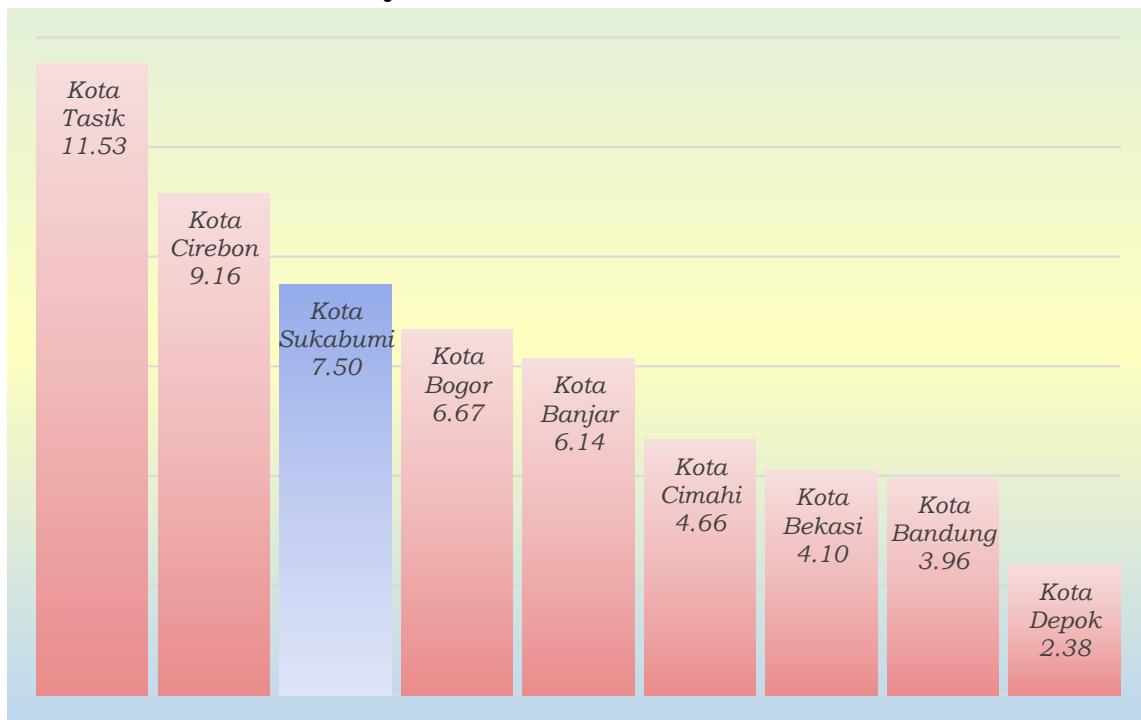
Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kota Sukabumi berada dibawahnya. Tersaji dalam grafik berikut:

**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023**



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi dengan Kota Lainnya di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

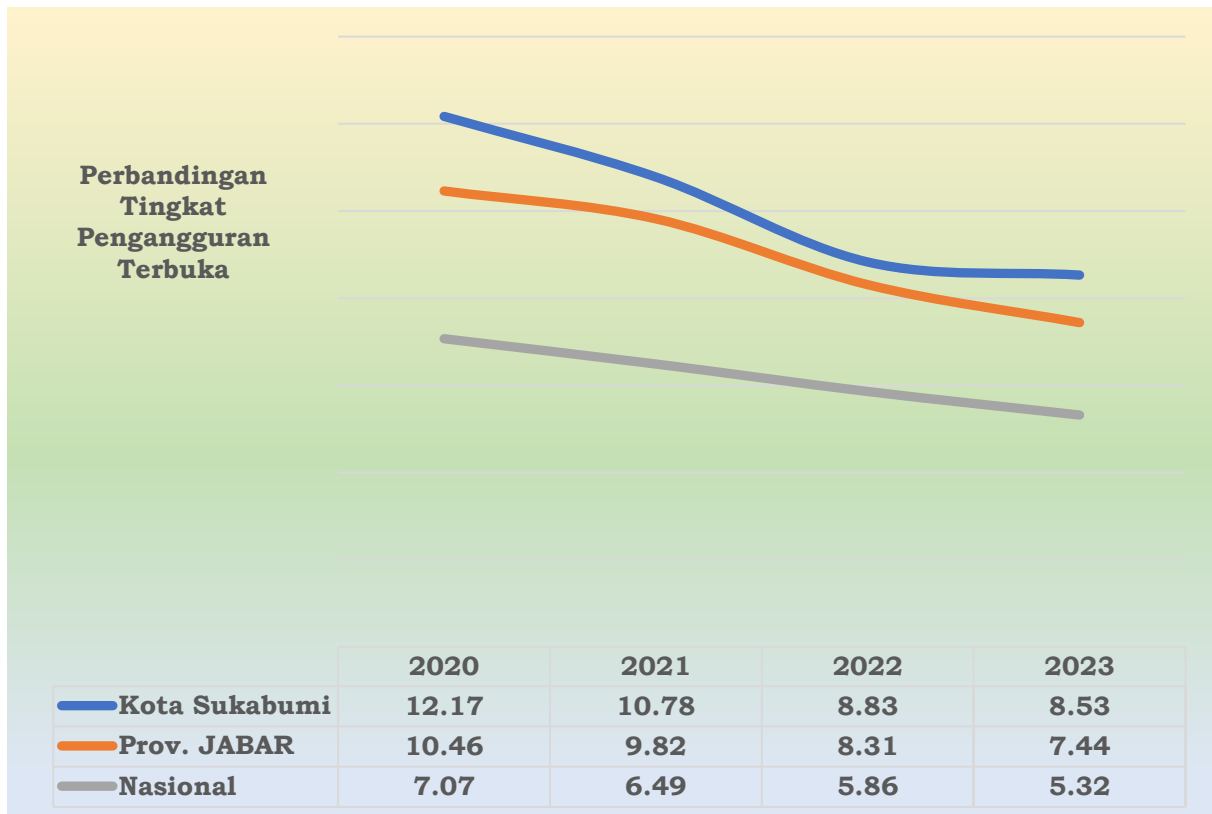
3.1.F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dirasa sangat kompleks dengan kondisi Kota Sukabumi yang tidak memiliki

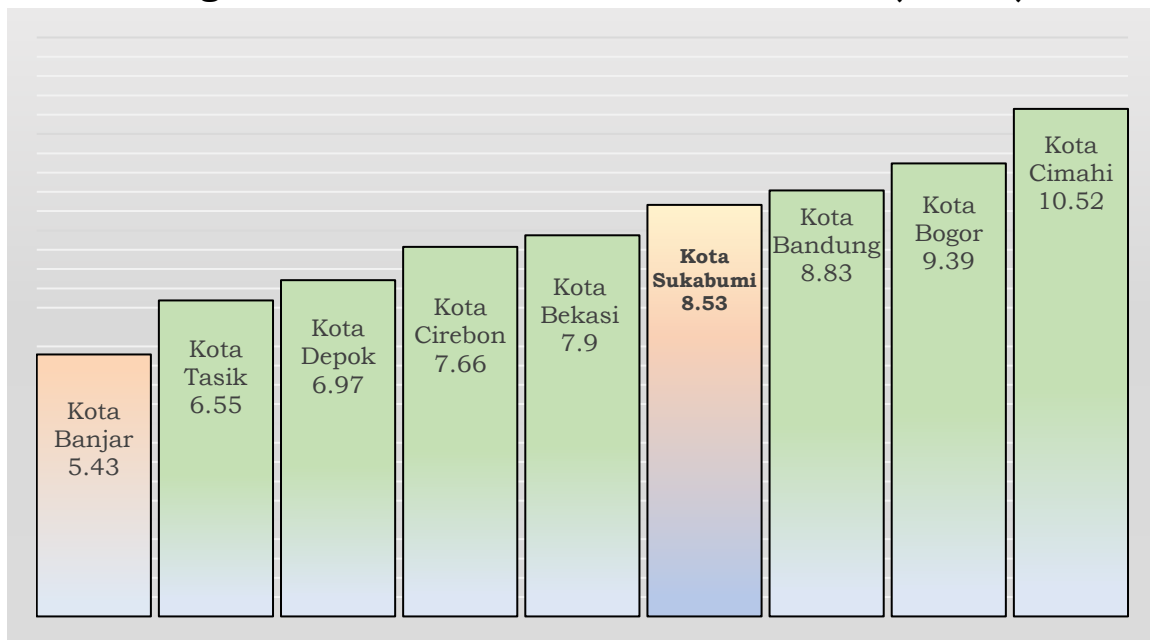
sumber daya alam dan angkatan kerja semakin meningkat. Selama periode 2020-2023, kondisi TPT Kota Sukabumi turun sebesar 3,64 persen. Berikut tabel perbandingan persentase TPT Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020-2023:

**Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2023**



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi
dengan Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2023 (Persen)**



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

TPT Kota Sukabumi Tahun 2023 dibandingkan dengan Kota lain, berada pada urutan ke-4 (empat) tertinggi di Jawa Barat. Begitupun dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional, TPT Kota Sukabumi lebih tinggi. Permasalahan terkait pengangguran dan dunia kerja ini diantaranya yaitu jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan juga belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja. Berikut tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin:

**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kota Sukabumi Tahun 2023**

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	27.669	17.222	44.891
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	5.946	3.916	9.862
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	7.882	2.013	9.895
Buruh/Karyawan/Pegawai	48.733	23.731	72.464
Pekerja bebas	9.392	1.794	11.186
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.706	6.758	8.464
Jumlah	101.328	55.434	156.762

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

3.1.G. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh

kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Untuk mengetahui capaian pembangunan manusia secara gender digunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan membandingkan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Capaian IPG Kota Sukabumi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPG Provinsi Jawa Barat. Artinya pembangunan manusia secara gender di Kota Sukabumi lebih merata dibanding di tingkat Jawa Barat. Berikut grafik perbandingan capaian IPG Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat:

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

3.1.B. Capaian Indikator Utama

Pemerintah Kota Sukabumi telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Unit (IKU) Kota Sukabumi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, memiliki indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas).

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPD dengan realisasinya.

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Pada tahun 2024, capaian indikator sasaran belum dapat dilaporkan karena prosesnya masih berjalan hingga akhir tahun nanti, sehingga untuk kondisi saat ini yaitu hingga akhir triwulan I, capaiannya masih 0 (nol). Adapun pengukuran IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU RPJMD)
TAHUN 2024**

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1			3				
I	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,41	5,37		
1.	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,4	4		
a	Berkembangnya ektor pariwisata dan ekonomi reatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	33,95	30,93		
II	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks pembangunan Manusia	Poin	75,8	75,55		
a	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,77	71,58		
b	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,37	0,33		
c	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	37,736	34,001		
III	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Poin	65,5	65,00		
a	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	86,5	86		
b	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Poin	75,6	75,4		
IV	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75	73		
a	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predik at	Inovatif	Inovatif		

3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Pemerintah Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi

penunjang urusan pemerintahan. Adapun capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	988.529.353.308	463.665.834.092	55,97	Rendah	46,90	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	847.456.247.081	396.386.041.892	52,98	Rendah	46,77	Sangat Rendah
1.01	Pendidikan	258.665.547.143	118.031.330.884	53,09	Rendah	45,63	Sangat Rendah
1.02	Kesehatan	496.565.188.576	241.624.429.955	63,45	Rendah	88,72	Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.925.424.690	23.964.685.829	68,47	Sedang	68,49	Sedang
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.215.360.000	560.380.612	79,67	Tinggi	25,00	Sangat Rendah
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	20.688.170.671	8.176.177.056	12,50	Sangat Rendah	56,67	Rendah
1.06	Sosial	7.396.556.001	4.029.037.556	40,67	Sangat Rendah	55,47	Rendah
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	141.073.106.227	67.279.792.200	58,96	Rendah	47,69	Sangat Rendah
2.07	Tenaga Kerja	4.354.449.939	2.094.439.217	20,00	Sangat Rendah	33,33	Sangat Rendah
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.217.633.410	365.277.178	70,00	Sedang	30,00	Sangat Rendah
2.09	Pangan	14.376.485.164	5.605.739.723	89,23	Tinggi	38,99	Sangat Rendah
2.10	Pertanahan			0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.11	Lingkungan Hidup	38.418.486.617	16.235.659.809	47,35	Sangat Rendah	42,26	Sangat Rendah
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6.625.426.983	3.872.645.274	100,00	Sangat Tinggi	58,45	Rendah
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.289.603.947	5.763.939.344	100,00	Sangat Tinggi	51,06	Rendah
2.15	Perhubungan	20.239.494.193	10.189.356.861	27,50	Sangat Rendah	50,34	Sangat Rendah
2.16	Komunikasi dan Informatika	6.471.017.981	3.696.757.748	68,58	Sedang	57,13	Rendah
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.208.599.572	5.360.879.388	46,56	Sangat Rendah	47,83	Sangat Rendah
2.18	Penanaman Modal	6.360.925.915	3.543.292.643	100,00	Sangat Tinggi	55,70	Rendah
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	9.822.902.282	6.176.068.012	33,33	Sangat Rendah	62,87	Rendah
2.20	Statistik	29.658.000	12.850.000	100,00	Sangat Tinggi	43,33	Sangat Rendah
2.21	Persandian	125.041.450	108.485.890	100,00	Sangat Tinggi	86,76	Tinggi
2.22	Kebudayaan	400.816.200	167.129.200	49,93	Sangat Rendah	41,70	Sangat Rendah
2.23	Perpustakaan	9.977.523.424	3.980.699.213	36,28	Sangat Rendah	39,90	Sangat Rendah
2.24	Kearsipan	155.041.150	106.572.700	72,44	Sedang	68,74	Sedang
3	URUSAN PILIHAN	10.158.329.730	2.983.568.981	72,08	Sedang	29,37	Sangat Rendah
3.25	Kelautan dan Perikanan	534.011.150	446.886.150	84,09	Tinggi	83,68	Tinggi

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.26	Pariwisata	4.284.274.500	664.105.625	75,00	Sedang	15,50	Sangat Rendah
3.27	Pertanian	1.810.848.430	874.279.140	93,50	Sangat Tinggi	48,28	Sangat Rendah
3.28	Kehutanan						
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral						
3.30	Perdagangan	1.685.041.650	253.404.750	46,56	Sangat Rendah	15,04	Sangat Rendah
3.31	Perindustrian	1.757.154.000	735.597.316	33,33	Sangat Rendah	41,86	Sangat Rendah
3.32	Transmigrasi	87.000.000	9.296.000	100,00	Sangat Tinggi	10,69	Sangat Rendah
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	104.304.750.783	60.936.517.931	54,37	Rendah	58,42	Rendah
4.01	Sekretariat Daerah	48.866.413.690	27.894.418.434	40,00	Sangat Rendah	57,08	Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	55.438.337.093	33.042.099.497	68,74	Sedang	59,60	Rendah
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	81.176.598.919	34.947.268.428	32,17	Sangat Rendah	43,05	Sangat Rendah
5.01	Perencanaan	16.298.993.873	8.263.794.970	10,30	Sangat Rendah	50,70	Sangat Rendah
5.02	Keuangan	56.329.776.216	22.840.475.829	51,48	Rendah	40,55	Sangat Rendah
5.03	Kepegawaian	6.502.710.746	3.510.178.699	43,52	Sangat Rendah	53,98	Rendah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1.075.321.084	177.360.450	55,56	Rendah	16,49	Sangat Rendah
5.05	Penelitian dan Pengembangan	969.797.000	155.458.480	0,00	Sangat Rendah	16,03	Sangat Rendah
5.06	Penghubung						
5.07	Pengelolaan Perbatasan Daerah						
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.727.954.934	4.700.799.853	46,22	Sangat Rendah	48,32	Sangat Rendah
6.01	Inspektorat	9.727.954.934	4.700.799.853	46,22	Sangat Rendah	48,32	Sangat Rendah
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	78.580.200.679	34.670.977.447	38,28	Sangat Rendah	44,12	Sangat Rendah
7.01	Kecamatan	78.580.200.679	34.670.977.447	38,28	Sangat Rendah	44,12	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.515.238.307	11.316.928.692	42,80	Sangat Rendah	34,80	Sangat Rendah
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	32.515.238.307	11.316.928.692	42,80	Sangat Rendah	34,80	Sangat Rendah
	TOTAL	1.304.992.426.660	613.221.895.424	49,73	Sangat Rendah	46,99	Sangat Rendah

Dari table diatas dapat dilihat capaian kinerja pada triwulan II tahun 2024 masih sangat rendah untuk semua urusan, hal tersebut disebabkan masih dalam proses pengadaan.

3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap*

Analysis dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan Per Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
1	DINAS PENDIDIKAN	259.000.738.343	118.198.460.084	45.64					53.09
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.667.404.643	85.707.763.692	49.37	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	46	46
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.898.252.700	32.289.256.392	38.03	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (%)	100.00	Persen	82.18	82.18
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.889.800	2.774.800	4.63	Indeks Pemerataan guru (Indeks)	0.20	Indeks	100	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.000.000	-	0	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui (%)	100.00	Persen	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	30.000.000	-	0	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	75.00	%	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	97.889.200	90.129.200	92.07	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan (Objek)	13.00	Jumlah	76.92	76.92
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	120.677.000	42.000.000	34.8	Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	55.00	%	72.73	72.73
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	16.000.000	-	0	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal (%)	60.00	%	0	0
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	35.000.000	35.000.000	100	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	76.00	%	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
2	DINAS KESEHATAN	496.565.188.576	241.624.429.955	48,66					88.72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	421.076.237.542	214.839.341.598	51.02	Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD	100.00	%	200	100
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	%	95.08	95.08
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	69.721.229.996	25.325.810.563	36.32	Persentase kepesertaan JKN	98.50	%	200	100
					Prevalensi stunting pada balita	6.00	%	185.15	100
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	15.88	%	200	100
					Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	92.00	angka	81.01	81.01
					Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100.00	%	200	100
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.562.181.906	322.049.000	12.57	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100.00	%	66.33	66.33

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	524.031.000	280.755.000	53.58	Persentase pembinaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	100.00	%	80	80
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.681.508.132	856.473.794	31.94	Persentase pemberdayaan masyarakat kesehatan	100.00	%	64.74	64.74
3	DPUTR	64.101.366.010	9.003.210.919	14.05					68.49
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.544.528.085	8.791.151.876	56.55	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	27.41	27.41
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.460.427.000	2.130.831.598	25.19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	57.37	%	199.95	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.577.766.310	465.225.276	13	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Minum yang Layak dan Aman	100.00	%	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.028.889.000	1.231.744.936	30.57	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	57.95	%	99.99	99.99

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.043.700.000	2.116.216.007	52.33	Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	42.46	%	198.72	100
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.141.034.200	1.644.842.811	39.72	Persentase Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	9.38	%	99.95	99.95
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.079.772.000	1.901.579.600	61.74	Persentase RTHKP dalam Kondisi baik	78.95	%	200	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.257.809.015	5.638.016.556	39.54	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	85.15	%	198.56	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	97.500.000	120.000	0.12	Persentase Pelaku Sektor Jasa Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	38.01	%	153.86	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	693.999.080	44.957.169	6.48	Persentase Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	70.00	Persen	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	476.000.000	154.918.000	32.55	Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana	100.00	%	0	0
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.308.000.000	285.636.780	6.63	Luas Permukiman Kumuh Yang Mendapatkan Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	10.00	Ha	0	0
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.050.000.000	113.389.832	10.8	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	1.36	%	200	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	351.360.000	5.530.000	1.57	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan oleh Pemerintah Daerah	11.38	%	171.46	100
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	30.000.000	906.000	3.02	Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	70.00	%	0	0
4	SATPOL PP	13.757.907.662	6.997.766.815	39.68					88.33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.494.483.912	5.702.950.990	54.34	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	65	65
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.087.424.500	1.170.607.000	37.92	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	100.00	%	100	100
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	175.999.250	124.208.825	70.57	Persentase Waktu tanggap (response time)	100.00	%	100	100
5	BPBD	6.930.263.009	1.178.410.241	17					25
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.610.312.309	2.049.084.229	56.76	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	25	25

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
6	DINAS SOSIAL	7.396.556.001	4.029.037.556	54.47					55.47
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.516.863.531	2.896.487.603	52.5	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	63.93	63.93
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.116.090.000	813.160.000	72.86	Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	25.00	%	53.33	53.33
					PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	45.00	%	100.22	100
					Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	55.00	%	71.79	71.79

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000	-	-	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100.00	%	0	0
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	387.876.000	198.119.000	51.08	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	100.00	%	44.95	44.95
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	599.458.850	213.579.550	35.63	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu	100.00	%	66.28	66.28
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	338.070.420	135.587.000	40.11	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	100.00	%	65.64	65.64
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.915.000	6.975.000	26.91	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100.00	%	33.33	33.33
7	DINAS TENAGA KERJA	4.354.449.939	2.094.439.217	22.54					33.33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.702.300.139	2.007.574.117	54.23	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	%	100	100
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.000.000	-	0	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	20.00	%	0	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	440.000.000	31.754.200	7.22	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1.00	%	0	0
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30.000.000	2.023.000	6.74	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	16.00	%	0	0
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	75.149.800	43.791.900	58.27	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	24.00	%	0	0
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	87.000.000	9.296.000	10.69	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi	3.00	%	100	100
8	DKP3	16.721.344.744	3.204.241.535	19.16					91.08
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.093.127.064	5.460.331.723	49.22	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	90	90
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	5.680.000	-	0	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	25.00	%	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.157.278.700	128.016.500	4.05	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	22.00	%	100	100
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113.650.000	14.250.000	12.54	Persentase Penanganan Daerah Kerawanan Pangan	90.00	%	126.14	100
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	3.141.500	46.54	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	89.00	%	56.18	56.18
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	474.991.150	405.440.150	85.36	Produktivitas Budidaya Perikanan	25.87	Angka	155.08	100
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	59.020.000	41.446.000	70.22	Persentase Ketersediaan Ikan	110.00	%	68.18	68.18
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	708.724.500	204.807.500	28.9	Produksi Padi	19316.00	Ton	74.27	74.27
					Produksi Daging	5902.70	Ton	75.78	75.78
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	561.956.000	321.887.320	57.28	Persentase Peningkatan Peserta Sekolah Agro di KAC	10.00	%	200	100
					Persentase Prasarana UPTD Agribisnis yang Digunakan	100.00	%	200	100
					Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	48.90	Ha	194.58	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	195.852.380	122.669.860	62.63	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100.00	%	200	100
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.629.500	7.684.500	89.05	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Mengikuti AUTP	30.00	%	163.08	100
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	335.686.050	217.229.960	64.71	Persentase Lembaga Usaha Tani dengan Kategori Kelas Utama	6.75	%	154.2	100
					Persentase Lembaga Usaha Tani yang Berbadan Hukum	8.00	Kelompok	175	100
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38.418.486.617	7.218.729.488	18.79					47.35
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.634.601.681	14.413.597.915	54.12	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	149	100
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	252.801.750	89.832.900	35.53	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100.00	%	25	25
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.632.274.400	98.108.036	6.01	Indeks Kenyamanan	24.00	Point	99.25	99.25

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	237.703.450	207.788.707	87.42	Indeks RTH	25.50	M2/Orang	0	0
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.980.000	21.025.000	87.68	Persentase limbah B3	100.00	%	120	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	41.263.100	16.363.500	39.66	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100.00	%	23.9	23.9
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.500.000	1.593.000	3.66	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	33.00	%	0	0
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	21.731.100	9.381.600	43.17	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	25.00	%	0	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	54.483.650	9.316.600	17.1	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100.00	%	155.56	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.409.538.686	1.348.410.651	14.33	Cakupan pengelolaan sampah	99.00	%	25.31	25.31
10	DISDUKCAPIL	6.625.426.983	3.872.645.274	32.96					100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.116.923.883	3.535.886.274	57.8	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	Persen	147.42	100
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	300.665.600	230.010.000	76.5	Cakupan Kepemilikan KK, KTP-el	100.00	Persen	117.5	100
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.265.500	42.925.000	59.4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	100.00	Persen	200	100
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	126.722.000	54.974.000	43.38	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100.00	Persen	200	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.850.000	8.850.000	100	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan	100.00	Persen	100	100
11	DP2KBP3A	12.507.237.357	6.129.216.522	49.01					76.63

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	94.350.000	15.322.580	16.24	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Kota Sukabumi	79.00	%	52.88	52.88
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	183.917.050	59.197.050	32.19	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.01	%	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	451.097.510	195.604.598	43.36	Indeks Kualitas Keluarga	72.50	%	200	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.999.900	18.599.900	74.4	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	2.00	Dokumen	100	100
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	74.089.750	15.038.750	20.3	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	2.00	Tingkatan	200	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	389.179.200	61.514.300	15.81	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	0.03	%	100	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.869.696.434	4.075.376.631	69.43	laporan kinerja dan keuangan	100.00	%	90	90
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	267.539.400	113.150.600	42.29	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	12.50	%	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.045.514.613	952.699.863	31.28	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	65.00	%	176.92	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.106.853.500	622.712.250	29.56	Presentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	62.00	%	180.65	100
12	DINAS PERHUBUNGAN	20.239.494.193	5.006.096.585	24.73					27.5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.312.680.966	8.614.554.568	52.81	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	54	54
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00		0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.926.813.227	1.574.802.293	40.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	56	56
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0		
13	DISKOMINFO	6.625.717.431	1.730.590.249	26.12					69.58
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.616.104.731	3.002.063.998	53.45	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	80.00	Persen	74.22	74.22

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	481.674.250	335.244.750	69.6	Indeks KIP	90.00	Persen	51.28	51.28
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	373.239.000	359.449.000	96.31	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	93.00	%	22.4	22.4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.658.000	12.850.000	43.33	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	60.00	Persen	100	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.041.450	108.485.890	86.76	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	77.00	Persen	100	100
14	DISKUMINDAG	14.650.795.222	2.837.125.437	19.36					46.56
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.432.767.872	4.453.293.199	52.81	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	50	50
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	19.000.000	17.600.000	92.63	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	11.33	%	0	0
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	35.010.000	18.850.000	53.84	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	6.80	%	100	100
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.000.000	1.400.000	7	Persentase Koperasi Aktif	64.00	%	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	203.704.250	76.400.000	37.51	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihann	19.83	%	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81.400.000	21.584.000	26.52	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	19.83	%	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.066.717.450	457.877.189	22.15	Persentase usaha mikro yang naik kelas	0.01	%	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350.000.000	313.875.000	89.68	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	0.47	%	100	100
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35.250.000	6.780.000	19.23	Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang di Fasilitasi	100.00	%	60	60
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.315.501.150	140.335.400	10.67	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	60.00	%	0	0
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.050.500	16.374.000	20.45	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.88	%	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	47.790.000	-	0	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	0.00	US\$	0	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	130.980.000	89.765.350	68.53	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	28.57	%	81.59	81.59
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	75.470.000	150.000	0.2	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	100.00	%	0	0
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.084.516.000	149.481.000	13.78	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	3.55	%	0	0
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	56.392.000	18.124.000	32.14	Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	100.00	%	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	616.246.000	567.992.316	92.17	Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	100.00	%	100	100
15	DPMPSTP	6.360.925.915	3.543.292.643	55.7					100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.094.632.865	2.953.269.702	57.97	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	90.00	%	100	100
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64.999.950	51.977.700	79.97	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	10.00	%	200	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	463.488.150	303.615.800	65.51	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80.00	%	100	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	628.116.450	168.265.000	26.79	Persentase Peningkatan Investasi di Kota Sukabumi	10.00	%	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	109.688.500	66.164.441	60.32	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal oleh penerima data	100.00	%	100	100
16	DISPORAPAR	14.107.176.782	3.770.490.902	26.73					72.1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.356.500.582	3.468.924.507	54.57	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu, nilai self assesment Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100.00	Persen	60.27	60.27
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	906.225.000	644.440.500	71.11	Persentase organisasi pemuda yang diberdayakan	80.00	Persen	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.560.176.700	2.062.703.005	80.57	Jumlah Raihan Medali Pada Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	18.00	M2/Orang	44.44	44.44

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.788.779.000	465.887.625	12.3	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	20.00	Persen	100	100
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	161.835.500	107.535.500	66.45	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	4.00	Kegiatan	50	50
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	66.947.500	4.347.500	6.49	Nilai tambah ekonomi kreatif	16.00	Persen	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	266.712.500	86.335.000	32.37	Jumlah Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	150.00	Orang	50	50
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	10.101.036.084	1.609.212.057	15.93					54.36
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.168.810.724	2.921.930.275	56.53	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	Persen	35.44	35.44
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.808.712.700	1.058.768.938	22.02	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72.00	Angka	37.11	37.11

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	126.541.150	90.167.700	71.26	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	63.50	%	85.33	85.33
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	28.500.000	16.405.000	57.56	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa untuk kepentingan negara dan pemerintah	66.80	%	59.55	59.55
18	BAPPEDA	17.268.790.873	8.419.253.450	48.75					10.3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.762.653.123	5.093.813.804	52.18	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	0	0
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.276.582.850	1.493.465.835	65.6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	100.00	%	51.51	51.51
					Persentase pencapaian IKU	100.00	Persen	0	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.259.757.900	1.676.515.331	39.36	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	100.00	persen	0	0
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	969.797.000	155.458.480	16.03	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100.00	%	0	0
	BPKPD	56.329.776.216	22.840.475.829	21.14					51.48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.145.118.407	16.573.440.735	43.45	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	Persen	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.899.365.379	3.854.982.944	29.89	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	90.00	Persen	5.91	5.91

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.440.257.350	401.952.310	27.91	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	90.00	Persen	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.845.035.080	2.010.099.840	52.28	Persentase Capaian Pajak Daerah	100.00	Persen	100	100
	BKPSDM	8.859.352.409	3.787.712.499	42.75					47,53
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.032.165.251	3.436.625.399	56.97	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100.00	%	50	50
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	467.831.495	72.589.300	15.52	Persentase Meningkatnya Pelayanan ASN	90.00	Persen	37.04	37.04
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.075.321.084	177.360.450	16.49	Persentase Meningkatnya Kompetensi ASN	90.00	Persen	55.56	55.56
19	INSPEKTORAT	9.727.954.934	4.700.799.853	22.16					45.68
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.386.996.934	4.415.421.778	52.65	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	90.00	%	28.4	28.4

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	648.320.000	217.805.275	33.6	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	78.00	%	100	100
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	80.00	%	100	100
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	692.638.000	67.572.800	9.76	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.21	Angka	0	0
					Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.05	Angka	0	0
20	SETDA	48.866.413.690	27.894.418.434	24.35					40
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.560.092.471	20.703.575.556	58.22	Presentase dokumen Perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	100.00	%	50	50
					Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan pemerintah daerah	100.00	%	50	50
					Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Memenuhi Aspek Penilaian	80.00	%	0	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
					Indeks pelayanan Publik	3.40	Point	0	0
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.764.343.219	6.849.153.562	53.66	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100.00	%	50	50
					Persentase pemenuhan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100.00	%	50	50
					Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	100.00	%	50	50
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	541.978.000	341.689.316	63.04	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	100.00	%	50	50
					Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	100.00	%	50	50
					Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara online	100.00	%	50	50
21	SETWAN	55.438.337.093	33.042.099.497	29.94					68.74
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.179.897.643	20.682.749.063	57.17	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat waktu	100.00	%	60.47	60.47

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.258.439.450	12.359.350.434	64.18	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100.00	%	77	77
22	CIKOLE	14.063.628.460	2.877.296.157	20.46					88.6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.349.501.410	4.879.644.372	52.19	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	Persen	73	73
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.845.192.200	38.721.926	2.1	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	100.00	Persen	75	75
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.784.060.600	931.197.300	33.45	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	Persen	95	95
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.024.700	41.634.600	58.62	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	Persen	200	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.349.550	8.959.600	58.37	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	Persen	200	100
23	GN. PUYUH	10.428.098.637	2.276.739.057	21.83					34.64
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.989.923.487	3.826.997.949	54.75	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	94.00	Persen	53.19	53.19

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.417.679.900	22.730.400	1.6	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	100.00	Persen	32	32
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.841.671.350	637.289.300	34.6	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	Persen	31	31
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.314.950	32.594.800	49.15	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	Persen	25	25
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.500.000	11.905.000	25.06	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	Persen	32	32
24	CITAMIANG	11.553.750.831	2.586.960.368	22.39					47.06
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.159.351.981	4.452.030.161	54.56	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	60	60
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.234.594.500	95.312.650	7.72	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	97.00	%	77.32	77.32
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.066.046.050	652.148.500	31.57	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	%	48	48

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.258.350	23.065.800	49.86	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	%	50	50
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.499.950	-	-	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	%	0	0
25	WARUDOYONG	12.329.614.579	2.753.286.054	22.33					79.7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.368.138.049	4.769.302.687	56.99	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	persen	74	74
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.581.550.400	57.894.800	3.66	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	88.00	persen	77.48	77.48
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.284.278.980	757.718.100	33.17	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	persen	71	71
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.873.150	25.072.350	54.66	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	persen	76	76
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.774.000	22.390.000	44.98	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1.00	%	200	100
26	BAROS	9.085.084.841	1.924.768.227	21.19					50

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.302.973.891	3.398.981.672	53.93	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	Persen	63	63
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.148.412.850	62.239.700	5.42	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	100.00	Persen	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.547.548.750	624.711.698	40.37	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	Persen	38	38
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.532.950	27.335.150	41.09	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	Persen	17	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.616.400	6.955.300	35.46	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	Persen	33	33
27	LEMBURSITU	11.076.896.442	2.358.128.310	21.29					73.33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.617.278.019	4.264.367.825	55.98	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	75	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.018.500	27.194.000	1.86	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	100.00	%	75	75
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.941.108.323	639.057.600	32.92	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	%	66.66	66.66
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.121.600	18.550.400	40.22	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	%	75	75
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.370.000	3.975.000	29.73	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	%	75	75
28	CIBEUREUM	10.207.882.414	2.100.924.272	20.58					89.8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.251.042.664	3.753.789.033	51.77	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	persen	82	82
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.216.914.275	64.738.075	5.32	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	80.00	persen	112.5	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.667.417.200	506.561.899	30.38	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	31.00	persen	200	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.286.400	27.544.400	65.14	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	75.00	persen	100	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.221.875	9.518.875	31.5	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	persen	67	67
29	KESBANGPOL	32.515.238.307	11.316.928.692	6.35					42.8
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	810.136.948	206.154.948	25.45		100.00	Persen	54	54
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	864.579.239	603.588.581	69.81		100.00	Persen	50	50
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	669.637.250	567.735.000	84.78		100.00	Persen	58	58
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	378.959.500	94.092.500	24.83		100.00	Persen	28	28

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	25.904.300.300	7.617.618.000	29.41		100.00	Persen	24	24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.887.625.070	2.227.739.663	57					

3.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Dengan mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan rencana pembangunan daerah karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan nasional dan provinsi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diidentifikasi isu strategis daerah yang kemudian menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa
2. Peningkatan Kondusifitas Kota
3. Peningkatan Kondusifitas Kota Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan tersebut maka disusunlah arah kebijakan sebagai landasan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Sukabumi, dari arah kebijakan dapat dilihat bahwa program kegiatan yang dilaksanakan Kota Sukabumi sangat mendukung dan mengacu kepada arah kebijakan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Program pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Selain program pembangunan Daerah, terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi antara daerah, provinsi dan nasional dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan.

BAB IV

PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 PENDORONG

Pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2024 dilaporkan dalam bentuk formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Bab III. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi kegiatan pada Triwulan II, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian setiap sub kegiatan, kegiatan dan rata-ratanya per program dan per Perangkat Daerah. Capaian Indikator Makro, Capaian Sasaran (IKU), Capaian kinerja dan anggaran program setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, namun secara umum dapat disimpulkan berada pada kategori yang **sangat rendah**.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024, Perangkat Daerah mengalami berbagai kendala baik eksternal, internal, maupun hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga belum mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun Faktor Pendorong Dalam Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Internal dari Pemerintah Daerah;
2. Kelancaran dan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan;
3. Waktu yang cukup untuk berjalannya kegiatan;
4. Keseimbangan antara waktu dengan jadwal yang sudah dirancang;
5. Proses administrasi secara tepat sasaran;
6. Struktur organisasi dan kelembagaan sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas.
7. Sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sudah tersedia di setiap Perangkat Daerah;
8. Peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan/tugas;
9. Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah;

4.2. PENGHAMBATAN

Adapun Faktor Penghambat Dalam Pendapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya pagu pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat yang mengakibatkan *Refocussing* beberapa anggaran kegiatan mengakibatkan beberapa kegiatan harus berubah indikatornya dan tidak sesuai dengan target perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan;
2. Penetapan indikator kegiatan dan program yang tidak tepat mengakibatkan sulit tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan;
3. Faktor lingkungan yang tidak mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
4. Tidak sinkronnya antara rencana yang sudah dirancang dengan jumlah anggaran yang sudah tertera dalam DPA;
5. Faktor Sumber Daya Manusia yang tidak cakap atau belum mampu dalam melaksanakan kegiatan;
6. Pengadaan barang melalui e catalog dan lelang masih dalam proses sehingga kegiatan tertunda;
7. Terlambatnya proses lelang karena kendala integrasi sistem SIPD dengan SIRUP;
8. Adanya kesalahan dalam mengevaluasi hasil kegiatan dan program sehingga tujuan utama pembangunan daerah tidak dapat tercapai. Dalam hal ini, secara umum proses evaluasi hanya dapat mendeteksi realisasi anggaran program dan kegiatan, dan belum mampu mengidentifikasi realisasi kinerja.

4.3. TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN RKPD BERIKUTNYA

Untuk merespon faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja program yang dihadapi oleh Perangkat Daerah, Bappeda merumuskan dan memberikan usulan tindak lanjut yaitu berupa halhal yang perlu dilakukan untuk membantu meningkatkan atau mencapai kinerja program pada tahun berikutnya. Saran tindak lanjut ini diharapkan

dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan. Adapun saran tindak lanjut tersebut disajikan per Perangkat Daerah sesuai dengan faktor pendorong dan faktor penghambat. Tindak Lanjut yang dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi mengenai penambahan dana transfer/Dana Bantuan Keuangan;
2. Sosialisasi mengenai penetapan indikator kegiatan agar tidak ada kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan;
3. Tingkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait/ stakeholders untuk ketepatan waktu dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan 2024;
4. Tingkatkan koordinasi dengan TAPD dalam penetapan besarnya pagu anggaran;
5. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran;
6. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Melakukan pengembangan Sistem SIPEKA (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja) untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan oleh Bappeda.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan prioritas pada RKPD tahun 2024 disusun mengikuti prinsip *money follow output priority programs* dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD tahun 2024 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dalam pelaksanaan RKPD perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang kemudian akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya dan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota setiap triwulan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah (Wali Kota) dan Bappeda Provinsi.

Secara umum capaian kinerja pemerintah Kota Sukabumi belum dapat ditentukan hasilnya baik atau buruk karena masih dalam proses pengerjaan dan baru memasuki semester I tahun 2024, namun diharapkan di triwulan berikutnya mulai terlihat hasil kinerja yang lebih baik sebagai *triger* untuk mendapatkan prestasi daerah yang lebih baik. Sebagai contoh Kota Sukabumi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan peringkat BB dalam penilaian Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) tingkat kabupaten/kota, diharapkan di tahun ini dan yang akan datang dapat lebih meningkat atau minimal mempertahankan nilainya sebagai bukti pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik. Salah satu indikator yang harus dicapai adalah realisasi anggaran dan kinerja di masing-masing perangkat daerah dapat kembali didominasi oleh kriteria sangat tinggi dan tidak ada satupun perangkat daerah yang termasuk dalam kriteria sedang atau dibawahnya.

Namun selain keberhasilan yang diperoleh secara umum juga ada beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian realisasi sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi Bappeda sebagai induk perencana tingkat daerah. Perlu

adanya pendampingan yang melekat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatannya.

5.2 Rekomendasi

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan agar perencanaan pembangunan yang akan datang menjadi lebih baik, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam perspektif kedepan, perlu diperbaiki indikator kegiatan dan program agar sistem evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif, dan hasil evaluasi benar-benar dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan pengendalian yang sesuai dengan kondisi eksisting;
2. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, sehingga Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja PD untuk menyusun evaluasi triwulanan RKPD. Dalam perspektif kedepan perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renjanya masing-masing dengan data yang akurat, tepat waktu dan berkualitas;
3. Perlu dibangunnya aplikasi/sistem Evaluasi dan Monitoring yang dapat secara otomatis menghasilkan penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan, sehingga output evaluasi dapat dengan cepat dihasilkan dan segera dapat ditindaklanjuti. Karena pada hakikatnya sistem Evaluasi dan Monitoring bukan sistem yang ditujukan untuk mengumpulkan angka dan data-data realisasi, melainkan sistem Evaluasi dan Monitoring harus mampu melakukan penilaian secara otomatis sehingga dapat memberikan informasi capaian kinerja yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

NO	PROGRAM	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			
		PAGU	REALISASI	%		Target	Satuan	REALISASI S.D TW. II	Capaian
1	DINAS PENDIDIKAN	259,000,738,343	118,198,460,084	45.64					53.09
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173,667,404,643	85,707,763,692	49.37	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	46	46
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84,898,252,700	32,289,256,392	38.03	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (%)	100.00	Persen	82.18	82.18
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59,889,800	2,774,800	4.63	Indeks Pemerataan guru (Indeks)	0.20	Indeks	100	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10,000,000	-	0	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui (%)	100.00	Persen	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	30,000,000	-	0	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	75.00	%	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	97,889,200	90,129,200	92.07	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan (Objek)	13.00	Jumlah	76.92	76.92
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	120,677,000	42,000,000	34.8	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	55.00	%	72.73	72.73
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	16,000,000	-	0	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal (%)	60.00	%	0	0
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	35,000,000	35,000,000	100	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	76.00	%	100	100
2	DINAS KESEHATAN	496,565,188,576	241,624,429,955	48.66					88.72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	421,076,237,542	214,839,341,598	51.02	Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD	100.00	%	200	100
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	%	95.08	95.08
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	69,721,229,996	25,325,810,563	36.32	Persentase kepesertaan JKN	98.50	%	200	100
					Prevalensi stunting pada balita	6.00	%	185.15	100
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	15.88	%	200	100
					Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	92.00	angka	81.01	81.01
					Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100.00	%	200	100
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,562,181,906	322,049,000	12.57	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100.00	%	66.33	66.33
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	524,031,000	280,755,000	53.58	Persentase pembinaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	100.00	%	80	80
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,681,508,132	856,473,794	31.94	Persentase pemberdayaan masyarakat kesehatan	100.00	%	64.74	64.74
3	DPUTR	64,101,366,010	9,003,210,919	14.05					68.49
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,544,528,085	8,791,151,876	56.55	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	27.41	27.41
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8,460,427,000	2,130,831,598	25.19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	57.37	%	199.95	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3,577,766,310	465,225,276	13	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Minum yang Layak dan Aman	100.00	%	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,028,889,000	1,231,744,936	30.57	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	57.95	%	99.99	99.99
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,043,700,000	2,116,216,007	52.33	Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	42.46	%	198.72	100
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4,141,034,200	1,644,842,811	39.72	Persentase Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	9.38	%	99.95	99.95
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3,079,772,000	1,901,579,600	61.74	Persentase RTHKP dalam Kondisi baik	78.95	%	200	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14,257,809,015	5,638,016,556	39.54	Tingkat Kematapan Jalan Kota	85.15	%	198.56	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	97,500,000	120,000	0.12	Persentase Pelaku Sektor Jasa Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	38.01	%	153.86	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	693,999,080	44,957,169	6.48	Persentase Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	70.00	Persen	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	476,000,000	154,918,000	32.55	Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana	100.00	%	0	0
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4,308,000,000	285,636,780	6.63	Luas Permukiman Kumuh Yang Mendapatkan Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	10.00	Ha	0	0
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1,050,000,000	113,389,832	10.8	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	1.36	%	200	100
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	351,360,000	5,530,000	1.57	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan oleh Pemerintah Daerah	11.38	%	171.46	100
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	30,000,000	906,000	3.02	Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	70.00	%	0	0
4	SATPOL PP	13,757,907,662	6,997,766,815	39.68					88.33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,494,483,912	5,702,950,990	54.34	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	65	65
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,087,424,500	1,170,607,000	37.92	Persentase Gangguan Kamtibmas yang dapat diselesaikan	100.00	%	100	100

	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	175,999,250	124,208,825	70.57	Persentase Waktu tanggap (response time)	100.00	%	100	100
5	BPBD	6,930,263,009	1,178,410,241	17					25
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,610,312,309	2,049,084,229	56.76	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	25	25
6	DINAS SOSIAL	7,396,556,001	4,029,037,556	54.47					55.47
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,516,863,531	2,896,487,603	52.5	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	63.93	63.93
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,116,090,000	813,160,000	72.86	Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	25.00	%	53.33	53.33
					PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	45.00	%	100.22	100
					Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	55.00	%	71.79	71.79
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1,500,000	-	-	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100.00	%	0	0
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	387,876,000	198,119,000	51.08	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	100.00	%	44.95	44.95
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	599,458,850	213,579,550	35.63	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu	100.00	%	66.28	66.28
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	338,070,420	135,587,000	40.11	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	100.00	%	65.64	65.64
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25,915,000	6,975,000	26.91	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100.00	%	33.33	33.33
7	DINAS TENAGA KERJA	4,354,449,939	2,094,439,217	22.54					33.33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,702,300,139	2,007,574,117	54.23	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	%	100	100
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20,000,000	-	0	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	20.00	%	0	0
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	440,000,000	31,754,200	7.22	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1.00	%	0	0
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30,000,000	2,023,000	6.74	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	16.00	%	0	0
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	75,149,800	43,791,900	58.27	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	24.00	%	0	0
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	87,000,000	9,296,000	10.69	Persentase pelaksanaan MOU/ kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi	3.00	%	100	100
8	DKP3	16,721,344,744	3,204,241,535	19.16					91.08
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,093,127,064	5,460,331,723	49.22	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	90	90
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	5,680,000	-	0	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	25.00	%	100	100
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3,157,278,700	128,016,500	4.05	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	22.00	%	100	100
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113,650,000	14,250,000	12.54	Persentase Penanganan Daerah Kerawanan Pangan	90.00	%	126.14	100
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6,749,400	3,141,500	46.54	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	89.00	%	56.18	56.18
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	474,991,150	405,440,150	85.36	Produktivitas Budidaya Perikanan	25.87	Angka	155.08	100
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	59,020,000	41,446,000	70.22	Persentase Ketersediaan Ikan	110.00	%	68.18	68.18
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	708,724,500	204,807,500	28.9	Produksi Padi	19316.00	Ton	74.27	74.27
					Produksi Daging	5902.70	Ton	75.78	75.78
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	561,956,000	321,887,320	57.28	Persentase Peningkatan Peserta Sekolah Agro di KAC	10.00	%	200	100
					Persentase Prasarana UPTD Agribisnis yang Digunakan	100.00	%	200	100
					Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	48.90	Ha	194.58	100
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	195,852,380	122,669,860	62.63	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100.00	%	200	100
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8,629,500	7,684,500	89.05	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Mengikuti AUTP	30.00	%	163.08	100
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	335,686,050	217,229,960	64.71	Persentase Lembaga Usaha Tani dengan Kategori Kelas Utama	6.75	%	154.2	100

					Persentase Lembaga Usaha Tani yang Berbadan Hukum	8.00	Kelompok	175	100
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38,418,486,617	7,218,729,488	18.79					47.35
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,634,601,681	14,413,597,915	54.12	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	149	100
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	252,801,750	89,832,900	35.53	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	100.00	%	25	25
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,632,274,400	98,108,036	6.01	Indeks Kenyamanan	24.00	Point	99.25	99.25
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	237,703,450	207,788,707	87.42	Indeks RTH	25.50	M2/Orang	0	0
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23,980,000	21,025,000	87.68	Persentase limbah B3	100.00	%	120	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	41,263,100	16,363,500	39.66	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100.00	%	23.9	23.9
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43,500,000	1,593,000	3.66	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	33.00	%	0	0
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	21,731,100	9,381,600	43.17	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	25.00	%	0	0
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	54,483,650	9,316,600	17.1	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100.00	%	155.56	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9,409,538,686	1,348,410,651	14.33	Cakupan pengelolaan sampah	99.00	%	25.31	25.31
10	DISDUKCAPIL	6,625,426,983	3,872,645,274	32.96					100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,116,923,883	3,535,886,274	57.8	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	Persen	147.42	100
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	300,665,600	230,010,000	76.5	Cakupan Kepemilikan KK, KTP-el	100.00	Persen	117.5	100
	PROGRAM PENCATATAN SIPL	72,265,500	42,925,000	59.4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	100.00	Persen	200	100
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	126,722,000	54,974,000	43.38	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100.00	Persen	200	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8,850,000	8,850,000	100	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan	100.00	Persen	100	100
11	DP2KBP3A	12,507,237,357	6,129,216,522	49.01					76.63
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	94,350,000	15,322,580	16.24	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Kota Sukabumi	79.00	%	52.88	52.88
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	183,917,050	59,197,050	32.19	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.01	%	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	451,097,510	195,604,598	43.36	Indeks Kualitas Keluarga	72.50	%	200	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24,999,900	18,599,900	74.4	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	2.00	Dokumen	100	100
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	74,089,750	15,038,750	20.3	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	2.00	Tingkatan	200	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	389,179,200	61,514,300	15.81	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	0.03	%	100	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,869,696,434	4,075,376,631	69.43	laporan kinerja dan keuangan	100.00	%	90	90
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	267,539,400	113,150,600	42.29	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	12.50	%	100	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,045,514,613	952,699,863	31.28	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	65.00	%	176.92	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,106,853,500	622,712,250	29.56	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	62.00	%	180.65	100
12	DINAS PERHUBUNGAN	20,239,494,193	5,006,096,585	24.73					27.5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,312,680,966	8,614,554,568	52.81	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	54	54
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00		0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,926,813,227	1,574,802,293	40.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	56	56
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0		
13	DISKOMINFO	6,625,717,431	1,730,590,249	26.12					69.58
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,616,104,731	3,002,063,998	53.45	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	80.00	Persen	74.22	74.22

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	481,674,250	335,244,750	69.6	Indeks KIP	90.00	Persen	51.28	51.28
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	373,239,000	359,449,000	96.31	Persentase Aplikasi Informatika yang digunakan dalam pemerintah Daerah	93.00	%	22.4	22.4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29,658,000	12,850,000	43.33	Persentase penggunaan statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan	60.00	Persen	100	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125,041,450	108,485,890	86.76	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	77.00	Persen	100	100
14	DISKUMINDAG	14,650,795,222	2,837,125,437	19.36					46.56
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,432,767,872	4,453,293,199	52.81	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	50	50
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	19,000,000	17,600,000	92.63	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	11.33	%	0	0
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	35,010,000	18,850,000	53.84	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	6.80	%	100	100
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20,000,000	1,400,000	7	Persentase Koperasi Aktif	64.00	%	100	100
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	203,704,250	76,400,000	37.51	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihann	19.83	%	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81,400,000	21,584,000	26.52	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	19.83	%	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,066,717,450	457,877,189	22.15	Persentase usaha mikro yang naik kelas	0.01	%	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350,000,000	313,875,000	89.68	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	0.47	%	100	100
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	35,250,000	6,780,000	19.23	Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang di Fasilitasi	100.00	%	60	60
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,315,501,150	140,335,400	10.67	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	60.00	%	0	0
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80,050,500	16,374,000	20.45	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.88	%	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	47,790,000	-	0	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	0.00	US\$	0	0
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	130,980,000	89,765,350	68.53	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	28.57	%	81.59	81.59
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	75,470,000	150,000	0.2	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	100.00	%	0	0
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,084,516,000	149,481,000	13.78	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	3.55	%	0	0
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	56,392,000	18,124,000	32.14	Persentase IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	100.00	%	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	616,246,000	567,992,316	92.17	Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	100.00	%	100	100
15	DPMPSTP	6,360,925,915	3,543,292,643	55.7					100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,094,632,865	2,953,269,702	57.97	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	90.00	%	100	100
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64,999,950	51,977,700	79.97	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	10.00	%	200	100
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	463,488,150	303,615,800	65.51	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80.00	%	100	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	628,116,450	168,265,000	26.79	Persentase Peningkatan Investasi di Kota Sukabumi	10.00	%	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	109,688,500	66,164,441	60.32	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal oleh penerima data	100.00	%	100	100
16	DISPORAPAR	14,107,176,782	3,770,490,902	26.73					72.1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,356,500,582	3,468,924,507	54.57	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu, nilai self assesment Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100.00	Persen	60.27	60.27
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	906,225,000	644,440,500	71.11	Persentase organisasi pemuda yang diberdayakan	80.00	Persen	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2,560,176,700	2,062,703,005	80.57	Jumlah Raihan Medali Pada Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	18.00	M2/Orang	44.44	44.44
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3,788,779,000	465,887,625	12.3	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	20.00	Persen	100	100
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	161,835,500	107,535,500	66.45	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	4.00	Kegiatan	50	50
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	66,947,500	4,347,500	6.49	Nilai tambah ekonomi kreatif	16.00	Persen	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	266,712,500	86,335,000	32.37	Jumlah Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	150.00	Orang	50	50
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	10,101,036,084	1,609,212,057	15.93					54.36

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,168,810,724	2,921,930,275	56.53	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang usrusan pemerintah daerah	100.00	Persen	35.44	35.44
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4,808,712,700	1,058,768,938	22.02	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72.00	Angka	37.11	37.11
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	126,541,150	90,167,700	71.26	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	63.50	%	85.33	85.33
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	28,500,000	16,405,000	57.56	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa untuk kepentingan negara dan pemerintah	66.80	%	59.55	59.55
18	BAPPEDA	17,268,790,873	8,419,253,450	48.75					10.3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,762,653,123	5,093,813,804	52.18	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100.00	%	0	0
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,276,582,850	1,493,465,835	65.6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	100.00	%	51.51	51.51
					Persentase pencapaian IKU	100.00	Persen	0	0
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,259,757,900	1,676,515,331	39.36	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	100.00	persen	0	0
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	969,797,000	155,458,480	16.03	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100.00	%	0	0
	BPKPD	56,329,776,216	22,840,475,829	21.14					51.48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38,145,118,407	16,573,440,735	43.45	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	Persen	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12,899,365,379	3,854,982,944	29.89	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	90.00	Persen	5.91	5.91
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,440,257,350	401,952,310	27.91	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	90.00	Persen	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,845,035,080	2,010,099,840	52.28	Persentase Capaian Pajak Daerah	100.00	Persen	100	100
	BKPSDM	8,859,352,409	3,787,712,499	42.75					47.53
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,032,165,251	3,436,625,399	56.97	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	100.00	%	50	50
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	467,831,495	72,589,300	15.52	Persentase Meningkatnya Pelayanan ASN	90.00	Persen	37.04	37.04
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,075,321,084	177,360,450	16.49	Persentase Meningkatnya Kompetensi ASN	90.00	Persen	55.56	55.56
19	INSPEKTORAT	9,727,954,934	4,700,799,853	22.16					45.68
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,386,996,934	4,415,421,778	52.65	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	90.00	%	28.4	28.4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	648,320,000	217,805,275	33.6	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	78.00	%	100	100
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	80.00	%	100	100
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	692,638,000	67,572,800	9.76	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.21	Angka	0	0
					Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.05	Angka	0	0
20	SETDA	48,866,413,690	27,894,418,434	24.35					40
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,560,092,471	20,703,575,556	58.22	Presentase dokumen Perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	100.00	%	50	50
					Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan pemerintah daerah	100.00	%	50	50
					Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Memenuhi Aspek Penilaian	80.00	%	0	0
					Indeks pelayanan Publik	3.40	Point	0	0
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12,764,343,219	6,849,153,562	53.66	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100.00	%	50	50
					Persentase pemenuhan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100.00	%	50	50
					Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	100.00	%	50	50
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	541,978,000	341,689,316	63.04	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	100.00	%	50	50

					Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	100.00	%	50	50
					Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara online	100.00	%	50	50
21	SETWAN	55,438,337,093	33,042,099,497	29.94					68.74
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,179,897,643	20,682,749,063	57.17	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat waktu	100.00	%	60.47	60.47
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19,258,439,450	12,359,350,434	64.18	Persentase propempera yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100.00	%	77	77
22	CIKOLE	14,063,628,460	2,877,296,157	20.46					88.6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,349,501,410	4,879,644,372	52.19	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	Persen	73	73
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,845,192,200	38,721,926	2.1	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	100.00	Persen	75	75
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,784,060,600	931,197,300	33.45	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	Persen	95	95
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71,024,700	41,634,600	58.62	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	Persen	200	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,349,550	8,959,600	58.37	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	Persen	200	100
23	GN. PUYUH	10,428,098,637	2,276,739,057	21.83					34.64
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,989,923,487	3,826,997,949	54.75	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	94.00	Persen	53.19	53.19
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,417,679,900	22,730,400	1.6	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	100.00	Persen	32	32
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,841,671,350	637,289,300	34.6	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	Persen	31	31
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66,314,950	32,594,800	49.15	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	Persen	25	25
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47,500,000	11,905,000	25.06	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	Persen	32	32
24	CITAMIANG	11,553,750,831	2,586,960,368	22.39					47.06
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,159,351,981	4,452,030,161	54.56	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	60	60
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,234,594,500	95,312,650	7.72	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	97.00	%	77.32	77.32
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,066,046,050	652,148,500	31.57	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	%	48	48
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46,258,350	23,065,800	49.86	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	%	50	50
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47,499,950	-	-	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	%	0	0
25	WARUDOYONG	12,329,614,579	2,753,286,054	22.33					79.7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,368,138,049	4,769,302,687	56.99	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	persen	74	74
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,581,550,400	57,894,800	3.66	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	88.00	persen	77.48	77.48
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,284,278,980	757,718,100	33.17	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	persen	71	71
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45,873,150	25,072,350	54.66	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	persen	76	76
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49,774,000	22,390,000	44.98	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1.00	%	200	100
26	BAROS	9,085,084,841	1,924,768,227	21.19					50
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,302,973,891	3,398,981,672	53.93	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	Persen	63	63
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,148,412,850	62,239,700	5.42	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	100.00	Persen	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,547,548,750	624,711,698	40.37	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	Persen	38	38
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66,532,950	27,335,150	41.09	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	Persen	17	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19,616,400	6,955,300	35.46	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	Persen	33	33
27	LEMBURSIU	11,076,896,442	2,358,128,310	21.29					73.33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,617,278,019	4,264,367,825	55.98	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	%	75	75

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,459,018,500	27,194,000	1.86	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	100.00	%	75	75
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,941,108,323	639,057,600	32.92	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	100.00	%	66.66	66.66
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46,121,600	18,550,400	40.22	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	100.00	%	75	75
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13,370,000	3,975,000	29.73	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	%	75	75
28	CIBEUREUM	10,207,882,414	2,100,924,272	20.58					89.8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,251,042,664	3,753,789,033	51.77	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00	persen	82	82
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,216,914,275	64,738,075	5.32	Cakupan pelayanan publik di kecamatan/IKM	80.00	persen	112.5	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,667,417,200	506,561,899	30.38	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	31.00	persen	200	100
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42,286,400	27,544,400	65.14	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	75.00	persen	100	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,221,875	9,518,875	31.5	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100.00	persen	67	67
29	KESBANGPOL	32,515,238,307	11,316,928,692	6.35					42.8
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	810,136,948	206,154,948	25.45		100.00	Persen	54	54
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	864,579,239	603,588,581	69.81		100.00	Persen	50	50
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	669,637,250	567,735,000	84.78		100.00	Persen	58	58
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	378,959,500	94,092,500	24.83		100.00	Persen	28	28
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	25,904,300,300	7,617,618,000	29.41		100.00	Persen	24	24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,887,625,070	2,227,739,663	57					